

**MANAJEMEN KURIKULUM PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
DI SDIT RABBANI KECAMATAN TANETE RIATTANG
KABUPATEN BONE**



Tesis

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Magister dalam Bidang Manajemen Pendidikan Islam pada
Pascasarjana UIN Alauddin
Makassar

Oleh:

MUSAWWIR

NIM: 80300215028

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN
MAKASSAR
2017**

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Mahasiswa yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : MUSAWWIR
NIM : 80300215028
Tempat,Tgl. Lahir : Macege, 14 September 1983
Jurusan/Konsentrasi : Manajemen Pendidikan Islam
Fakultas : Pascasarjana UIN Alauddin
Alamat : Jl. Besse Kajuara No. 9 Watampone
JudulTesis : Manajemen Kurikulum Pendidikan Agama Islam di SDIT
Rabbani Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa tesis ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian, maka tesis ini beserta gelar yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Makassar, 11 September 2017

Penulis,



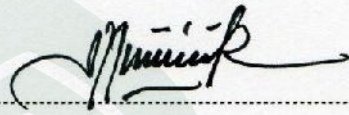
MUSAWWIR
NIM. 80300215028

PENGESAHAN TESIS

Tesis dengan judul ***"Manajemen Kurikulum Pendidikan Agama Islam di SDIT Rabbani Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone"*** yang disusun oleh Saudara **Musawwir**, NIM: **80300215028**, telah diujikan dan dipertahankan dalam Sidang Ujian Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari **Kamis, 31 - 08 - 2017** Masehi, bertepatan dengan tanggal **9 Zulhijjah 1438** Hijriah, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister dalam bidang **Manajemen Pendidikan Islam** pada Pascasarjana UIN Alauddin Makassar.

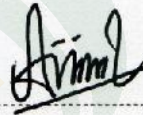
PROMOTOR:

1. Dr. Muhammad Yaumi, M.Hum., M.A.

()

KOPROMOTOR:

2. Dra. Hj. St. Azisah, M.Ed.St., Ph.D.

()

PENGUJI:

1. Prof. Dr. H. Mappanganro, M.A.

()

2. Dr. H. Arifuddin Siraj, M.Pd.

()

3. Dr. Muhammad Yaumi, M.Hum., M.A.

()

4. Dra. Hj. St. Azisah, M.Ed.St., Ph.D.

()

Makassar, 11 September 2017

Diketahui oleh:

Direktur Pascasarjana

UIN Alauddin Makassar,



Prof. Dr. Sabri Samin, M.Ag.

NIP. 19561213 198703 1 022

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

Puji syukur ke hadirat Allah swt., yang selalu memberikan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya sehingga tesis ini dapat diselesaikan. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad saw., sebagai uswatun hasanah bagi kita semua.

Dalam menyelesaikan tesis ini tidak lepas dari dukungan berbagai pihak, oleh karenanya ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tinggiya terkhusus kepada: kedua orang tua, bapak H. Mintang (Alm.) dan ibu Hj. St. Rahma yang dengan penuh kasih sayang dan kesabaran serta penuh pengorbanan dalam mengasuh, membimbing dan mendidik. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada:

1. Rektor UIN Alauddin Makassar, Prof. Dr. H. Musafir Pababbari, M.Si., para Pembantu Rektor, Prof. Dr. Mardan, M.Ag. (Wakil Rektor I), Prof. Dr. H. Lomba Sultan, M.A. (Wakil Rektor II), Prof. St. Aisyah, M.A., Ph.D. (Wakil Rektor III), dan Prof. Hamdan Juhannis, M.A., Ph.D. (Wakil Rektor IV) sebagai penentu kebijakan di Perguruan Tinggi ini, tempat penulis mengikuti studi Program Magister.
2. Direktur Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, Prof. H. Sabri Samin, M.Ag. serta para Staf yang senantiasa memberikan pelayanan administratif kepada penulis selama menempuh pendidikan di Pascasarjana Program Magister UIN Alauddin Makassar.

3. Prof. Dr. H. Achmad Abu Bakar, M.Ag., selaku Asisten Direktur I, Dr. Kamaluddin Abunawas, M. Ag., selaku Asisten Direktur II dan Prof. Dr. Hj. Mulyati Amin, M. Ag., selaku Wakil Direktur III yang telah memfasilitasi penulis selama menempuh pendidikan di Pascasarjana UIN Alauddin Makassar.
4. Dr. H. Arifuddin Siraj, M.Pd., selaku ketua Program Studi Manajemen Pendidikan Islam dan Dr. Muhammad Yaumi, M.Hum., M.A., selaku ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam yang telah banyak membantu dan membimbing penulis selama menempuh pendidikan di Pascasarjana UIN Alauddin Makassar.
5. Dr. Muhammad Yaumi, M. Hum., M.A., dan Dra. Hj. St. Azisah, M.Ed.St., Ph.D. selaku Promotor dan Kopromotor yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan sejak awal hingga akhir penulisan tesis ini.
6. Prof. Dr. H. Mappanganro, M.A. dan Dr. H. Arifuddin Siraj, M.Pd. selaku Penguji yang telah banyak memberikan petunjuk dan arahan untuk perbaikan tesis ini.
7. Para Guru Besar dan Dosen Pemandu mata kuliah pada Pascasarjana UIN Alauddin Makassar yang telah memberikan ilmu pengetahuannya kepada penulis selama ini.
8. Kepala Perpustakaan Pusat UIN Alauddin dan Pengelola Perpustakaan Unit Pascasarjana UIN Alauddin yang selama ini telah membantu penulis mengatasi kekurangan literatur dalam penyusunan tesis ini.
9. Kepada Kepala Sekolah dan Guru-guru SDIT Rabbani yang telah banyak bekerjasama dan memberikan data serta informasi yang penulis butuhkan dalam menyelesaikan tesis ini.
10. Rahmayati, S.Pd.I sebagai istri yang selalu membantu dan memberikan motivasi serta anak-anak tercinta, M. Fakhri, Fatimah Azzahrah, dan Firda

Mufidah yang telah rela ditinggalkan selama penulis mengikuti studi di Pascasarjana UIN Alauddin Makassar.

11. Teman-teman Mahasiswa di Pascasarjana UIN Alauddin Makassar serta seluruh sahabat tanpa terkecuali yang selama ini telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tesis dan studi Program Magister Pascasarjana UIN Alauddin Makassar. Semoga Allah swt. memberikan balasan yang setimpal kepada mereka semua. Akhirnya, penulis berharap semoga keberadaan tesis ini dapat bermanfaat.

Wassalam.

Makassar, 11 September 2017

Penulis,



MUSAWWIR

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR ISI

	Halaman
JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	ii
PENGESAHAN TESIS	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
PEDOMAN TRASLITERASI DAN SINGKATAN	xii
ABSTRAK	xx
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Kajian Pustaka/Penelitian Terdahulu	10
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	13
BAB II TINJAUAN TEORETIS	
A. Manajemen Kurikulum	15
1. Pengertian Manajemen	15
2. Pengertian Kurikulum	17
3. Pengertian Manajemen Kurikulum	19
4. Ruang Lingkup Manajemen Kurikulum	22
B. Organisasi Kurikulum	36
C. Model Pengembangan Kurikulum	43
D. Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan	48
1. Pengertian KTSP	48
2. Landasan Pengembangan KTSP	49
3. Komponen KTSP	50
4. Mekanisme Penyusunan dan Pengembangan KTSP	56
5. Prinsip-prinsip Penyusunan dan Pengembangan KTSP	62
E. Perpaduan Kurikulum Pendidikan Agama Islam	64
1. Pendidikan Agama Islam	64

	2. Kurikulum Pendidikan Agama Islam di SD (Diknas)	70
	3. Kurikulum Pendidikan Agama Islam di MI (Kemenag)	78
	4. Kurikulum Pendidikan Agama Islam di SDIT Rabbani	80
	F. Kerangka Konseptual	83
BAB III	METODE PENELITIAN	
	A. Jenis dan Lokasi Penelitian	86
	B. Pendekatan Penelitian	87
	C. Sumber Data	88
	D. Metode Pengumpulan Data	89
	E. Instrumen Penelitian	90
	F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	91
	G. Pengujian Keabsahan Data	93
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	A. Hasil Penelitian	95
	1. Profil SDIT Rabbani	95
	2. Manajemen Kurikulum di SDIT Rabbani	102
	3. Mekanisme Penyusunan dan Pengembangan KTSP di SDIT Rabbani	107
	4. Organisasi Kurikulum di SDIT Rabbani	110
	5. Perpaduan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di SDIT Rabbani	112
	B. Pembahasan Penelitian	115
	1. Mekanisme Penyusunan dan Pengembangan KTSP di SDIT Rabbani	115
	2. Organisasi Kurikulum di SDIT Rabbani	117
	3. Perpaduan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di SDIT Rabbani	119
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	121
	B. Implikasi Penelitian	122
	DAFTAR PUSTAKA	123
	LAMPIRAN	
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Matriks Fokus Penelitian	9
Tabel 2.1 Standar Isi Kelompok Mata Pelajaran.....	72
Tabel 2.2 Struktur Kurikulum SD (PP Nomor 19 Tahun 2005)	74
Tabel 2.3 Struktur Kurikulum SD (Permendikbud Nomor 67 Tahun 2013)	77
Tabel 2.4 Struktur Kurikulum MI	78
Tabel 2.5 Struktur Kurikulum SDIT Rabbani	81
Tabel 4.1 Keadaan Peserta Didik SDIT Rabbani	98
Tabel 4.2 Keadaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	99
Tabel 4.3 Struktur Kurikulum SDIT Rabbani	113



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual	84
Gambar 4.1 Struktur Organisasi SDIT Rabbani	101



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Desain Penelitian
Lampiran 2	Panduan Wawancara
Lampiran 3	Panduan Dokumentasi
Lampiran 4	Panduan Observasi
Lampiran 5	Catatan Wawancara
Lampiran 6	Observasi
Lampiran 7	Dokumentasi
Lampiran 8	Foto
Lampiran 9	Surat Izin dan Surat Keterangan Penelitian
Lampiran 10	Surat Keterangan Wawancara



PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	ša	S	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	ẓal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
ه	ha	H	Ha
ء	hamzah	’	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fatḥah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَّ	<i>fatḥah dan yā'</i>	ai	a dan i
اَوَّ	<i>fatḥah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَؤُلَ : *haula*

3. *Maddah*

Maddah atau *vokal* panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... آ...	<i>fatḥah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
إِ...	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
أُ...	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fatḥah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada *kata* yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh *kata* yang menggunakan *kata sandang al-* serta bacaan kedua *kata* itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-aṭfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ـَ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجِّنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

نُعِم : *nu“ima*

عُدُّو : *‘aduwwun*

Jika huruf *kasrah* (ى) ber-*tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ى), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi ī.

Contoh:

عَلِيٌّ : ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

عَرَبِيٌّ : ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

6. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif* (ا) (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*.

Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (*az-zalzalāh*)

الْفَلَسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَامُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. *Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia*

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya,

kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī Zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

9. *Lafẓ al-Jalālāh* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِيْنَاالله *dīnullāh* بِاللّٰهِ *billāh*

Adapun *tā' marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālāh*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْفِيْرَحْمَةِالله *hum fī rahmatillāh*

10. *Huruf Kapital*

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang

didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahrū Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur‘ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abu al-Walid Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr Hamid Abu)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānahū wa ta‘ālā</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam</i>
r.a.	=	raḥīyallahu ‘anhu
QS	=	Qur’an Surah
HR	=	Hadis Riwayat

PAI	= Pendidikan Agama Islam
KTSP	= Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
Diknas	= Dinas Pendidikan Nasional
Kemenag	= Kementerian Agama
SIT	= Sekolah Islam Terpadu
SDIT	= Sekolah Dasar Islam Terpadu
JSIT	= Jaringan Sekolah Islam Terpadu



ABSTRAK

Nama : Musawwir
NIM : 80300215028
Program Studi : Manajemen Pendidikan Islam
Judul : Manajemen Kurikulum Pendidikan Agama Islam di SDIT Rabbani Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone

Pokok masalah tesis ini adalah proses manajemen kurikulum Pendidikan Agama Islam di SDIT Rabbani Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses/mekanisme pengembangan kurikulum KTSP yang digunakan di SDIT Rabbani, mengetahui jenis atau pola organisasi kurikulum yang digunakan di SDIT Rabbani, dan untuk menjelaskan perpaduan kurikulum Pendidikan Agama Islam di SDIT Rabbani Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Sumber data penelitian ini adalah kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang kurikulum, guru mata pelajaran PAI, guru mata pelajaran Tauhid, guru mata pelajaran Fiqhi, dan guru mata pelajaran Hadis. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan checklist dan catatan observasi, catatan wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis/pengolahan data menggunakan beberapa tahapan yaitu: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian yang diperoleh yaitu: mekanisme pengembangan KTSP di SDIT Rabbani belum ideal atau belum melalui tujuh kegiatan pokok dalam pengembangan kurikulum seperti yang terdapat dalam juknis BAN-SM, pola organisasi kurikulum yang digunakan di SDIT Rabbani khususnya untuk mata pelajaran Pendidikan Agama Islam adalah *subject curriculum*, dan kurikulum Pendidikan Agama Islam yang digunakan di SDIT Rabbani adalah perpaduan kurikulum Diknas, kurikulum Kemenag dan kurikulum institusi atau yayasan.

Implikasi penelitian ini yaitu diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu informasi dan referensi tentang pelunya meninjau kembali penyusunan dan pengembangan kurikulum KTSP pada umumnya dan kurikulum Pendidikan Agama Islam pada khususnya bagi institusi yang ingin menyusun dan mengembangkan kurikulum.

Kata Kunci: *Manajemen Kurikulum, Pendidikan Agama Islam.*

ABSTRACT

Name : Musawwir
Students Reg. No : 80300215028
Department : Islamic Education Management
Title : Management of Islamic Religious Education Curriculum at
Integrated Islamic Elementary School Rabbani Tanete Riattang
Sub-District Bone Regency

The main issue of this thesis is the process of curriculum management of Islamic religious education subject in Integrated Islamic Elementary School Rabbani Tanete Riattang sub-district Bone regency. The purpose of this research is to know the process/mechanism of curriculum development of *KTSP* (educational unit based curriculum) used in Integrated Islamic Elementary School Rabbani, to know the type or pattern of curriculum organization used in Integrated Islamic Elementary School Rabbani, and to explain the integration of Islamic religious education curriculum at Integrated Islamic Elementary School Rabbani Tanete Riattang sub-district Bone Regency.

This study is a qualitative research. The data sources of this research include the principal, vice principal of curriculum section, Islamic religious education teachers, Tawheed teachers, Islamic Jurisprudence (*fiqh*) teachers, and hadith teachers. Data collection techniques include checklists, observation records, interview notes and documentation. Technique of data analysis/processing consisting of several stages includes data collection, data reduction, data presentation, and conclusion.

The result of this research shows that the development mechanism of *KTSP* in Integrated Islamic Elementary School Rabbani is not yet ideal or has not been through seven main activities in curriculum development such as those required by the National Accreditation Agency for Islamic School (*BAN-SM*). The pattern of curriculum organization used in Integrated Islamic Elementary School Rabbani especially for Islamic Religious Education is subject based curriculum. Furthermore, the curriculum of Islamic religious education used in Integrated Islamic Elementary School Rabbani is a mix of curriculum of Education Department, curriculum of Ministry of Religious Affairs, and the institutional or foundation curriculum.

The implication of this research is that the result of this research is expected to be one of the information and references on the importance of the rereview of the preparation and development of *KTSP* curriculum in general and the curriculum of Islamic Religious Education in particular, especially for institutions that want to set and develop the curriculum.

Keywords: Curriculum Management, Islamic Religious Education.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan suatu bangsa dapat dilihat dari seberapa maju pendidikan yang telah dicapai. Pendidikan merupakan faktor penentu dalam menciptakan kemajuan bangsa. Pendidikan juga mendukung tercapainya pembangunan nasional. Untuk dapat mewujudkan pembangunan nasional melalui pendidikan, perlu pemberdayaan manusia yang berkualitas. Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan syarat mutlak untuk mencapai tujuan pembangunan. Salah satu cara untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia tersebut adalah melalui pendidikan.¹

Untuk mencapai tujuan pendidikan, diperlukan proses pembelajaran yang tentunya menggunakan kurikulum. Kurikulum merupakan inti dari bidang pendidikan dan memiliki pengaruh terhadap seluruh kegiatan pendidikan. Mengingat pentingnya kurikulum dalam pendidikan dan kehidupan manusia, maka penyusunan kurikulum tidak dapat dilakukan secara sembarangan.²

Kurikulum mengarahkan segala bentuk aktivitas pendidikan demi tercapainya tujuan-tujuan pendidikan. Kurikulum juga merupakan suatu rencana pendidikan, memberikan pedoman dan pegangan tentang jenis, lingkup, dan urutan isi, serta

¹Fakhrurrazi, “Keterampilan-Keterampilan Guru dalam Mengajar”, *At-Ta'dib, Jurnal Ilmiah Prodi Pendidikan Agama Islam* 5, no.1 (2013): h. 88.

²Darmi, “Aliran-aliran yang Mempengaruhi Kurikulum Pendidikan”, *At-Ta'dib, Jurnal Ilmiah Prodi Pendidikan Agama Islam* 5, no.1 (2013): h. 2.

proses pendidikan.³ Dengan demikian, kurikulum memiliki kedudukan yang penting karena memberikan pedoman dalam proses pendidikan.

Kurikulum menjadi kunci sukses maupun gagalnya sebuah pendidikan yang akan digelar oleh guru dan sekolah. Kurikulum memberikan pengaruh besar terhadap dinamika pendidikan dan perkembangan kedewasaan anak didik kedepannya. Ketelitian dalam penyusunan kurikulum harus diupayakan perwujudan nyatanya supaya menghasilkan *output* pendidikan yang berkualitas.⁴

Pendidikan Agama Islam di Indonesia masih menuai berbagai kritik seperti yang diungkapkan oleh Muhaimin yaitu antara lain: praktik pendidikannya hanya memperhatikan aspek kognitif dan mengabaikan pembinaan aspek afektif dan *konatif-volitif*, yakni kemauan dan tekad mengamalkan nilai-nilai ajaran agama; kegiatan pendidikan agama yang berlangsung selama ini lebih banyak bersikap menyendiri, kurang berinteraksi dengan kegiatan-kegiatan pendidikan lainnya.⁵

Munculnya berbagai kritik tentang PAI dan sekaligus merupakan kegagalan pelaksanaan PAI tersebut bisa jadi disebabkan karena adanya kekeliruan dalam mentransfer sistem pengembangan kurikulum atau pembelajaran yang berkembang selama ini, yang sebenarnya eksperimennya bukan berasal dari pendidikan agama tetapi dari bidang studi lain, kemudian diadopsi begitu saja tanpa daya kritisisme yang memadai.⁶

³Nana Syaodih Sukmadinata, *Pengembangan Kurikulum, Teori dan Praktek* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), h. 4.

⁴Moh. Yamin, *Panduan Manajemen Mutu Kurikulum Pendidikan* (Yogyakarta: Diva Press, 2012), h. 31.

⁵Muhaimin, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam* (Bandung: PT RajaGrafindo Persada, 2007), h. 23-24.

⁶Muhaimin, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam*, h. 28.

Salah satu cara untuk mengatasi hal tersebut yaitu dengan pembenahan dan perbaikan sistem pengembangan kurikulum PAI di sekolah sebagai sebuah mata pelajaran yang berdiri sendiri atau terintegrasi dengan mata pelajaran lain. Pembenahan dan pengembangan kurikulum, khususnya pelajaran Pendidikan Agama Islam merupakan suatu keharusan dalam keseluruhan kegiatan pendidikan untuk memperbaiki karakter dan moral bangsa.

Mengetahui begitu pentingnya pembenahan dan pengembangan kurikulum, khususnya kurikulum Pendidikan Agama Islam, maka seyogyanya lembaga pendidikan, terkhusus lembaga pendidikan Islam tidak melakukan dikotomi terhadap ilmu. Dikotomi ilmu dalam pendidikan Islam terkait erat dengan pembagian kelompok ilmu Islam dalam pengertian ilmu agama yang dilawankan dengan kelompok ilmu non-Islam atau ilmu umum. Hal ini berimbas pada kemunculan dikotomi kelembagaan dalam pendidikan Islam. Akibatnya, muncul pula istilah sekolah-sekolah agama dan sekolah-sekolah umum. Sekolah agama berbasis ilmu-ilmu agama dan sekolah umum berbasis ilmu-ilmu umum.

Banyak orang yang merancukan pengertian istilah “Pendidikan Agama Islam” dan “Pendidikan Islam”. Kedua istilah ini dianggap sama, sehingga ketika seseorang berbicara tentang pendidikan Islam ternyata isinya terbatas pada Pendidikan Agama Islam, atau sebaliknya, padahal kedua istilah itu memiliki substansi yang berbeda. Pendidikan Islam merupakan sistem pendidikan yang islami sedangkan Pendidikan Agama Islam merupakan salah satu bagian dari pendidikan Islam. Dalam hal ini PAI sejajar atau sekategori dengan pendidikan Matematika, pendidikan Olahraga dan seterusnya.⁷

⁷Muhaimin, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam*, h. 6.

Keterpaduan dua konsep yakni Pendidikan Islam dan Pendidikan Agama Islam inilah yang kemudian dikembangkan di beberapa tempat di Indonesia. Ada yang memberikan label lembaga pendidikannya dengan tambahan “terpadu atau integral” ada pula yang hanya memberikan tambahan kurikulumnya dengan memadukan konsep pendidikan Islam dan Pendidikan Agama Islam. Hal ini sejalan dengan fenomena pergeseran *parental choice of education* yang terjadi ketika orang tua dari kalangan menengah Muslim Indonesia lebih suka menyekolahkan anak-anaknya di sekolah dengan *basic* keislaman yang kuat, semisal sekolah-sekolah Muhammadiyah dan Sekolah Islam Terpadu, dibandingkan dengan sekolah umum. Fakta ini berbanding terbalik dengan beberapa dekade sebelumnya ketika orang tua dari kalangan menengah lebih bangga menyekolahkan anak-anaknya ke sekolah yang tidak memiliki *basic* keagamaan.⁸

Sekolah Islam Terpadu merupakan model lembaga pendidikan yang berusaha menggabungkan antara ilmu umum dan agama dalam satu paket kurikulum yang integratif. Berbeda dengan tiga lembaga pendidikan sebelumnya (pesantren, sekolah umum, madrasah), Sekolah Islam Terpadu memiliki segmentasi tersendiri.⁹ Perpaduan kurikulum yang digunakan di Sekolah Islam Terpadu tersebut memberikan pengaruh pada kegiatan manajemen kurikulum.

Pengembangan kurikulum merupakan proses dinamik, sehingga dapat merespon tuntutan perubahan struktural pemerintahan, perkembangan ilmu

⁸ Suyatno, *Sekolah Dasar Islam Terpadu dalam Konsepsi Kelas Menengah Muslim Indonesia* (Yogyakarta: Universitas Ahmad Dahlan, 2015), h. 122.

⁹ Suyatno, *Sekolah Dasar Islam Terpadu dalam Konsepsi Kelas Menengah Muslim Indonesia*, h. 122.

pengetahuan dan teknologi maupun globalisasi.¹⁰ Dalam usaha pengembangan kurikulum, diperlukan suatu keahlian manajerial dalam arti kemampuan merencanakan, mengorganisasi, mengelola dan mengontrol kurikulum. Dua kemampuan pertama disebut kemampuan dalam hal “*Curriculum Planning*” dan dua kemampuan lainnya disebut sebagai kemampuan dalam hal “*Curriculum Implementation*”. Semua kemampuan ini diartikan sebagai kemampuan manajemen pengembangan kurikulum.¹¹ Di sini terlihat akan pentingnya pengetahuan tentang manajemen dan pengetahuan tentang kurikulum dalam menyusun, mengelola dan mengembangkan kurikulum di sebuah institusi, terlebih lagi bagi institusi yang masih menggunakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. Pengembangan KTSP jenjang pendidikan dasar dan menengah mengacu pada standar nasional pendidikan, kerangka dasar dan struktur kurikulum, dan pedoman implementasi kurikulum. KTSP dikembangkan oleh satuan pendidikan dengan melibatkan komite sekolah/madrasah, dan kemudian disahkan oleh kepala dinas pendidikan atau kantor kementerian agama provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.¹²

Kegiatan penyusunan dan pengembangan KTSP berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81a Tahun 2013 dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor

¹⁰Oemar Hamalik, *Manajemen Pengembangan Kurikulum* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), h. 3.

¹¹Oemar Hamalik, *Manajemen Pengembangan Kurikulum*, h. 9.

¹²Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014*, h. 3.

61 Tahun 2014 tidak jauh berbeda. Pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81a Tahun 2013 penyusunan KTSP secara garis besar meliputi: perumusan visi dan misi; penyiapan dan penyusunan draf; revidu, revisi, dan finalisasi; pemantapan dan penilaian; serta pengesahan. Sedangkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 pengembangan KTSP secara garis besar meliputi: (1) penyusunan draf berdasarkan analisis konteks; (2) revidu, revisi, dan finalisasi; serta (3) pengesahan oleh pejabat yang berwenang. Pengembangan kurikulum KTSP lebih rinci disusun berdasarkan standar isi yaitu melalui tujuh kegiatan pokok: 1) melibatkan tim pengembang (guru, kepala sekolah/madrasah, komite sekolah/madrasah), sesuai SK kepala sekolah/madrasah; 2) dilakukan melalui pertemuan, seperti: workshop, bimbingan teknis, dan lain-lain; 3) kegiatan revidu dan revisi; 4) menghadirkan narasumber (ahli pendidikan, praktisi pendidikan, Dewan Pendidikan, Dinas Pendidikan/Kemenag Kabupaten/Kota, dan Pemda); 5) tahap finalisasi; 6) pemantapan dan penilaian dokumen KTSP oleh Tim Pengembang berdasarkan petunjuk teknis Penyusunan KTSP; serta 7) mendokumentasikan hasil pengembangan kurikulum yang ditandatangani Dinas Pendidikan/Kemenag Kabupaten/Kota.¹³

Untuk menghasilkan kurikulum yang baik, tentunya harus memperhatikan tahapan atau langkah-langkah seperti yang telah disebutkan di atas. Namun, tidak semua lembaga pendidikan dapat mengikuti atau memenuhi semua langkah-langkah tersebut di atas dalam menyusun dan mengembangkan kurikulum. Hal ini mungkin

¹³BAN-SM, *Petunjuk Teknis Pengisian Instrumen Akreditasi SD/MI* (Jakarta: BAN-SM, 2014), h. 2.

akan mengakibatkan kurang maksimalnya hasil dari proses pendidikan yang dilakukan.

Sekolah Islam Terpadu yang menggunakan perpaduan kurikulum antara kurikulum umum atau kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah dengan kurikulum keislaman yang menjadi ciri khas institusi menjadi sebuah tantangan dan bisa menimbulkan masalah tersendiri apabila tidak dikelola dengan baik. Hal ini dikarenakan adanya beberapa tujuan pendidikan yang ingin dicapai, yaitu tujuan pendidikan nasional dan tujuan pendidikan khusus dari institusi tersebut. Perpaduan kurikulum ini memerlukan konstruksi dan komposisi yang baik agar tidak terjadi tumpang tindih antara tujuan pendidikan nasional secara umum dan tujuan pendidikan institusi secara khusus. Setiap satuan pendidikan atau sekolah tentunya memiliki tujuan pendidikan khusus yang ingin dicapai, namun dalam mengembangkan kurikulum harus tetap memperhatikan ketentuan dari pemerintah agar tujuan pendidikan nasional juga dapat tercapai.

Oleh karena itu, dibutuhkan adanya pemahaman yang baik tentang manajemen kurikulum untuk melaksanakan atau mengembangkan kurikulum, khususnya kurikulum PAI agar tujuan pendidikan yang diinginkan dapat tercapai. Namun pada kenyataannya, tidak semua lembaga pendidikan, khususnya Sekolah-sekolah Islam Terpadu dapat mewujudkan pelaksanaan dan pengembangan kurikulum yang ideal. Hal ini mungkin dikarenakan kurangnya tenaga pendidik dan kependidikan dalam suatu institusi yang menguasai dan kompeten dalam bidang manajemen kurikulum dan kurangnya koordinasi dan kerjasama dengan pihak pengembang kurikulum di Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan manajemen kurikulum di sekolah Islam terpadu yang berjudul "Manajemen Kurikulum Pendidikan Agama Islam di SDIT Rabbani Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone".

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

1. Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada proses manajemen kurikulum Pendidikan Agama Islam di SDIT Rabbani. Proses manajemen kurikulum tersebut terdiri dari mekanisme pengembangan kurikulum KTSP di SDIT Rabbani, pola organisasi kurikulum yang digunakan di SDIT Rabbani, serta perpaduan kurikulum Pendidikan Agama Islam yang digunakan di SDIT Rabbani Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone.

2. Deskripsi Fokus

Proses atau mekanisme pengembangan KTSP terdiri dari beberapa langkah yaitu: penyusunan draf berdasarkan analisis konteks; revidi, revisi, dan finalisasi; pengesahan oleh pejabat yang berwenang. Pola organisasi kurikulum terdiri dari: kurikulum berdasarkan mata pelajaran (*subject curriculum*) dan kurikulum terpadu (*integrated curriculum*). Perpaduan kurikulum Pendidikan Agama Islam: kurikulum Diknas; kurikulum Kemenag; kurikulum khusus (institusi)

Dengan demikian, judul penelitian Manajemen Kurikulum Pendidikan Agama Islam di SDIT Rabbani Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone dapat

dipahami sebagai proses pelaksanaan manajemen kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) yang dilakukan oleh pihak sekolah (SDIT Rabbani).

Tabel 1.1
Matriks Fokus Penelitian

No.	Fokus Penelitian	Deskripsi Fokus
2.	Mekanisme Pengembangan kurikulum KTSP	a. Penyusunan draf berdasarkan analisis konteks b. Reviu, revisi, dan finalisasi c. Pengesahan oleh pejabat yang berwenang
2.	Pola organisasi kurikulum	a. Kurikulum berdasarkan mata pelajaran (<i>subject curriculum</i>) b. Kurikulum terpadu (<i>integrated curriculum</i>)
3.	Perpaduan kurikulum Pendidikan Agama Islam	a. Kurikulum SD (Diknas) b. Kurikulum MI (Kemenag) c. Kurikulum khusus (institusi)

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan pokok pada penelitian ini yaitu: Bagaimana manajemen kurikulum Pendidikan Agama Islam di SDIT Rabbani Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone?. Berdasarkan permasalahan pokok tersebut, dapat diidentifikasi sub pokok masalah yaitu:

1. Bagaimana mekanisme pengembangan kurikulum KTSP di SDIT Rabbani Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone?

2. Bagaimana pola organisasi kurikulum di SDIT Rabbani Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone?
3. Bagaimana perpaduan kurikulum Pendidikan Agama Islam di SDIT Rabbani Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone?

D. Kajian Pustaka/ Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang kurikulum bukanlah hal yang baru, banyak tulisan yang membahas tentang kurikulum Pendidikan Agama Islam, baik di sekolah umum maupun di madrasah. Penelitian ini akan difokuskan pada kurikulum Pendidikan Agama Islam di SDIT Rabbani Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone. Beberapa penelitian yang terkait dan terdapat relevansi dengan penelitian ini diantaranya:

Tesis Muh. Suranto yang berjudul “*Manajemen Kurikulum Pendidikan Agama Islam di SD Muhammadiyah Program Khusus Bayat Klaten*”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa: Implementasi manajemen kurikulum PAI di SD Muhammadiyah Program Khusus Bayat meliputi kegiatan perencanaan kurikulum PAI dengan penyusunan rencana kerja sekolah, kalender akademik, silabus PAI, *lesson plan* PAI, dan RPP, pelaksanaan manajemen kurikulum PAI terbagi menjadi dua tingkat yaitu tingkat sekolah dan tingkat kelas, evaluasi kurikulum PAI yakni dengan mengadakan evaluasi program PAI, evaluasi proses pembelajaran PAI, dan evaluasi hasil belajar siswa.

Hasil penelitian tersebut juga menunjukkan bahawa faktor yang mendasari Manajemen Kurikulum PAI di SD Muhammadiyah PK Bayat yang paling utama adalah latar belakang berdirinya sekolah, dan selanjutnya untuk mencapai tujuan

membentuk peserta didik yang berakhlakul kharimah muncul faktor-faktor lainnya yaitu kebutuhan kurikulum dan pelaksanaannya, kebutuhan guru PAI yang profesional, dan kebutuhan sarana dan prasarana.¹⁴

Tesis Lilies Widyowati yang berjudul “*Pengembangan Kurikulum Terpadu Sistem Full Day School Studi Multi Kasus di SD Muhammadiyah 1 Alternatif Kota Magelang, SDIT Ihsanul Fikri Kota Magelang dan SD Terpadu Ma’arif Gunungpring Magelang*” hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep pengembangan kurikulum terpadu merupakan pengintegrasian kurikulum Diknas yang diwarnai dengan nilai-nilai Islami dengan penambahan bidang studi keislaman, dan untuk pelaksanaannya dengan menerapkan *full day school*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa desain kurikulum terpadu berorientasi pada kebutuhan peserta didik, lingkungan, kebutuhan masyarakat dan perkembangan IPTEK yang diorganisasikan dalam sebuah kurikulum. Implementasi kurikulum di sekolah dengan melibatkan peran kepala sekolah sebagai pelaksana kurikulum tingkat lembaga sekolah, guru sebagai pelaksana kurikulum di kelas dan wakil kepala sekolah bidang kurikulum sebagai perencana kurikulum di sekolah. Implementasi kurikulum merupakan integrasi secara fungsional antara aspek kognitif, afektif dan psikomotor.¹⁵

Tesis Amir Mahmud yang berjudul “*Dinamika Pengembangan Kurikulum Pendidikan di Pesantren Rifaiyah (1974-2014)*” menyatakan bahwa pergantian pemimpin membawa dampak yang signifikan terhadap kebijakan dan orientasi

¹⁴Muh. Suranto, “Manajemen Kurikulum Pendidikan Agama Islam di SD Muhammadiyah Program Khusus Bayat Klaten” *Tesis*, (Surakarta: PPS IAIN Surakarta, 2016), h. i.

¹⁵Lilies Widyowati, “Pengembangan Kurikulum Terpadu Sistem Full Day School Studi Multi Kasus di SD Muhammadiyah 1 Alternatif Kota Magelang, SDIT Ihsanul Fikri Kota Magelang dan SD Terpadu Ma’arif Gunungpring Magelang” *Tesis*, (Salatiga: PPS STAIN Salatiga, 2014), h. iv.

perubahan kurikulum pendidikan pesantren, juga membawa sebuah dinamika perubahan dan perkembangan. Perubahan kurikulum pesantren tidak banyak terlihat ketika perubahan kurikulum pendidikan nasional mengalami banyak perubahan.¹⁶

Tesis Mochamad Arifin yang berjudul “*Manajemen Pembelajaran Pendidikan Agama Islam*” menyatakan bahwa dalam pelaksanaan pembelajaran, guru PAI akan mendapatkan penghargaan dari yayasan apabila mereka mampu memenuhi raport guru yang sudah ditetapkan oleh yayasan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa guru sebagai kunci keberhasilan dalam meningkatkan mutu pendidikan, hendaknya antara kepala, wakil kepala sekolah bidang kurikulum dan guru PAI bersinergi di dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.¹⁷

Tesis Rasidi, yang berjudul “*Manajemen Kurikulum di MTsN Model Sumber Bungur Pamekasan (Telaah Komparatif antara Kurikulum Program Regular dan Akselerasi)*” menyatakan bahwa manajemen kurikulum di MTsN Sumber Bungur Pamekasan 3 cukup baik mengingat adanya pembagian tugas yang telah diamanatkan terhadap masing-masing penanggungjawab yang profesional.

Secara substansial, antara kelas regular dan akselerasi memiliki acuan yang sama tentang kurikulum yang digunakan, yakni kurikulum standar nasional, hanya saja pada kurikulum akselerasi menggunakan kurikulum differensiasi. Orientasi kurikulum ini lebih kepada pelayanan potensi siswa yang memiliki kemampuan di atas rata-rata siswa reguler, atau istilah yang lebih populer dengan siswa berbakat/kecerdasan istimewa. Kurikulum reguler dan akselerasi di MTsN Sumber

¹⁶Amir Mahmud, “Dinamika Pengembangan kurikulum Pendidikan di Pesantren Rifaiyah (1974-2014)” *Tesis*, (Yogyakarta: PPS UIN Sunan Kalijaga, 2014), h. vii.

¹⁷Mochamad Arifin, “Manajemen Pembelajaran Pendidikan Agama Islam” *Tesis*, (Salatiga: PPS STAIN Salatiga 2014), h. viii.

Bungur Pamekasan 3 dikembangkan berdasarkan kebutuhan siswa hanya saja di sisi lain tetap berpedoman terhadap undang-undang pendidikan nasional. Pengembangan kurikulum tersebut dapat terlihat antara lain dari penambahan jam mata pelajaran pada kelas reguler, dan percepatan penguasaan materi serta jenjang studi yang lebih cepat bagi siswa pada kelas akselerasi.¹⁸

Beberapa hasil penelitian tersebut, memberikan gambaran dan kontribusi positif bagi penelitian ini guna mengembangkan dan memperkaya serta melengkapi sumber-sumber data yang diperlukan dalam menyusun penelitian tesis ini. Fokus penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Penelitian ini berfokus pada proses dan pelaksanaan manajemen kurikulum Pendidikan Agama Islam di SDIT Rabbani Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Menjelaskan mekanisme pengembangan kurikulum KTSP di SDIT Rabbani Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone.
- b. Menjelaskan pola organisasi kurikulum di SDIT Rabbani Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone.
- c. Menjelaskan perpaduan kurikulum Pendidikan Agama Islam di SDIT Rabbani Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone.

¹⁸Rasidi, "Manajemen Kurikulum di MTsN Model Sumber Bungur Pamekasan (Telaah Komparatif antara Kurikulum Program Reguler dan Akselerasi)" *Tesis*, (Surabaya: PPS IAIN Sunan Ampel, 2013), h. ix.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan atau manfaat yang dihasilkan dari penelitian ini setidaknya-tidaknya ada dua, yaitu manfaat dari segi ilmiah dalam kerangka pengembangan ilmu (manfaat teoritis) dan manfaat praktis.

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian ilmu pendidikan yang dapat dipergunakan sebagai bahan referensi bagi para peneliti dan pengamat masalah pendidikan yang terkait dengan manajemen kurikulum Pendidikan Agama Islam.

b. Kegunaan Praktis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan umpan balik bagi pengembangan kurikulum, khususnya kurikulum Pendidikan Agama Islam di SDIT Rabbani Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone.
2. Menjadi bahan kajian dan pembandingan penelitian serupa di tempat lain.

BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. *Manajemen Kurikulum*

1. **Pengertian Manajemen**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata manajemen memiliki dua arti yaitu: Pertama, kata manajemen berarti penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran. Kedua, kata manajemen berarti pimpinan yang bertanggung jawab atas jalannya perusahaan dan organisasi.¹ Arti kata manajemen yang pertama lebih menitikberatkan pada aspek proses, sedangkan arti kata manajemen yang kedua lebih mengarah kepada orang atau manusia yang melaksanakan proses/kegiatan manajemen. Pendapat yang pertama lebih tepat digunakan dalam penelitian ini sebagaimana pendapat-pendapat para ahli tentang pengertian manajemen. Berikut ini dikemukakan beberapa pendapat para ahli tentang pengertian manajemen.

Kata manajemen berarti pemimpin, direksi dan pengurus yang diambil dari kata kerja “*manage*” yang berarti mengemudikan, mengurus dan memerintah. Istilah manajemen berasal dari bahasa Italia “*managiere*” yang berarti melatih kuda.² Sofyan Syafri Harahap mengatakan bahwa manajemen adalah proses tertentu yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan tertentu yang sudah ditetapkan dengan menggunakan manusia dan sumber-sumber lainnya.³

¹Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Versi Online, Online <http://kbbi.web.id/manajemen> (Diakses tanggal 13 April 2017).

²Rusman, *Manajemen Pendidikan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 9.

³Sofyan Syafri Harahap, *Akuntansi Pengawasan dan Manajemen dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti, 1992), h. 121.

Sondang P. Siagian berpendapat bahwa manajemen diartikan sebagai kemampuan atau keterampilan untuk memperoleh sesuatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain.⁴ Manajemen adalah suatu proses sosial yang direncanakan untuk menjamin kerjasama, partisipasi, intervensi dan keterlibatan orang lain dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan secara efektif. Manajemen pada dasarnya adalah upaya untuk mengatur segala sumber daya untuk mencapai suatu tujuan. Jadi, dalam konteks pendidikan, manajemen adalah proses pengintegrasian segala sumber daya yang tidak berhubungan menjadi sistem totalitas untuk mencapai tujuannya.⁵ George. R. Terry mengemukakan pengertian manajemen yang diterjemahkan oleh Saiful Nur Arif dan Iskandar Zulkarnain, manajemen merupakan suatu proses khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumberdaya manusia dan sumberdaya lainnya.⁶

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah suatu proses atau kegiatan yang melibatkan dan memanfaatkan semua sumber daya yang ada untuk menentukan dan mencapai tujuan-tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Dalam hal ini, seorang manajer harus memiliki keahlian dan kompetensi di bidang tersebut sebagaimana hadis Nabi Muhammad saw.:

⁴Sondang P. Siagian, *Filsafat Administrasi* (Jakarta: Gunung Agung, 1984), h. 5.

⁵Veithzal Rivai, Sylviana Murni, *Education Management: Analisis Teori dan Praktik* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 12.

⁶Saiful Nur Arif dan Iskandar Zulkarnain, "Dasar-dasar Manajemen dalam Teknologi Informasi", *Jurnal Saintikom* 5, no. 2 (2008): h. 236.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا هِلَالُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ضُيِّعَتِ الْأَمَانَةُ فَاَنْتَظِرِ السَّاعَةَ قَالَ كَيْفَ إِضَاعَتُهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِذَا أُسْنِدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَاَنْتَظِرِ السَّاعَةَ

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sinan telah menceritakan kepada kami Fulaih bin Sulaiman telah menceritakan kepada kami Hilal bin Ali dari 'Atha' bin yasar dari Abu Hurairah radhilayyahu'anhu mengatakan; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jika amanat telah disia-siakan, tunggu saja kehancuran terjadi." Ada seorang sahabat bertanya; 'bagaimana maksud amanat disia-siakan'? Nabi menjawab; "Jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancuran itu."⁷

2. Pengertian Kurikulum

Secara etimologis, istilah kurikulum (*curriculum*) berasal dari bahasa Yunani, yaitu *curir* yang artinya “pelari” dan *curere* yang berarti “tempat berpacu”. Istilah kurikulum berasal dari dunia olahraga, terutama dalam bidang atletik pada zaman Romawi kuno di Yunani. Dalam bahasa Prancis, istilah kurikulum berasal dari kata *courier* yang berarti berlari (*to run*). Kurikulum berarti suatu jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari dari garis *start* sampai dengan garis *finish* untuk memperoleh medali atau penghargaan. Jarak yang harus ditempuh tersebut kemudian diubah menjadi program sekolah dan semua orang yang terlibat di dalamnya.⁸

Secara teoritis, kurikulum dibagi atas tiga bagian yaitu: kurikulum sebagai substansi, sistem dan sebagai bidang studi. Kurikulum sebagai substansi merupakan rencana pembelajaran yang akan dilaksanakan di kelas. Kurikulum sebagai sistem merupakan bagian dari sistem pendidikan dan sistem persekolahan. Kurikulum

⁷Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, dalam *Ensiklopedi Hadist - Kitab 9 Imam*. Lidwa Pusaka, hadits no. 6015.

⁸Zainal Arifin, *Konsep dan Model Pengembangan Kurikulum* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), h. 2-3.

sebagai bidang studi merupakan bidang kajian ahli kurikulum, ahli pengajaran dan ahli pendidikan.⁹

Kurikulum sendiri dapat dipahami dalam arti sangat sempit, sempit dan luas. Kurikulum dalam arti sangat sempit adalah jadwal pelajaran. Kurikulum dalam arti sempit adalah semua pelajaran baik teori maupun praktik yang diberikan kepada peserta didik selama mengikuti suatu proses pendidikan tertentu. Kurikulum dalam arti sempit ini terbatas pada pemberian bekal pengetahuan dan keterampilan pada peserta didik. Kurikulum dalam arti luas adalah semua pengalaman yang diberikan kepada peserta didik selama mengikuti pendidikan. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.¹⁰ Kurikulum kemudian diartikan sebagai sejumlah mata pelajaran atau ilmu pengetahuan yang ditempuh atau dikuasai untuk mencapai suatu tingkat tertentu atau ijazah. Di samping itu, kurikulum juga diartikan sebagai rencana yang sengaja dirancang untuk mencapai sejumlah tujuan pendidikan. Muhaimin mengatakan bahwa, kurikulum dalam arti sempit lebih relevan dipahami dan dilakukan oleh guru, kurikulum dalam arti luas sangat relevan untuk dipahami dan dilakukan oleh kepala sekolah/madrasah sebagai *top leader*/manager beserta para staf, wakil kepala sekolahnya di lembaga pendidikan tersebut, karena menggambarkan cakupan pemikiran, perencanaan dan tanggungjawabnya dalam pelaksanaan guna mencapai tujuan yang ditetapkan serta menjadikan sekolah/madrasah yang kualifaid.¹¹

⁹Siti Azisah, *Guru dan Pengembangan Kurikulum Berkarakter Implementasi pada Tingkat Satuan Pendidikan* (Makassar: Alauddin University Press, 2014), h. 26-27.

¹⁰Suharsimi Arikunto, *Manajemen Pendidikan* (Yogyakarta: Aditya Media, 2008), h. 131-132.

¹¹Muhaimin, *Wacana Pengembangan Pendidikan Islam* (Cet. II; Surabaya: Pustaka Pelajar, 2004), h. 183.

Oemar Hamalik mengatakan bahwa kurikulum terdiri dari tiga poin penting, yaitu mencakup kurikulum yang memuat isi dan materi pelajaran, kurikulum sebagai rencana pembelajaran, dan kurikulum sebagai pengalaman belajar. Poin pertama diartikan sebagai kumpulan mata pelajaran yang harus dipelajari oleh anak didik guna memperoleh pengetahuan. Poin kedua menjelaskan bahwa kurikulum merupakan program pendidikan yang disediakan untuk mengajarkan anak didik. Poin kedua menjelaskan bahwa kurikulum merupakan serangkaian pengalaman belajar yang meliputi kegiatan dalam kelas dan luar kelas.¹² Dalam Undang-undang Tentang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 disebutkan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.¹³

Dari berbagai pengertian kurikulum di atas, pengertian kurikulum yang tercantum dalam Undang-undang Tentang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 memiliki kekuatan hukum bagi penyelenggara pendidikan untuk menata kurikulum dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia.

3. Pengertian Manajemen Kurikulum

Istilah manajemen kurikulum berasal dari dua kata, yaitu “manajemen” dan “kurikulum”. Kurikulum adalah semua kegiatan, pengalaman, dan segala sesuatu yang dapat mempengaruhi perkembangan kepribadian anak, baik yang terjadi di sekolah, halaman sekolah atau di luar sekolah atas tanggung jawab sekolah agar peserta didik dapat menguasai kompetensi yang telah ditentukan.

¹²Oemar Hamalik, *Kurikulum dan Pembelajaran* (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), h. 16-18.

¹³Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*, bab I, Pasal 1 Ayat 19.

Semua kegiatan, pengalaman, dan segala sesuatu tersebut tentunya harus dilakukan secara sistematis dan sistemik melalui tahap-tahap kegiatan tertentu, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, monitoring, dan evaluasi. Hal ini tentu sangat erat kaitannya dengan fungsi manajemen itu sendiri.¹⁴ Sebagaimana pengertian manajemen dari George R. Terry yang telah diungkapkan di atas, bahwa manajemen merupakan suatu proses khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumberdaya manusia dan sumberdaya lainnya.

Perencanaan (*planning*) adalah proses penyusunan, penetapan, dan pemanfaatan sumber-sumber daya secara terpadu dan rasional agar kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dapat berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Pengorganisasian (*organizing*) adalah membangun struktur dengan bagian-bagiannya secara terintegrasi, baik secara vertikal maupun horizontal, dan membagi habis tugas, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing bagian sehingga struktur tersebut dapat berfungsi dengan baik dan pada akhirnya tujuan dapat tercapai. Penggerakan (*actuating*) adalah memotivasi dan merangsang anggota kelompok untuk melaksanakan tugas secara profesional dan bertanggung jawab sesuai dengan tujuan organisasi. Pengawasan (*controlling*) adalah tindakan untuk menuntun dan mendeteksi pelaksanaan suatu kegiatan agar tidak menyimpang dari perencanaan.¹⁵

Berdasarkan pengertian dari setiap fungsi manajemen di atas, jelas bahwa kegiatan pengembangan kurikulum harus dilakukan berdasarkan ilmu manajemen

¹⁴Zainal Arifin, *Konsep dan Model Pengembangan Kurikulum*, h. 24-25.

¹⁵Zainal Arifin, *Konsep dan Model Pengembangan Kurikulum*, h. 25.

karena pengembangan kurikulum menuntut adanya perencanaan sampai dengan pengawasan, bahkan termasuk monitoring dan evaluasi.

Manajemen kurikulum adalah sebagai suatu sistem pengelolaan kurikulum yang kooperatif, komprehensif, sistemik, dan sistematis dalam rangka mewujudkan ketercapaian tujuan kurikulum.¹⁶ Senada dengan hal tersebut, Muhammad Kristiawan mengemukakan bahwa manajemen kurikulum adalah sistem pengelolaan atau penataan terhadap kurikulum secara kooperatif, komprehensif, sistemik dan sistematis yang dijadikan acuan oleh lembaga pendidikan dalam rangka mewujudkan ketercapaian tujuan kurikulum atau tujuan pendidikan.¹⁷ Manajemen kurikulum merupakan kegiatan yang berhubungan dengan upaya merencanakan, melaksanakan, mengendalikan proses pembelajaran agar dapat berjalan secara efektif.¹⁸ Depdiknas dalam Syafruddin mengartikan manajemen kurikulum sebagai suatu proses mengarahkan agar proses pembelajaran berjalan dengan baik sebagai tolok ukur pencapaian tujuan pengajaran oleh pengajar.¹⁹ Lebih lanjut dijelaskan bahwa aktifitas manajemen kurikulum ini merupakan kolaborasi antara kepala sekolah dengan wakil kepala sekolah beserta para guru dalam melakukan kegiatan manajerial agar perencanaan berlangsung dengan baik.

Dari definisi manajemen kurikulum di atas, dapat difahami bahwa manajemen kurikulum merupakan sebuah proses kerjasama dalam mengelola

¹⁶Rusman, *Manajemen Kurikulum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), h. 3.

¹⁷Muhammad Kristiawan, dkk., *Manajemen Pendidikan* (Yogyakarta: Deepublish. 2017), h. 77.

¹⁸Amri Yusuf Lubis, "Pelaksanaan Manajemen Kurikulum Pada SMA Negeri 1 Buengcala Kabupaten Aceh Besar", *Jurnal Administrasi Pendidikan Pascasarjana Universitas Syiah Kuala* 3 (2015): h. 15.

¹⁹Syafruddin Nurdin dan Basyiruddin Usman, *Guru Profesional dan Implementasi Kurikulum* (Jakarta: Ciputat Press, 2002), h. 56-57.

kurikulum untuk mencapai tujuan kurikulum atau tujuan pendidikan secara efektif dan efisien.

4. Ruang Lingkup Manajemen Kurikulum

Ruang lingkup manajemen kurikulum menurut Kholid Musyaddad adalah sebagai berikut:

- a. Manajemen perencanaan
- b. Manajemen pelaksanaan kurikulum
- c. Supervisi pelaksanaan kurikulum
- d. Pemantauan dan penilaian kurikulum
- e. Perbaikan kurikulum²⁰

Sedangkan ruang lingkup manajemen kurikulum menurut Lestari dalam Muhammad Kristiawan adalah:

- a. perencanaan
- b. pengembangan
- c. implementasi
- d. evaluasi atau penilaian.²¹

Pada dasarnya kedua pendapat di atas hampir sama. Pendapat yang pertama lebih bersifat umum. Sedangkan pendapat yang kedua bersifat khusus dan lebih menekankan kepada aspek operasional yang berkaitan dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP). Pendapat yang kedua dianggap lebih sesuai dengan konteks penelitian dalam tesis ini. Meskipun demikian, berikut ini akan diuraikan secara singkat ruang lingkup manajemen kurikulum dari kedua pendapat di atas agar pemahaman kita tentang manajemen kurikulum bisa lebih luas.

²⁰Kholid Musyaddad, "Mengelola Kurikulum", *Jurnal Al-`Ulum* 3 (2014): h. 12.

²¹Muhammad Kristiawan, dkk., *Manajemen Pendidikan*, h. 77.

Sebuah kurikulum terdiri dari beberapa unsur komponen yang terangkai pada suatu sistem. Sistem kurikulum bergerak dalam siklus yang secara bertahap, bergilir, dan berkesinambungan. Oleh sebab itu, manajemen kurikulum juga harus memakai pendekatan sistem. Sistem kurikulum adalah suatu kesatuan yang didalamnya memuat beberapa unsur yang saling berhubungan dan bergantung dalam mengemban tugas untuk mencapai suatu tujuan.²²

a. Manajemen perencanaan

Perencanaan adalah proses penentuan tujuan atau sasaran yang hendak dicapai dan menetapkan jalan dan sumber yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu seefisien dan seefektif mungkin. Perencanaan merupakan tindakan menetapkan terlebih dahulu apa yang dikerjakan, bagaimana mengerjakannya, apa yang harus dikerjakan dan siapa yang mengerjakannya.²³

St. Vembriarto dalam Kisbiyanto mengatakan bahwa perencanaan adalah penggunaan analisis yang bersifat rasional dan sistematis terhadap proses pengembangan pendidikan yang bertujuan untuk menjadikan pendidikan lebih efektif dan efisien dalam menanggapi kebutuhan dan tujuan peserta didik dan masyarakat.

Ada empat persoalan penting yang dibahas dalam perencanaan, yaitu (1) tujuan apa yang dicapai dengan perencanaan itu, (2) status sistem pendidikan yang ada dan bagaimana keadaannya sekarang, (3) kemungkinan-kemungkinan pilihan apa yang ditempuh untuk mencapai tujuan, dan (4) strategi yang terbaik untuk mencapai tujuan.

²²Kholid Musyaddad, "Mengelola Kurikulum", *Jurnal Al-`Ulum* 3 (2014): h. 12-13.

²³M. Arif Khoirudin, "Manajemen Kurikulum dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan", *Jurnal Manajemen Kurikulum* 24 (2013): h. 63.

Perencanaan dalam pendidikan adalah sebagai fungsi manajemen pendidikan. Fungsi perencanaan tersebut adalah untuk menentukan keadaan yang sebaik-baiknya dari hubungan-hubungan sumber daya internal dan eksternal dalam suatu sistem pendidikan dengan keadaan yang dinamis serta cara yang efisien dan efektif untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Salah satu sumber daya yang harus direncanakan adalah “materi pendidikan” atau kurikulum. Sumber daya “kurikulum” ini membutuhkan perencanaan yang tepat dan strategis. Hasil perencanaan kurikulum yang baik menentukan keberhasilan dalam pencapaian tujuan pendidikan. Dalam konteks perkembangan, kurikulum harus selalu dikembangkan. Fungsi perencanaan kurikulum dan pengembangannya itu dimaksudkan untuk pengelolaan pendidikan agar tidak mengalami ketertinggalan.²⁴

Margaret Preedy dalam Kholid Musyaddad mengatakan bahwa perencanaan kurikulum berada pada bingkai pencapaian nilai-nilai dan tujuan pendidikan, atau secara spesifik mengacu pada tujuan yang ingin dicapai oleh tingkat/gradasi satuan pendidikan dan prioritas tujuan yang disusun dalam konteks ekspektasi lokal dan nasional.

Tugas utama kepemimpinan di bidang kurikulum memastikan bahwa kurikulum dikelola mengarah pada pencapaian tujuan pendidikan, memastikan apa yang akan dilakukan guru di kelas dan apa yang akan dialami peserta didik dengan kurikulum yang telah disusun.

Perencanaan kurikulum adalah perencanaan kesempatan-kesempatan belajar yang dimaksudkan untuk membina peserta didik ke arah perubahan tingkah laku yang diinginkan dan menilai sejauhmana perubahan-perubahan yang telah terjadi

²⁴Kisbiyanto, “Manajemen Kurikulum Manajemen Kurikulum Bidang Teaching and Learning”, *Jurnal ThufuLA* 3 (2015): h. 109.

pada peserta didik. Lima hal yang mempengaruhi perencanaan dan pembuatan keputusan:

- 1) Filosofis
- 2) Konten/materi
- 3) Manajemen pembelajaran
- 4) Pelatihan guru
- 5) Sistem pembelajaran

Perencanaan adalah suatu proses sosial yang kompleks dan menuntut berbagai jenis tingkat pembuatan keputusan. Sebagaimana pada umumnya rumusan model perencanaan harus berdasarkan asumsi-asumsi rasionalitas dengan pemrosesan secara cermat. Proses ini dilaksanakan dengan pertimbangan sistematis tentang relevansi pengetahuan filosofis (isu-isu pengetahuan yang bermakna), sosiologis (argumen-argumen kecenderungan sosial), dan psikologi (dalam menentukan urutan materi pelajaran).²⁵

Perencanaan kurikulum berkaitan dengan bagaimana materi pelajaran disusun sehingga peserta didik atau peserta didik memperoleh pengalaman belajar untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Semua materi dan kegiatan belajar perlu direncanakan dan disusun sebaik-baiknya agar terbentuk program pembelajaran yang sistematis. Oleh karena itu guru sebagai manajer pembelajaran harus melakukan berbagai pilihan menuju tercapainya tujuan. Guru harus mampu mengambil keputusan yang tepat untuk mengelola berbagai sumber, baik sumber daya, sumber dana, maupun sumber belajar untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yakni

²⁵Kholid Musyaddad, "Mengelola Kurikulum", *Jurnal Al-Ulum* 3 (2014): h. 14.

materi yang disampaikan bisa diterima dengan baik oleh peserta didik sehingga peserta didik memahami apa yang telah diajarkan.²⁶

Perencanaan merupakan upaya untuk merumuskan apa yang ingin dicapai serta bagaimana sesuatu yang ingin dicapai tersebut dapat terlaksana melalui rumusan rencana kegiatan. Dengan terlaksananya kegiatan sesuai dengan rencana yang telah dirumuskan, maka perencanaan itu dapat dikategorikan sebagai perencanaan yang baik atau berhasil dan jika apa yang telah dirumuskan tersebut tidak dapat dilaksanakan, maka perencanaan tersebut dapat dikatakan tidak baik atau belum berhasil.

Proses perencanaan kurikulum di sekolah harus dilaksanakan secara kolaboratif, artinya dengan mengikutsertakan personel sekolah dalam semua tahap perencanaan itu. Pengikutsertaan ini akan menimbulkan perasaan ikut memiliki yang dapat memberikan dorongan kepada guru dan personel sekolah yang lain untuk berusaha agar rencana tersebut berhasil.

b. Manajemen pengorganisasian dan pelaksanaan kurikulum

Manajemen pengorganisasian dan pelaksanaan kurikulum berkenaan dengan semua tindakan yang berhubungan dengan perincian dan pembagian semua tugas yang memungkinkan untuk dilaksanakan. Organisasi kurikulum merupakan pola atau desain bahan kurikulum yang tujuannya untuk mempermudah peserta didik dalam mempelajari bahan pelajaran serta mempermudah peserta didik dalam melakukan kegiatan belajar sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif.

²⁶M. Arif Khoirudin, "Manajemen Kurikulum dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan", *Jurnal Manajemen Kurikulum* 24 (2013): h. 63-64.

Pengorganisasian kurikulum sangat terkait dengan pengaturan bahan pelajaran yang ada dalam kurikulum, sehingga dalam hal ini, ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan dalam pengorganisasian kurikulum yaitu:

- 1) *Ruang lingkup dan urutan bahan pelajaran*; dalam hal ini yang menjadi pertimbangan dalam penentuan materi pelajaran adalah adanya integrasi antara aspek masyarakat (yang mencakup nilai budaya dan sosial) dengan aspek peserta didik (yang mencakup minat, bakat dan kebutuhan). Dan dalam hal ini, bukan hanya materi pelajaran yang harus diperhatikan, tetapi bagaimana urutan bahan tersebut dapat disajikan secara sistematis dalam kurikulum.
- 2) *Kontinuitas kurikulum*; dalam hal ini yang perlu diperhatikan dalam pengorganisasian kurikulum adalah yang berkaitan dengan substansi bahan yang dipelajari peserta didik, agar jangan samapi terjadi pengulangan ataupun loncat-loncat yang tidak jelas tingkat kesukarannya.
- 3) *Relevansi atau kesesuaian bahan pelajaran*; dalam hal ini yang perlu diperhatikan adalah kesesuaian bahan pelajaran dengan perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan yang terus terjadi. Oleh sebab itu dalam pengorganisasian kurikulum keseimbangan substansi isi kurikulum harus dilihat secara komprehensif untuk kepentingan peserta didik sebagai individu, tuntutan masyarakat, maupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Maka dalam penentuan bahan pelajaran, aspek estetika, intelektual, moral, sosial emosional, personal, religius, seni-aspirasi dan kinestetik, semuanya harus terakomodasi dalam isi kurikulum.
- 4) *Alokasi waktu*; dalam hal ini yang menjadi perhatian adalah alokasi waktu yang dibutuhkan dalam kurikulum harus sesuai dengan jumlah materi yang disediakan. Maka untuk itu, penyusunan kalender pendidikan untuk mengetahui secara pasti

jumlah jam tatap muka masing-masing pelajaran merupakan hal yang terpenting sebelum menetapkan bahan pelajaran.²⁷

Manajemen pelaksanaan kurikulum bertujuan agar kurikulum dapat terlaksana dengan baik. Dalam hal ini manajemen bertugas menyediakan fasilitas material, personal dan kondisi-kondisi supaya kurikulum dapat terlaksana. Pelaksanaan kurikulum dibagi menjadi dua:

- a. Pelaksanaan kurikulum tingkat sekolah, yang dalam hal ini langsung ditangani oleh kepala sekolah. Selain dia bertanggung jawab supaya kurikulum dapat terlaksana di sekolah, dia juga berkewajiban melakukan kegiatan-kegiatan yakni menyusun kalender akademik yang akan berlangsung di sekolah dalam satu tahun, menyusun jadwal pelajaran dalam satu minggu, pengaturan tugas dan kewajiban guru, dan lain-lain yang berkaitan tentang usaha untuk pencapaian tujuan kurikulum.
- b. Pelaksanaan kurikulum tingkat kelas, yang dalam hal ini dibagi dan ditugaskan langsung kepada para guru. Pembagian tugas ini meliputi:
 1. Kegiatan dalam bidang proses pembelajaran.
 2. Pembinaan kegiatan ekstrakurikuler yang berada di luar ketentuan kurikulum sebagai penunjang tujuan sekolah.
 3. Kegiatan bimbingan belajar yang bertujuan untuk mengembangkan potensi yang berada dalam diri peserta didik dan membantu peserta didik dalam memecahkan masalah.²⁸

Pengorganisasian kurikulum merupakan suatu proses pengelompokan materi, alat-alat, tugas, tanggung jawab personil pendidik, sehingga tercapainya tujuan

²⁷Rusman, *Manajemen Kurikulum*, h. 60-61.

²⁸Dadang Suhardan, dkk., *Manajemen Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 195.

kurikulum yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Dalam pengorganisasian kurikulum, strukturnya harus mencerminkan dan mengarah kepada pencapaian tujuan dari rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Begitupula dengan pelaksanaan kurikulum, harus dititikberatkan pada usaha-usaha yang perlu dikerjakan dalam rangka pembinaan dan proses pembelajaran di sekolah untuk mencapai tujuan kurikulum.

c. Supervisi pelaksanaan kurikulum

Supervisi atau pemantauan kurikulum adalah pengumpulan informasi berdasarkan data yang tepat, akurat, dan lengkap tentang pelaksanaan kurikulum dalam jangka waktu tertentu oleh pemantau ahli untuk mengatasi permasalahan dalam kurikulum. Pelaksanaan kurikulum di dalam pendidikan harus dipantau untuk meningkatkan efektifitasnya. Pemantauan ini dilakukan supaya kurikulum tidak keluar dari jalur.²⁹

Oleh sebab itu seorang yang ahli menyusun kurikulum harus memantau pelaksanaan kurikulum mulai dari perencanaan sampai evaluasi. Secara garis besar pemantauan kurikulum bertujuan untuk mengumpulkan seluruh informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan dalam memecahkan masalah. Dalam tataran praktis, pemantauan kurikulum memuat beberapa aspek, yaitu sebagai berikut:

- 1) Peserta didik, dengan mengidentifikasi pada cara belajar, prestasi belajar, motivasi belajar, keaktifan, kreativitas, hambatan dan kesulitan yang dihadapi.
- 2) Tenaga pengajar, dengan memantau pada pelaksanaan tanggung jawab, kemampuan kepribadian, kemampuan kemasyarakatan, kemampuan profesional, dan loyalitas terhadap atasan.

²⁹Oemar Hamalik, *Manajemen Pengembangan Kurikulum*, h. 19.

- 3) Media pengajaran, dengan melihat pada jenis media yang digunakan, cara penggunaan media, pengadaan media, pemeliharaan dan perawatan media.
- 4) Prosedur penilaian: instrument yang dihadapi peserta didik, pelaksanaan penilaian, pelaporan hasil penilaian.
- 5) Jumlah lulusan: kategori, jenjang, jenis kelamin, kelompok usia, dan kualitas kemampuan lulusan.³⁰

Dalam pelaksanaan kurikulum atau proses pembelajaran, tugas kepala sekolah dan pengawas adalah melakukan supervisi dengan tujuan untuk membantu guru merencanakan dan mengatasi kesulitan yang dihadapi. Dengan cara itu, guru akan merasa didampingi sehingga akan meningkatkan semangat kerjanya.

Beberapa hal yang merupakan tugas kepala sekolah sebagai supervisor dalam rangka pembinaan kurikulum di sekolah antara lain:

1. Kepala sekolah hendaknya dapat membimbing para guru untuk dapat meneliti dan memilih bahan pelajaran mana yang baik dan sesuai dengan perkembangan anak dan tuntutan dalam masyarakat.
2. Membimbing dan mengawasi guru dalam memilih metode mengajar.
3. Menyelenggarakan rapat-rapat dewan guru secara insidental dan periodik, khususnya untuk membicarakan kurikulum dan sebagainya.
4. Mengadakan kunjungan kelas yang teratur, yaitu mengunjungi guru yang sedang mengajar untuk meneliti bagaimana cara atau metode mengajarnya.
5. Setiap permulaan tahun ajaran baru, guru-guru diwajibkan menyusun prota, promes, silabus dan rencana pembelajaran.

³⁰Rahmat Raharjo, *Inovasi Kurikulum Pendidikan Agama Islam* (Yogyakarta: Magnum Pustaka, 2010), h. 161.

6. Pada setiap akhir tahun ajaran, masing-masing guru mengadakan penilaian cara dan hasil kerjanya dengan meneliti kembali hal-hal yang pernah diajarkannya (sesuai silabus dan RPP) untuk selanjutnya mengadakan perbaikan-perbaikan dalam tahun ajaran berikutnya.
7. Setiap akhir tahun ajaran mengadakan penelitian bersama guru-guru mengenai situasi dan kondisi sekolah pada umumnya, dan usaha memperbaikinya sebagai pedoman dalam membuat program sekolah untuk tahun ajaran berikutnya.³¹

Apabila proses supervisi atau pemantauan pelaksanaan kurikulum berjalan dan berfungsi dengan baik, maka proses pembelajaran dan pencapaian tujuan kurikulum akan dapat dicapai dengan mudah. Seorang guru sebagai pelaksana kurikulum, juga harus memiliki kesadaran untuk selalu memperbaiki dan mengembangkan kemampuannya dalam pembelajaran, tanpa harus selalu menunggu disupervisi atau dipantau oleh kepala sekolah atau pengawas.

d. Penilaian kurikulum

Penilaian kurikulum atau evaluasi kurikulum merupakan bagian dari sistem manajemen. Evaluasi bertujuan untuk mengumpulkan, menganalisis dan menyajikan data untuk penentuan keputusan mengenai kurikulum apakah akan direvisi atau diganti.³² Evaluasi kurikulum memegang peranan penting baik dalam penentuan kebijaksanaan pendidikan pada umumnya, maupun pada pengambilan keputusan dalam kurikulum. Hasil-hasil evaluasi kurikulum juga dapat digunakan oleh guru-guru, kepala sekolah dan para pelaksana pendidikan lainnya, dalam memahami dan membantu perkembangan peserta didik, memilih bahan pelajaran, memilih metode dan alat-alat bantu pelajaran, cara penilaian serta fasilitas pendidikan lainnya.

³¹M. Ngalim Purwanto, *Administrasi Pendidikan* (Jakarta: Mutiara, 1984), h. 485.

³²Kholid Musyaddad, “Mengelola Kurikulum”, *Jurnal Al-`Ulum* 3 (2014): h. 19.

Evaluasi kurikulum ini bukan hanya mengevaluasi hasil belajar peserta didik dan proses pembelajarannya, tetapi juga desain dan implementasi kurikulum, kemampuan dan unjuk kerja guru, kemampuan dan kemajuan peserta didik, sarana serta cara penilaian. Kurikulum sebagai program pendidikan atau program belajar untuk peserta didik memerlukan penilaian sebagai bahan balikan dan penyempurnaan sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat, anak didik serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengawasan atau evaluasi ini bertujuan untuk menjamin kinerja yang dicapai sesuai dengan rencana atau tujuan yang ditetapkan. Dalam proses manajerial yang terakhir ini guru sebagai manajer pembelajaran harus mengambil langkah-langkah atau tindakan perbaikan apabila terdapat perbedaan yang signifikan atau adanya kesenjangan antara proses pembelajaran aktual di dalam kelas dengan yang telah direncanakan.³³

Evaluasi kurikulum dapat dilakukan terhadap berbagai komponen pokok yang ada dalam kurikulum, di antara komponen yang dapat dievaluasi adalah sebagai berikut:

- 1) *Evaluasi Tujuan Pendidikan*; merupakan evaluasi terhadap tujuan setiap mata pelajaran untuk mengetahui tingkat ketercapaiannya, baik terhadap tingkat perkembangan peserta didik maupun ketercapaiannya dengan visi-misi lembaga pendidikan.
- 2) *Evaluasi terhadap Isi/Materi Kurikulum*; merupakan evaluasi yang dilakukan terhadap seluruh pokok bahasan yang diberikan dalam setiap mata pelajaran untuk mengetahui ketersesuaiannya dengan pengalaman, karakteristik lingkungan, serta perkembangan ilmu dan teknologi.

³³Departemen Agama RI., *Pedoman Manajemen Berbasis Madrasah* (Jakarta: Direktorat Jenderal Kelembagaan Pendidikan Islam, 2005), h. 28.

- 3) *Evaluasi terhadap Strategi Pembelajaran*; merupakan evaluasi terhadap pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh guru terutama di dalam kelas guna mengetahui apakah strategi pembelajaran yang dilaksanakan dapat berhasil dengan baik.
- 4) *Evaluasi terhadap Program Penilaian*; merupakan evaluasi terhadap program penilaian yang dilaksanakan guru selama pelaksanaan pembelajaran baik secara harian, mingguan, semester, maupun penilaian akhir tahun pembelajaran.³⁴

Komponen-komponen tersebut sangat penting untuk dievaluasi seperti yang telah disebutkan sebelumnya karena hasil-hasil evaluasi tersebut dapat digunakan oleh guru-guru, kepala sekolah dan para pelaksana pendidikan lainnya, dalam memahami dan membantu perkembangan peserta didik, memilih bahan pelajaran, memilih metode dan alat-alat bantu pelajaran serta cara penilaian. Hasil dari evaluasi tersebut juga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk penentuan keputusan mengenai perbaikan atau perubahan kurikulum selanjutnya.

e. Perbaikan kurikulum

Kurikulum tidak bisa bersifat selalu statis, akan tetapi akan senantiasa berubah dan bersifat dinamis. Hal ini dikarenakan kurikulum itu sangat dipengaruhi oleh perubahan lingkungan yang menuntutnya untuk melakukan penyesuaian supaya dapat memenuhi permintaan. Permintaan itu baik dikarenakan adanya kebutuhan dari peserta didik dan kebutuhan masyarakat yang selalu mengalami perkembangan dan pertumbuhan terus-menerus.

³⁴Sanjaya, *Kurikulum dan Pembelajaran: Teori & Praktek KTSP* (Jakarta: Kencana, 2009), h. 342-348.

Perbaikan kurikulum intinya adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang dapat disoroti dari dua aspek, yaitu proses dan produk. Kriteria proses menitikberatkan pada efisiensi pelaksanaan kurikulum dan sistem instruksional, sedangkan kualitas produk melihat pada tujuan pendidikan yang hendak dicapai dan *output* (kelulusan peserta didik).

Berkaitan dengan prosedur perbaikan, seluruh komponen sumber daya manusia, seperti: administrator, pemilik sekolah, kepala sekolah, guru-guru, peserta didik, serta masyarakat sangat berperan besar. Tanggung jawab masing-masing harus dirumuskan secara jelas. Selain itu aspek evaluasi juga harus dikaji sejak awal perencanaan program perbaikan kurikulum. Dengan evaluasi yang tepat dan data informasi yang akurat akan sangat diperlukan dalam membuat keputusan kurikulum dan intruksional.³⁵

Perbaikan kurikulum pada dasarnya bertujuan untuk efektifitas dan efisiensi dari pelaksanaan kurikulum untuk mencapai tujuan kurikulum atau tujuan pendidikan. Perbaikan kurikulum harus berdasarkan pada hasil evaluasi kurikulum seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

Lestari dalam Muhammad Kristiawan mengatakan bahwa dalam konteks kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) secara operasional, siklus manajemen pengembangan kurikulum di sekolah terdiri dari empat tahap yaitu:

a. Tahap perencanaan

Tahap ini meliputi langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) analisis kebutuhan
- 2) merumuskan dan menjawab pertanyaan filosofis
- 3) menentukan desain kurikulum

³⁵Kholid Musyaddad, "Mengelola Kurikulum", *Jurnal Al-`Ulum* 3 (2014): h. 21-22.

- 4) membuat rencana induk (*master plan*) berupa pengembangan, pelaksanaan, dan penilaian

b. Tahap pengembangan

Tahap ini meliputi langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) perumusan rasional atau dasar pemikiran
- 2) perumusan visi, misi, dan tujuan
- 3) penentuan struktur dan isi program
- 4) pemilihan dan pengorganisasian materi
- 5) pengorganisasian kegiatan pembelajaran
- 6) pemilihan sumber, alat, dan sarana belajar
- 7) penentuan cara mengukur hasil belajar

c. Tahap implementasi atau pelaksanaan

Tahap ini meliputi langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) penyusunan rencana dan program pembelajaran (silabus, dan rencana pelaksanaan pembelajaran)
- 2) penjabaran materi (kedalaman dan keluasan)
- 3) penentuan strategi dan metode pembelajaran
- 4) penyediaan sumber, alat, dan sarana pembelajaran
- 5) penentuan cara dan alat penilaian proses dan hasil belajar
- 6) *setting* lingkungan pembelajaran

d. Tahap evaluasi atau penilaian

KTSP terdiri dari tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan, struktur dan muatan kurikulum tingkat satuan pendidikan, kalender dan silabus. Penyusunan kurikulum dilakukan oleh satuan pendidikan dengan berdasarkan pada standar

kompetensi lulusan, standar isi, standar kompetensi, dan kompetensi dasar yang dikembangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).³⁶

Jadi, ruang lingkup manajemen kurikulum yang dikemukakan Lestari dalam Muhammad Kristiawan di atas terdiri dari empat tahap, yaitu tahap perencanaan, tahap pengembangan, tahap implementasi atau pelaksanaan, dan tahap evaluasi atau penilaian. Ruang lingkup manajemen kurikulum tersebut lebih menekankan kepada aspek operasional yang berkaitan dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP).

B. Organisasi Kurikulum

Jenis-jenis kurikulum berkaitan dengan bagaimana kurikulum itu diorganisasikan.³⁷ Berdasarkan pendapat tersebut, dapat diartikan bahwa organisasi kurikulum merupakan nama lain dari jenis kurikulum atau pola kurikulum. Organisasi kurikulum merupakan pola atau desain bahan kurikulum yang tujuannya untuk mempermudah peserta didik dalam mempelajari bahan pelajaran serta mempermudah peserta didik melakukan kegiatan belajar, sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif.³⁸

Organisasi kurikulum adalah susunan pengalaman dan pengetahuan baku yang harus disampaikan dan dilakukan peserta didik untuk mengetahui kompetensi yang telah ditetapkan. Organisasi kurikulum berhubungan erat dengan kualitas kegiatan dan pengalaman belajar peserta didik. Organisasi kurikulum harus dipilih dan diatur sedemikian rupa untuk dikembangkan lebih luas dan lebih mendalam

³⁶Muhammad Kristiawan, dkk., *Manajemen Pendidikan*, h. 78.

³⁷Siti Azisah, *Guru dan Pengembangan Kurikulum Berkarakter Implementasi pada Tingkat Satuan Pendidikan*, h. 36.

³⁸Deni Kurniawan, *Model dan Organisasi Kurikulum*, h. 19.

sehingga peserta didik memperoleh sesuatu yang berharga dari program pendidikan yang telah ditetapkan³⁹

Dari segi organisasi kurikulum, Nana Sudjana dalam Siti Azisah mengemukakan tiga jenis pola organisasi kurikulum yaitu *subject curriculum*, *activity curriculum* dan *core curriculum*.⁴⁰

Subject curriculum atau biasa disebut *subject matter curriculum*. Jenis kurikulum ini menentukan isi kurikulum/mata pelajaran berdasarkan subjek atau mata pelajaran yang dianggap penting oleh para ahli. Tujuan utama kurikulum ini untuk menguasai pengetahuan berupa fakta, konsep, prinsip yang terdapat dalam mata pelajaran yang disajikan/diberikan oleh guru.

Subject curriculum terbagi atas empat bagian yaitu *separated subject curriculum*, *broadfield curriculum*, *correlated curriculum* dan *integrated curriculum*. *Separated subject curriculum* dipahami sebagai kurikulum yang terpisah-pisah satu sama lainnya. Kurikulumnya dalam bentuk mata pelajaran yang terpisah-pisah dan kurang terkait dengan mata pelajaran lainnya. Misalnya bahasa inggris dibagi ke dalam beberapa mata pelajaran yang terpisah-pisah yaitu *reading*, *grammar*, *listening*, *conversation*, *phonology*, *morphology* dan sebagainya.⁴¹ *Separate Subject Curriculum*, merupakan model kurikulum yang memisah-misahkan mata pelajaran sedemikian rupa, sehingga setiap mata pelajaran dapat dikembangkan menjadi anak cabang ilmu pengetahuan dan anak cabang berkembang lagi menjadi cucu cabang

³⁹Zainal Arifin, *Konsep dan Model Pengembangan Kurikulum*, h. 94.

⁴⁰Siti Azisah, *Guru dan Pengembangan Kurikulum Berkarakter Implementasi pada Tingkat Satuan Pendidikan*, h. 36.

⁴¹Siti Azisah, *Guru dan Pengembangan Kurikulum Berkarakter Implementasi pada Tingkat Satuan Pendidikan*, h. 37.

dan seterusnya. Sehingga pada akhirnya setiap cabang dari mata pelajaran tersebut menjadi mata pelajaran yang berdiri sendiri.⁴²

Broadfield curriculum kadang-kadang disebut kurikulum fusi. *The Broad Field* menghapuskan batas-batas dan menyatukan pelajaran yang berhubungan dengan erat. Sebagai contoh, sejarah, geografi, ilmu ekonomi dan ilmu politik menjadi Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). *Correlated curriculum* bermakna bahwa sejumlah mata pelajaran dihubungkan antar yang satu dengan yang lainnya sehingga cakupan ruang lingkup bahannya semakin luas. Sebagai contoh, mata pelajaran fiqhi dapat dihubungkan dengan mata pelajaran Qur'an Hadis.⁴³ Pengorganisasian *correlated curriculum* merupakan cara menggabungkan atau mengkolerasikan antara dua atau lebih mata pelajaran yang pokok bahasannya atau sub pokok bahasannya mempunyai tujuan pembahasan yang sama atau permasalahan yang sama. Pokok bahasan dan sub pokok bahasan dapat tuntas dan menyeluruh.⁴⁴

Integrated curriculum atau kurikulum terpadu merupakan suatu produk dari usaha pengintegrasian bahan pelajaran dari berbagai macam pelajaran. Kurikulum terintegrasi diciptakan dengan memusatkan pelajaran pada masalah tertentu yang memerlukan solusi dengan materi atau bahan dari berbagai disiplin atau mata pelajaran.⁴⁵ *Integrated Curriculum* meniadakan batas-batas antara berbagai mata pelajaran dan menyajikan bahan pelajaran dalam bentuk unit atau keseluruhan.

⁴²Loeziana Uce, "Model Pengorganisasi Kurikulum Pendidikan di Indonesia", *Islamic Studies Journal* 2 (2014): h. 126.

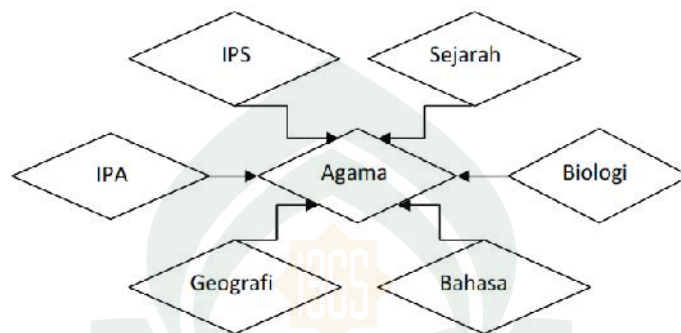
⁴³Siti Azisah, *Guru dan Pengembangan Kurikulum Berkarakter Implementasi pada Tingkat Satuan Pendidikan*, h. 38.

⁴⁴Loeziana Uce, "Model Pengorganisasi Kurikulum Pendidikan di Indonesia", *Islamic Studies Journal* 2 (2014): h. 126.

⁴⁵Siti Azisah, *Guru dan Pengembangan Kurikulum Berkarakter Implementasi pada Tingkat Satuan Pendidikan*, h. 38.

Dengan kebulatan bahan pelajaran diharapkan mampu membentuk murid yang integral, selaras dengan kehidupan sekitarnya, apa yang diajarkan di sekolah disesuaikan dengan kehidupan anak di luar sekolah.⁴⁶

Contoh Kurikulum yang terintegrasi:



Meysin dalam Amri Yusuf Lubis mengatakan bahwa, terdapat enam ragam pengorganisasian kurikulum antara lain:

1. Mata pelajaran terpisah (*isolated subject*);
2. Mata pelajaran berkorelasi;
3. Bidang studi (*broad field*);
4. Program yang perpusat pada anak (*child centered*);
5. Inti masalah (*core program*);
6. *Electric program*

Berikut penjelasan tentang model pengorganisasian kurikulum tersebut:

(1) Mata pelajaran terpisah (*isolated subjek*); kurikulum terdiri dari sejumlah mata pelajaran yang terpisah-pisah, yang diajarkan sendiri-sendiri tanpa ada hubungan dengan mata pelajaran lainnya. Masing-masing diberikan pada waktu tertentu dan

⁴⁶Sulaiman, "Pola Modern Organisasi Pengembangan Kurikulum", *Jurnal Ilmiah Didaktika* 1 (2013): h. 70.

tidak mempertimbangkan minat, kebutuhan, dan kemampuan peserta didik, semua materi diberikan sama. (2) Mata pelajaran berkorelasi; korelasi diadakan sebagai upaya untuk mengurangi kelemahan-kelemahan sebagai akibat pemisahan mata pelajaran. Prosedur yang ditempuh adalah menyampaikan pokok-pokok yang saling berkorelasi guna memudahkan peserta didik memahami pelajaran tertentu. (3) Bidang studi (*broad field*); yaitu organisasi kurikulum yang berupa pengumpulan beberapa mata pelajaran yang sejenis serta memiliki ciri-ciri yang sama dan dikorelasikan (difungsikan) dalam satu bidang pengajaran. Salah satu mata pelajaran dapat dijadikan "*core subject*", dan mata pelajaran lainnya dikorelasikan dengan *core* tersebut. (4) Program yang berpusat pada anak (*child centered*), yaitu program kurikulum yang menitikberatkan pada kegiatan-kegiatan peserta didik, bukan pada mata pelajaran. (5) Inti masalah (*core program*), yaitu suatu program yang berupa unit-unit masalah, dimana masalah-masalah diambil dari suatu mata pelajaran tertentu, dan mata pelajaran lainnya diberikan melalui kegiatan-kegiatan belajar dalam upaya memecahkan masalahnya. Mata pelajaran yang menjadi pisau analisisnya diberikan secara terintegrasi. (6) *Electric program*, yaitu suatu program yang mencari keseimbangan antara organisasi kurikulum yang terpusat pada mata pelajaran dan peserta didik.⁴⁷

Zainal Arifin mengemukakan beberapa model organisasi kurikulum yaitu:

1. *Subject Centered Curriculum*
2. *Correlated Curriculum*
3. *Broad Fild Curriculum*

⁴⁷Amri Yusuf Lubis, "Pelaksanaan Manajemen Kurikulum Pada SMA Negeri 1 Buengcala Kabupaten Aceh Besar", *Jurnal Administrasi Pendidikan Pascasarjana Universitas Syiah Kuala* 3 (2015): h. 18.

4. *Integrated Curriculum*

5. *Core Curriculum*

6. *Activity Curriculum*⁴⁸

Deni Kurniawan mengatakan bahwa secara umum terdapat dua bentuk organisasi kurikulum yaitu:

1. Kurikulum berdasarkan mata pelajaran (*subject curriculum*)
 - a. mata pelajaran yang terpisah-pisah (*separated subject curriculum*)
 - b. mata pelajaran gabungan (*correlated curriculum*)
2. Kurikulum terpadu (*integrated curriculum*)
 - a. kurikulum inti (*core curriculum*)
 - b. *social functions* dan *persistent situations*
 - c. *experience* atau *activity curriculum*⁴⁹

Pada dasarnya pembagian dari bentuk organisasi kurikulum tercakup dalam pendapat Deni Kurniawan yang menyederhanakan bentuk organisasi kurikulum tersebut ke dalam dua bagian. Bentuk organisasi kurikulum yang pertama (*subject curriculum*) telah banyak dijelaskan di atas. Di bawah ini akan dijelaskan secara singkat tentang bentuk organisasi kurikulum yang kedua (*integrated curriculum*).

Kurikulum inti (*core curriculum*) adalah bagian dari kurikulum terintegrasi atau terpadu, sehingga program pembelajaran untuk kurikulum ini harus dikembangkan secara bersama-sama antara guru dengan peserta didik. Beberapa karakteristik yang dapat dikaji dalam kurikulum ini adalah: 1) kurikulum ini direncanakan secara berkelanjutan (*continue*) selalu berkaitan dan direncanakan secara terus-menerus; 2) isi kurikulum yang dikembangkan merupakan bagian dari

⁴⁸Zainal Arifin, *Konsep dan Model Pengembangan Kurikulum*, h. 97.

⁴⁹Deni Kurniawan, *Model dan Organisasi Kurikulum*, h. 37.

pengalaman yang saling berkaitan; 3) isi kurikulum selalu mengambil atas dasar masalah maupun problema yang dihadapi secara aktual; 4) isi kurikulum cenderung mengambil atau mengangkat substansi yang bersifat pribadi maupun sosial; 5) isi kurikulum ini lebih difokuskan berlaku untuk semua peserta didik, sehingga kurikulum ini sebagai kurikulum umum tetapi substansinya bersifat problema, pribadi, sosial, dan pengalaman yang terpadu.

Kurikulum *Social functions* ini didasarkan atas analisis kegiatan-kegiatan manusia dalam masyarakat. Dalam *social functions* ini dapat diangkat berbagai kegiatan-kegiatan yang dapat dijadikan sebagai topik pembelajaran. Dalam *social functions* ini dapat diangkat berbagai kegiatan-kegiatan yang dapat dijadikan sebagai topik pembelajaran. Kegiatan-kegiatan manusia di masyarakat setiap saat akan berubah sesuai dengan perkembangan, sehingga substansi *social functions* pun harus bersifat dinamis.

Experience curriculum atau *activity curriculum* mengutamakan kegiatan-kegiatan atau pengalaman-pengalaman peserta didik dalam rangka membentuk kemampuan yang terintegrasi dengan lingkungan maupun dengan potensi peserta didik. Pada kurikulum ini, intinya yaitu peserta didik berbuat dan melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya vokasional tetapi tidak meniadakan aspek intelektual atau akademik peserta didik. Salah satu karakteristik dari kurikulum ini adalah untuk memberikan pendidikan keterampilan atau kejuruan tetapi didalamnya tercakup perkembangan kemampuan intelektual dan akademik yang berkaitan dengan aspek keterampilan atau kejuruan tersebut.⁵⁰

Meskipun pembagian bentuk organisasi kurikulum menurut para ahli berbeda-beda, namun pada garis besarnya tetap menggunakan model kurikulum berdasarkan mata pelajaran (*subject curriculum*) dan kurikulum terpadu (*integrated*

⁵⁰Deni Kurniawan, *Model dan Organisasi Kurikulum*, h. 27-32.

curriculum). Perbedaannya hanya terletak pada pembagian dari kedua model organisasi kurikulum tersebut.

C. Model Pengembangan Kurikulum

Model dapat ditemukan di hampir setiap bentuk kegiatan pendidikan, seperti model pengajaran, model administrasi, model evaluasi, model supervisi dan model lainnya. Model adalah pola-pola penting yang berguna sebagai pedoman untuk melakukan suatu tindakan. Model atau pola dapat juga diartikan sebagai bentuk (struktur).

Model atau konstruksi merupakan ulasan teoritis tentang suatu konsepsi dasar. Dalam pengembangan kurikulum, model dapat merupakan ulasan teoretis tentang suatu proses kurikulum secara menyeluruh atau dapat pula merupakan ulasan tentang salah satu bagian kurikulum.⁵¹

Model pengembangan kurikulum dapat diartikan sebagai pola atau patron.⁵² Menggunakan model atau pola dalam pengembangan kurikulum dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas pencapaian tujuan kurikulum tersebut. Model pengembangan kurikulum didalamnya berisi berbagai hal tentang alternatif prosedur dalam rangka mendesain (*designing*), menerapkan (*implementation*), dan mengevaluasi (*evaluation*) suatu kurikulum.⁵³ Berdasarkan pendapat tersebut, dalam model pengembangan kurikulum terdapat tiga prosedur utama dalam pengembangan

⁵¹Zainal Arifin, *Konsep dan Model Pengembangan Kurikulum*, h. 137.

⁵²Siti Azisah, *Guru dan Pengembangan Kurikulum Berkarakter Implementasi pada Tingkat Satuan Pendidikan*, h. 38.

⁵³Siti Azisah, *Guru dan Pengembangan Kurikulum Berkarakter Implementasi pada Tingkat Satuan Pendidikan*, h. 38.

kurikulum, yaitu desain atau rancangan, penerapan atau pelaksanaan, dan evaluasi atau penilaian terhadap suatu kurikulum.

Ada beberapa model pengembangan kurikulum: ada model yang dikaitkan dengan orang yang mengembangkannya dan model yang berkaitan dengan bentuknya.⁵⁴ Menurut pendapat ini, model pengembangan kurikulum secara garis besar ada dua yaitu: Pertama, model pengembangan kurikulum yang namanya dikaitkan atau diambil dari nama penemu atau orang yang mengembangkannya. Kedua, model pengembangan kurikulum yang dinamakai sesuai dengan bentuk atau strukturnya.

Model pengembangan kurikulum yang berkaitan dengan orang yang mengembangkannya yaitu: model Ralph Tyler, model Hilda Taba, Rogers, dan Beauchamp. Sedangkan model pengembangan kurikulum yang berkaitan dengan bentuknya yaitu: *the administrative model* atau *line staff*, *the grass roots model*, dan *the demonstration model*.

Berikut ini akan dijelaskan secara singkat model-model pengembangan kurikulum tersebut di atas:

1) *Model Ralph Tyler*

Model ini biasa juga disebut dengan *model rational*, *objective model* (model yang dimulai dengan tujuan, dan model klasik). Model Tyler ini menekankan pada urutan yang tetap dari komponen-komponen kurikulum yang dimulai dengan menetapkan tujuan, menyeleksi pengalaman belajar, mengorganisir pengalaman belajar, dan evaluasi.

⁵⁴Siti Azisah, *Guru dan Pengembangan Kurikulum Berkarakter Implementasi pada Tingkat Satuan Pendidikan*, h. 39.

2) *Model Hilda Taba*

Taba memodifikasi model Tyler dengan menambahkan tiga langkah pengembangan kurikulum, yaitu: a) diagnosa kebutuhan; b) pernyataan tujuan; c) seleksi isi; d) seleksi pengalaman belajar; e) organisasi pengalaman belajar; f) penentuan apa yang mau dievaluasi dan alat untuk mengevaluasinya.

3) *Model Rogers*

Ada empat langkah pengembangan kurikulum model ini yaitu: a) pemilihan target dari system pendidikan; b) Partisipasi guru dalam dalam pengalaman kelompok intensif; c) pengembangan pengalaman yang intensif untuk satu kelas atau unit pengajaran; d) Partisipasi orangtua dalam kegiatan kelompok. Model ini berbeda dengan model-model lainnya karena tidak ada suatu kelompok perencanaan kurikulum tertulis, tetapi yang ada hanyalah rangkaian kegiatan kelompok.

4) *Model Beauchamp*

Beauchamp mengemukakan lima hal yang harus diperhatikan dalam pengembangan kurikulum, yaitu: a) menetapkan arena atau lingkup wilayah yang dicakup oleh kurikulum, baik dari tingkat sekolah, kecamatan, propinsi ataupun seluruh negara; b) menetapkan personalia yakni orang-orang yang mengambil andil dalam pengembangan kurikulum (para ahli pendidikan/kurikulum yang ada pada pusat pengembangan kurikulum yaitu: para ahli pendidikan perguruan tinggi atau sekolah dan guru-guru, para professional dalam system pendidikan, dan tokoh masyarakat); c) Organisasi dan prosedur

pengembangan kurikulum; d) implementasi kurikulum; dan e) evaluasi kurikulum.

5) *The Administrative Model/Line Staff*

The administrative model adalah pengembangan kurikulum yang pelaksanaannya dimulai dari pejabat tingkat atas pembuat keputusan atau kebijakan berkaitan dengan pengembangan kurikulum. Dengan wewenang administrator pendidikan yakni direktur jenderal, direktur, dan kepala kantor wilayah pendidikan dan kebudayaan kemudian membentuk suatu tim yang terdiri dari pejabat di bawahnya, dan para tokoh dari dunia kerja dan perusahaan.

6) *The Grass Roots Model*

Pengembangan kurikulum model ini merupakan kebalikan dari model administratif. Inisiatif dan pengembangan kurikulum model administratif yang digunakan dalam sistem pengelolaan pendidikan/kurikulum yang bersifat sentralisasi, sedangkan model *grass roots*, seorang guru, sekelompok atau keseluruhan guru di satu sekolah mengadakan upaya pengembangan kurikulum.

7) *The Demonstration Model*

Ada dua bentuk model pengembangan ini. Pertama: sekelompok guru dari suatu sekolah atau beberapa sekolah yang diorganisasi dan ditunjuk untuk melaksanakan suatu uji coba atau eksperimen. Kedua: dari beberapa guru yang merasa kurang puas tentang kurikulum yang sudah ada, mengadakan eksperimen, uji coba, dan mengadakan pengembangan secara mandiri.⁵⁵

Dari ketujuh model pengembangan kurikulum yang telah disebutkan di atas, tentunya masing-masing model memiliki kelebihan dan kelemahan. Model-model

⁵⁵Siti Azisah, *Guru dan Pengembangan Kurikulum Berkarakter Implementasi pada Tingkat Satuan Pendidikan*, h. 39-42.

tersebut dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam membuat dan mengembangkan suatu kurikulum.

Berkaitan dengan pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, terdapat model pengembangan KTSP berbasis dukungan *stakeholders*, disebut sebagai model pengembangan KTSP dengan pendekatan ‘*grass-roots*’ yang mencakup langkah-langkah sebagai berikut:

- a) Pembentukan dan penetapan kelompok model (pengembang) KTSP di sekolah, mencakup kepala sekolah, guru, dan narasumber.
- b) Penyelenggaraan *focus group discussion* (FGD) antara kelompok pengembang dan *stakeholders* untuk menyusun/mengembangkan draft KTSP, dengan mengacu Permendiknas No.22/2006; Permendiknas No. 23/2006; dan panduan penyusunan KTSP berbasis dukungan *stakeholders*.
- c) Dalam proses pengembangan draft KTSP, dilakukan supervisi oleh kepala sekolah atau wakil kepala sekolah, baik dalam konteks proses maupun hasil (draft);
- d) Sebagai tindak lanjut hasil draft KTSP, kepala sekolah atau wakil bidang kurikulum perlu melakukan validasi kepada komite sekolah, dan legalisasi draft kepada Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten;
- e) Draft KTSP yang telah disupervisi, divalidasi dan dilegalisasi, berikutnya menjadi dokumen KTSP implementatif untuk sekolah yang bersangkutan.⁵⁶

Model pengembangan KTSP yang dikemukakan di atas pada dasarnya hampir sama dengan kegiatan penyusunan dan pengembangan KTSP berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81a Tahun 2013

⁵⁶Samsudi, “Model Pengembangan dan Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) Berbasis Dukungan *Stakeholders* pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah”, *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran* 19, no. 1 (2012): h. 53.

dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 yang kemudian dirinci oleh BAN-SM melalui tujuh kegiatan pokok dalam pengembangan KTSP seperti yang telah dikemukakan sebelumnya.

D. Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan

1. Pengertian KTSP

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan yang disingkat KTSP merupakan kurikulum yang dikembangkan sesuai dengan satuan pendidikan, potensi sekolah/daerah, karakteristik sekolah/daerah, sosial budaya masyarakat setempat, dan karakteristik peserta didik.⁵⁷ KTSP adalah suatu konsep yang menawarkan otonomi pada sekolah untuk menentukan kebijakan sekolah dalam rangka meningkatkan mutu dan efisien pendidikan agar dapat memodifikasikan keinginan masyarakat setempat serta menjalin kerja sama yang erat antar sekolah, masyarakat, industri dan pemerintah dalam membentuk pribadi peserta didik.⁵⁸

Sedangkan dalam peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan disebutkan bahwa KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan.⁵⁹ Pengertian ini sama dengan pengertian KTSP yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 yang menyatakan bahwa Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan adalah kurikulum

⁵⁷E. Mulyasa, *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Sebuah Panduan Praktis* (Cet. IV; Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), h. 8.

⁵⁸Joko Susilo, *KTSP; Manajemen Pelaksanaan dan Kesiapan Sekolah Menyongsongnya* (Bandung: Pustaka Pelajar, 2006), h. 12-13.

⁵⁹Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014*, h. 3.

operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan.⁶⁰

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa KTSP memberikan otonomi luas pada setiap satuan pendidikan dan banyak melibatkan peran serta masyarakat dalam rangka mengefektifkan proses pembelajaran di sekolah. Otonomi tersebut dapat memberikan keleluasaan kepada setiap satuan pendidikan dalam rangka mengelola sumberdaya, sumber dana dan sumber belajar serta mengalokasikannya sesuai prioritas kebutuhan sehingga setiap satuan pendidikan dapat mengembangkan kurikulum sesuai dengan potensi, tuntutan, dan kebutuhan masyarakat.

2. Landasan Pengembangan KTSP

Landasan pengembangan KTSP adalah:

- 1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 2) Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- 3) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi (SI).
- 4) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Kelulusan (SKL).
- 5) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 22 Tahun 2006 dan No. 23 Tahun 2006.⁶¹

Peraturan-peraturan di atas banyak yang telah mengalami tambahan dan perubahan, diantaranya:

⁶⁰Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015*, Pasal 1 Ayat 20.

⁶¹E. Mulyasa, *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Sebuah Panduan Praktis*, h. 24.

- 1) Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan telah dua kali mengalami perubahan yaitu dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013, kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015.
- 2) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah, kemudian diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016.
- 3) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Kelulusan diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 54 Tahun 2013, kemudian diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016.

Adapun tambahan peraturan yang dimaksud yaitu:

- 1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81a Tahun 2013 Tentang Implementasi Kurikulum.
- 2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan pelaksanaan ketentuan Pasal 77M ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013.

Dalam menyusun dan mengembangkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, pihak sekolah harus berpedoman kepada undang-undang dan peraturan pemerintah seperti yang telah disebutkan di atas.

3. Komponen KTSP

Kurikulum sebagai suatu sistem tentunya memiliki komponen-komponen yang saling terkait. Ahmad Tafsir menyebutkan bahwa kurikulum mengandung empat komponen, yaitu tujuan, isi, metode atau proses pembelajaran, dan evaluasi.

Setiap komponen dalam kurikulum tersebut sebenarnya saling terkait, bahkan masing-masing merupakan bagian integral dari kurikulum tersebut.⁶²

Komponen tujuan mengarahkan atau menunjukkan sesuatu yang hendak dituju dalam proses pembelajaran. Tujuan itu mula-mula bersifat umum. Dalam operasinya tujuan tersebut harus dibagi menjadi bagian-bagian yang kecil atau khusus.

Komponen isi (materi) dalam proses pembelajaran harus sesuatu yang relevan dengan tujuan pengajaran. Materi meliputi apa saja yang berhubungan dengan tujuan pengajaran.

Komponen proses pembelajaran melibatkan dua subjek pendidikan, yaitu peserta didik dan guru. Selain itu, proses pembelajaran juga perlu dibantu dengan media atau sarana lain yang memungkinkan proses tersebut berjalan efektif dan efisien. Pemilihan atau penggunaan metode harus sesuai dengan kondisi serta berjalan secara fleksibel. Artinya, metode atau pendekatan dapat berubah-ubah setiap saat agar interaksi proses pembelajaran tidak monoton dan menjenuhkan.

Komponen evaluasi yaitu untuk mengetahui dari hasil capaian ketiga komponen sebelumnya. Penilaian dapat digunakan untuk menentukan strategi perbaikan pengajaran. Selain itu, komponen evaluasi sangat berguna bagi semua pihak untuk melihat sejauhmana keberhasilan interaksi edukatif.⁶³

Setelah kita melihat komponen kurikulum secara umum, berikut ini penulis akan mengemukakan komponen-komponen kurikulum secara khusus atau

⁶²Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000), h. 89.

⁶³Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000)), h. 53.

komponen-komponen kurikulum yang terdapat dalam KTSP seperti yang terdapat dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81a Tahun 2013.

Komponen-komponen KTSP terdiri dari: Visi, Misi, dan Tujuan Pendidikan Satuan Pendidikan; Muatan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan; Pengaturan Beban Belajar; dan Kalender Pendidikan.

a. Visi, Misi, dan Tujuan Pendidikan Satuan Pendidikan

1. Visi mendeskripsikan cita-cita yang hendak dicapai oleh satuan pendidikan.
2. Misi mendeskripsikan indikator-indikator yang harus dilakukan melalui rencana tindakan dalam mewujudkan visi satuan pendidikan.
3. Tujuan pendidikan mendeskripsikan hal-hal yang perlu diwujudkan sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan.

b. Muatan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan

Muatan KTSP terdiri atas muatan kurikulum pada tingkat nasional, muatan kurikulum pada tingkat daerah, dan muatan kekhasan satuan pendidikan.

1) Muatan Kurikulum pada Tingkat Nasional

Muatan kurikulum pada tingkat nasional yang dimuat dalam KTSP adalah sebagaimana yang diatur dalam ketentuan:

- (a) untuk SD/MI mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 67 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum SD/MI;
- (b) untuk SMP/MTs mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 68 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum SMP/MTs;

- (c) untuk SMA/MA mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum SMA/MA;
- (d) untuk SMK/MAK mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum SMK/MAK;

2) Muatan Kurikulum pada Tingkat Daerah

Muatan kurikulum pada tingkat daerah yang dimuat dalam KTSP terdiri atas sejumlah bahan kajian dan pelajaran dan/atau mata pelajaran muatan lokal yang ditentukan oleh daerah yang bersangkutan. Penetapan muatan lokal didasarkan pada kebutuhan dan kondisi setiap daerah, baik untuk provinsi maupun kabupaten/kota.

Muatan lokal yang berlaku untuk seluruh wilayah provinsi ditetapkan dengan peraturan gubernur. Begitu pula halnya, apabila muatan lokal yang berlaku untuk seluruh wilayah kabupaten/kota ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota.

3) Muatan Kekhasan Satuan Pendidikan

Muatan kekhasan satuan pendidikan berupa bahan kajian dan pelajaran dan/atau mata pelajaran muatan lokal serta program kegiatan yang ditentukan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan dengan mempertimbangkan kebutuhan peserta didik.

c. Pengaturan Beban Belajar

- 1) Beban belajar dalam KTSP diatur dalam bentuk sistem paket atau sistem kredit semester.

(a) Sistem Paket

Beban belajar dengan sistem paket sebagaimana diatur dalam struktur kurikulum setiap satuan pendidikan merupakan pengaturan alokasi waktu untuk setiap mata pelajaran yang terdapat pada semester gasal dan genap dalam satu tahun ajaran. Beban belajar pada sistem paket terdiri atas pembelajaran tatap muka, penugasan terstruktur, dan kegiatan mandiri.

(b) Sistem Kredit Semester

Sistem Kredit Semester (SKS) diberlakukan hanya untuk SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK/MAK. Beban belajar setiap mata pelajaran pada SKS dinyatakan dalam satuan kredit semester (sks). Beban belajar 1 (satu) sks terdiri atas 1 (satu) jam pembelajaran tatap muka, 1 (satu) jam penugasan terstruktur, dan 1 (satu) jam kegiatan mandiri.

2) Beban belajar tatap muka, penugasan terstruktur, dan kegiatan mandiri.

(a) Sistem Paket

Beban belajar penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri pada satuan pendidikan yang menggunakan Sistem Paket yaitu 0%-40% untuk SD/MI, 0%-50% untuk SMP/MTs, dan 0%-60% untuk SMA/MA/SMK/MAK dari waktu kegiatan tatap muka mata pelajaran yang bersangkutan. Pemanfaatan alokasi waktu tersebut mempertimbangkan potensi dan kebutuhan peserta didik dalam mencapai kompetensi.

(b) Sistem Kredit

Beban belajar tatap muka, penugasan terstruktur, dan kegiatan mandiri pada satuan pendidikan yang menggunakan Sistem Kredit Semester (SKS) mengikuti aturan sebagai berikut: 1) Satu sks pada SMP/MTs terdiri atas: 40 menit tatap

muka, 20 menit penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri. 2) Satu sks pada SMA/MA/SMK/MAK terdiri atas: 45 menit tatap muka dan 25 menit penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri.

d. Kalender Pendidikan

Kurikulum satuan pendidikan pada setiap jenis dan jenjang diselenggarakan dengan mengikuti kalender pendidikan. Kalender pendidikan adalah pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama satu tahun ajaran yang mencakup permulaan tahun pelajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif, dan hari libur.

1) Permulaan Waktu Pelajaran

Permulaan waktu pelajaran di setiap satuan pendidikan dimulai pada setiap awal tahun pelajaran.

2) Pengaturan Waktu Belajar Efektif

- (a) Minggu efektif belajar adalah jumlah minggu kegiatan pembelajaran di luar waktu libur untuk setiap tahun pelajaran pada setiap satuan pendidikan.
- (b) Waktu pembelajaran efektif adalah jumlah jam pembelajaran setiap minggu yang meliputi jumlah jam pembelajaran untuk seluruh mata pelajaran termasuk muatan lokal (kurikulum tingkat daerah), ditambah jumlah jam untuk kegiatan lain yang dianggap penting oleh satuan pendidikan.

3) Pengaturan Waktu Libur

Penetapan waktu libur dilakukan dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku tentang hari libur, baik nasional maupun daerah. Waktu libur dapat berbentuk jeda tengah semester, jeda antar semester, libur akhir tahun pelajaran, hari libur

keagamaan, hari libur umum termasuk hari-hari besar nasional, dan hari libur khusus.⁶⁴

Jadi setiap satuan pendidikan dalam melaksanakan kegiatan yang mencakup permulaan tahun pelajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif, dan hari libur harus berpedoman kepada kalender pendidikan yang telah disusun dan ditetapkan oleh pemerintah atau Dinas Pendidikan setempat.

4. Mekanisme Penyusunan dan Pengembangan KTSP

Penyusunan KTSP merupakan bagian dari kegiatan perencanaan sekolah/madrasah. Kegiatan ini dapat berbentuk rapat kerja dan/atau lokakarya sekolah/madrasah dan/atau kelompok sekolah/madrasah yang diselenggarakan sebelum tahun pelajaran baru.

Tahap kegiatan penyusunan KTSP secara garis besar meliputi: perumusan visi dan misi berdasarkan analisis konteks dengan tetap mempertimbangkan keunggulan dan kebutuhan nasional dan daerah; penyiapan dan penyusunan draf; riviui, revisi, dan finalisasi; pemantapan dan penilaian; serta pengesahan. Langkah yang lebih rinci dari masing-masing kegiatan diatur dan diselenggarakan oleh tim pengembang kurikulum sekolah.⁶⁵

Dalam BSNP, Penyusunan KTSP terdiri dari

a. Analisis Konteks

- 1) Mengidentifikasi SI dan SKL sebagai acuan dalam penyusunan KTSP.

⁶⁴Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Lampiran I Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81a Tahun 2013*, h. 3-5.

⁶⁵Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Lampiran I Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81a Tahun 2013*, h. 6.

- 2) Menganalisis kondisi yang ada di satuan pendidikan yang meliputi peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana prasarana, biaya, dan program-program.
- 3) Menganalisis peluang dan tantangan yang ada di masyarakat dan lingkungan sekitar: komite sekolah, dewan pendidikan, dinas pendidikan, asosiasi profesi, dunia industri dan dunia kerja, sumber daya alam dan sosial budaya.

b. Mekanisme Penyusunan

1) Tim Penyusun

Tim penyusun KTSP pada SD, SMP, SMA dan SMK terdiri atas guru, konselor, dan kepala sekolah sebagai ketua merangkap anggota. Di dalam kegiatan tim penyusun melibatkan komite sekolah, dan nara sumber, serta pihak lain yang terkait. Supervisi dilakukan oleh dinas yang bertanggungjawab di bidang pendidikan tingkat kabupaten/kota untuk SD dan SMP dan tingkat provinsi untuk SMA dan SMK.

Tim penyusun kurikulum tingkat satuan pendidikan MI, MTs, MA dan MAK terdiri atas guru, konselor, dan kepala madrasah sebagai ketua merangkap anggota. Di dalam kegiatan tim penyusun melibatkan komite sekolah, dan nara sumber, serta pihak lain yang terkait. Supervisi dilakukan oleh departemen yang menangani urusan pemerintahan di bidang agama.

Tim penyusun kurikulum tingkat satuan pendidikan khusus (SDLB, SMPLB, dan SMALB) terdiri atas guru, konselor, kepala sekolah sebagai ketua merangkap anggota. Di dalam kegiatan tim penyusun melibatkan komite sekolah, dan nara sumber, serta pihak lain yang terkait. Supervisi dilakukan oleh dinas provinsi yang bertanggung jawab di bidang pendidikan.

2) Kegiatan

Penyusunan KTSP merupakan bagian dari kegiatan perencanaan sekolah/madrasah. Kegiatan ini dapat berbentuk rapat kerja dan/atau lokakarya sekolah/madrasah dan/atau kelompok sekolah/madrasah yang diselenggarakan dalam jangka waktu sebelum tahun pelajaran baru.

Tahap kegiatan penyusunan KTSP secara garis besar meliputi: penyiapan dan penyusunan draf, revidi dan revisi, serta finalisasi, pemantapan dan penilaian. Langkah yang lebih rinci dari masing-masing kegiatan diatur dan diselenggarakan oleh tim penyusun.

3) Pemberlakuan

Dokumen KTSP pada SD, SMP, SMA, dan SMK dinyatakan berlaku oleh kepala sekolah setelah mendapat pertimbangan dari komite sekolah dan diketahui oleh dinas tingkat kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang pendidikan untuk SD dan SMP, dan tingkat provinsi untuk SMA dan SMK. Dokumen KTSP pada MI, MTs, MA, dan MAK dinyatakan berlaku oleh kepala madrasah setelah mendapat pertimbangan dari komite madrasah dan diketahui oleh departemen yang menangani urusan pemerintahan di bidang agama.

Dokumen kurikulum tingkat satuan pendidikan SDLB, SMPLB, dan SMALB dinyatakan berlaku oleh kepala sekolah serta mendapat pertimbangan dari komite sekolah dan diketahui dinas provinsi yang bertanggung jawab di bidang pendidikan.⁶⁶

⁶⁶BSNP, *Panduan Penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah* (Jakarta: BSNP, 2006), h. 22-23.

Sedangkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dinyatakan bahwa:

Prosedur operasional pengembangan KTSP sekurang-kurangnya meliputi:

1. Analisis mencakup:
 - a. analisis ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Kurikulum;
 - b. analisis kebutuhan peserta didik, satuan pendidikan, dan lingkungan; dan
 - c. analisis ketersediaan sumber daya pendidikan.
2. Penyusunan mencakup:
 - a. perumusan visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan;
 - b. pengorganisasian muatan kurikuler satuan pendidikan;
 - c. pengaturan beban belajar peserta didik dan beban kerja pendidik tingkat kelas;
 - d. penyusunan kalender pendidikan satuan pendidikan;
 - e. penyusunan silabus muatan atau mata pelajaran muatan lokal; dan
 - f. penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran setiap muatan pembelajaran.
3. Penetapan dilakukan kepala sekolah/madrasah berdasarkan hasil rapat dewan pendidik satuan pendidikan dengan melibatkan komite sekolah/madrasah.
4. Pengesahan dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

Mekanisme

1. Pengembangan

Pengembangan KTSP merupakan bagian dari kegiatan perencanaan satuan pendidikan. Kegiatan ini dapat berbentuk rapat kerja satuan pendidikan dan/atau kelompok satuan pendidikan yang diselenggarakan sebelum tahun ajaran baru.

Tahap kegiatan pengembangan KTSP secara garis besar meliputi: (1) penyusunan draf berdasarkan analisis konteks; (2) revidi, revisi, dan finalisasi; serta (3) pengesahan oleh pejabat yang berwenang. Langkah yang lebih rinci dari masing-masing kegiatan diatur dan diselenggarakan oleh tim pengembang kurikulum satuan pendidikan. Dinas pendidikan atau kantor kementerian agama provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya berkewajiban melakukan koordinasi dan supervisi.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan KTSP merupakan tanggung jawab bersama seluruh unsur satuan pendidikan yakni kepala sekolah/madrasah, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.

Pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan KTSP antara lain:

- a. Tim pengembang kurikulum satuan pendidikan terdiri atas: tenaga pendidik, konselor (kecuali SD/SDLB/MI), dan kepala sekolah/madrasah sebagai ketua merangkap anggota. Dalam kegiatan pengembangan KTSP, tim pengembang kurikulum satuan pendidikan dapat mengikutsertakan komite sekolah/madrasah, nara sumber, dan pihak lain yang terkait.
- b. Dinas Pendidikan atau Kementerian Agama provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya melakukan koordinasi dan supervisi.⁶⁷

Kegiatan penyusunan dan pengembangan KTSP berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81a Tahun 2013 dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor

⁶⁷Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014*, h. 10-12.

61 Tahun 2014 tidak jauh berbeda. Pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81a Tahun 2013 penyusunan KTSP secara garis besar meliputi: perumusan visi dan misi; penyiapan dan penyusunan draf; revidu, revisi, dan finalisasi; pemantapan dan penilaian; serta pengesahan. Sedangkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 pengembangan KTSP secara garis besar meliputi: (1) penyusunan draf berdasarkan analisis konteks; (2) revidu, revisi, dan finalisasi; serta (3) pengesahan oleh pejabat yang berwenang.

Secara rinci, pengembangan kurikulum KTSP melalui tujuh kegiatan pokok yaitu:

- 1) Melibatkan tim pengembang (guru, kepala sekolah/madrasah, komite sekolah/madrasah), sesuai SK Kepala sekolah/madrasah;
- 2) Dilakukan melalui pertemuan, seperti: workshop, bimbingan teknis, dan lain-lain;
- 3) Kegiatan revidu dan revisi;
- 4) Menghadirkan narasumber (ahli pendidikan, praktisi pendidikan, Dewan Pendidikan, Dinas Pendidikan/Kemenag Kabupaten/Kota, dan Pemda);
- 5) Tahap finalisasi;
- 6) Pemantapan dan penilaian dokumen KTSP oleh Tim Pengembang berdasarkan petunjuk teknis Penyusunan KTSP; serta
- 7) Mendokumentasikan hasil pengembangan kurikulum yang ditandatangani Dinas Pendidikan/Kemenag Kabupaten/Kota.⁶⁸

⁶⁸BAN-SM, *Petunjuk Teknis Pengisian Instrumen Akreditasi SD/MI* (Jakarta: BAN-SM, 2014), h. 2.

Jadi, tujuh kegiatan tersebut di atas merupakan penjabaran dari garis besar kegiatan penyusunan dan pengembangan KTSP berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014. Tujuh kegiatan tersebut merupakan standar ideal dalam menyusun dan mengembangkan KTSP.

5. Prinsip-prinsip Penyusunan dan Pengembangan KTSP

Dalam menyusun KTSP perlu memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- 1) Peningkatan iman, takwa, dan akhlak mulia
- 2) Kebutuhan kompetensi masa depan
- 3) Peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemampuan peserta didik
- 4) Keragaman potensi dan karakteristik daerah dan lingkungan
- 5) Tuntutan pembangunan daerah dan nasional
- 6) Tuntutan dunia kerja
- 7) Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni
- 8) Agama
- 9) Dinamika perkembangan global
- 10) Persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan
- 11) Kondisi sosial budaya masyarakat setempat
- 12) Kesenjangan gender
- 13) Karakteristik satuan pendidikan⁶⁹

Prinsip Pengembangan KTSP sebagai berikut:

⁶⁹Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Lampiran I Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81a Tahun 2013*, h. 6-8.

- 1) Berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya pada masa kini dan yang akan datang.

Kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip bahwa peserta didik memiliki posisi sentral untuk mengembangkan kompetensinya agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut pengembangan kompetensi peserta didik disesuaikan dengan potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik serta tuntutan lingkungan pada masa kini dan yang akan datang. Memiliki posisi sentral berarti bahwa kegiatan pembelajaran harus berpusat pada peserta didik.

- 2) Belajar sepanjang hayat

Kurikulum diarahkan pada proses pengembangan, pembudayaan, dan pemberdayaan kemampuan peserta didik untuk belajar sepanjang hayat. Kurikulum mencerminkan keterkaitan antara unsur-unsur pendidikan formal, nonformal, dan informal dengan memperhatikan kondisi dan tuntutan lingkungan yang selalu berkembang serta arah pengembangan manusia seutuhnya.

- 3) Menyeluruh dan berkesinambungan

Substansi kurikulum mencakup keseluruhan dimensi kompetensi (sikap, pengetahuan, dan keterampilan) bidang kajian keilmuan dan mata pelajaran yang direncanakan dan disajikan secara berkesinambungan antarjenjang pendidikan.⁷⁰

⁷⁰Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014*, h. 10.

Dalam menyusun dan mengembangkan KTSP, pihak sekolah hendaknya tetap memperhatikan prinsip-prinsip tersebut di atas agar kurikulum yang dihasilkan lebih terarah dalam mengembangkan karakter, potensi, dan kompetensi peserta didik.

E. *Perpaduan Kurikulum Pendidikan Agama Islam*

1. Pendidikan Agama Islam

a. Pengertian Pendidikan Agama Islam

Ahmad D. Marimba berpendapat bahwa Pendidikan Agama Islam adalah bimbingan jasmani, rohani berdasarkan hukum-hukum agama Islam menuju kepada terbentuknya kepribadian utama menurut ukuran-ukuran Islam. Dengan pengertian yang lain sering kali beliau mengatakan kepribadian yang memiliki nilai-nilai agama Islam, memilih dan memutuskan serta berbuat berdasarkan nilai-nilai Islam, dan bertanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai Islam.⁷¹

Daud Ali mengatakan bahwa Pendidikan Agama Islam ialah menanamkan akhlak yang mulia di dalam jiwa anak dalam masa pertumbuhannya dan menyiraminya dengan petunjuk dan nasihat, sehingga akhlak itu menjadi salah satu kemampuan (meresap dalam) jiwanya kemudian buahnya berwujud keutamaan, kebaikan dan cinta bekerja untuk kemanfaatan tanah air.⁷²

Hasbullah mengatakan bahwa Pendidikan Agama Islam ialah usaha yang dilakukan pendidik terhadap anak didik untuk pengenalan dan pengakuan tempat-tempat yang benar dari segala sesuatu di dalam tatanan penciptaan sehingga membimbing kearah pengenalan dan pengakuan akan tempat Tuhan yang tepat di

⁷¹Ahmad D. Marimba, *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam* (Bandung: al-Ma'arif, 1989), h. 13.

⁷²Daud Ali, *Pendidikan Agama Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h. 41.

dalam tatanan wujud dan kepribadian.⁷³ Muhaimin mengatakan bahwa Pendidikan Agama Islam ialah pendidikan yang memiliki empat macam fungsi, yaitu: 1) Menyiapkan generasi muda untuk memegang peranan-peranan tertentu dalam masyarakat pada masa yang akan datang. Peranan ini berkaitan erat dengan kelanjutan hidup (*survival*) masyarakat sendiri. 2) Memindahkan ilmu pengetahuan yang bersangkutan dengan peranan-peranan tersebut dari generasi tua kepada generasi muda. 3) Memindahkan nilai-nilai yang bertujuan memelihara keutuhan dan kesatuan masyarakat yang menjadi syarat mutlak bagi kelanjutan hidup (*survival*) suatu masyarakat dan peradaban. Dengan kata lain, tanpa nilai-nilai keutuhan (*integrity*) dan kesatuan (*integration*) suatu masyarakat, maka kelanjutan hidup tersebut tidak akan dapat terpelihara dengan baik yang akhirnya akan berkesudahan dengan kehancuran masyarakat itu sendiri.⁷⁴

Zakiah Darajat mengatakan bahwa Pendidikan Agama Islam adalah pendidikan melalui ajaran-ajaran agama Islam, yaitu berupa bimbingan dan asuhan terhadap anak didik agar nantinya setelah selesai dari pendidikan itu ia dapat memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran-ajaran agama Islam yang telah diyakininya secara menyeluruh, serta menjadikan ajaran agama Islam sebagai suatu pandangan hidupnya demi keselamatan dan kesejahteraan hidup di dunia maupun di akhirat kelak.⁷⁵ Depdiknas menyatakan bahwa Pendidikan Agama Islam adalah upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati hingga mengimani, bertaqwa, dan berakhlak mulia dalam mengamalkan ajaran agama Islam dari sumber utamanya kitab suci al-Qur'an dan

⁷³Hasbullah, *Kapita Selekta Pendidikan Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), h. 34.

⁷⁴Muhaimin, *Paradigma Pendidikan Islam* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001), h. 33.

⁷⁵Zakiah Darajat, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 97.

Hadis, melalui kegiatan bimbingan, pengajaran latihan, serta penggunaan pengalaman.⁷⁶

Dari beberapa uraian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa Pendidikan Agama Islam secara umum adalah suatu aktifitas atau usaha-usaha tindakan dan bimbingan yang dilakukan secara sadar dan sengaja serta terencana yang mengarah pada terbentuknya kepribadian anak didik yang sesuai dengan norma-norma yang ajaran agama Islam. Namun dalam artian khusus, Pendidikan Agama Islam dalam penelitian ini diartikan sebagai sebuah kelompok mata pelajaran dan sebuah mata pelajaran.

b. Dasar Pendidikan Agama Islam

Setiap usaha, kegiatan dan tindakan yang disengaja dan disadari untuk mencapai suatu tujuan harus mempunyai landasan tempat berpijak yang baik dan kuat. Oleh karena itu pendidikan agama Islam sebagai suatu usaha membentuk manusia, harus mempunyai landasan bagi semua kegiatan di dalamnya.

Dasar spiritual pendidikan agama Islam yang paling utama ada dua yaitu: al-Qur'an dan as-Sunnah.

1) al-Qur'an

Banyak pengertian yang telah dikemukakan oleh para ahli tentang definisi atau pengertian al-Qur'an, baik dari segi etimologi (bahasa) maupun dari segi terminologi (istilah). Dalam mendefinisikan kata al-Qur'an tersebut tentunya terdapat perbedaan-perbedaan pendapat dari para ahli tersebut, namun penulis hanya memilih dan mengutip pendapat yang umum dan populer mengenai pengertian al-Qur'an yaitu seperti yang diungkapkan oleh Manna' al-Qalbi dalam Rosihan Anwar yaitu:

⁷⁶Departemen Pendidikan Nasional, *Standar Kompetensi Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam SMP & MTs* (Jakarta: Pusat Kurikulum, Balitbang Depdiknas, 2003), h. 7.

كَلَامُ اللَّهِ الْمُنَزَّلُ عَلَى مُحَمَّدٍ ص.م. الْمُتَعَبَّدُ بِتِلَاوَتِهِ.

Artinya:

“Kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. dan membacanya memperoleh pahala.”⁷⁷

Pengertian lain tentang al-Qur'an yang lebih lengkap adalah seperti yang diungkapkan oleh Abu Syahbah dalam Rosihan Anwar yaitu:

كَلَامُ اللَّهِ الْمُنَزَّلُ عَلَى نَبِيِّهِ (مُحَمَّدٍ) ص.م. الْمُعْجَزُ بِتِلَاوَتِهِ الْمَنْقُولُ بِالتَّوَاتُرِ، الْمَكْتُوبُ فِي الْمَصَاحِفِ مِنْ أَوَّلِ سُورَةِ الْفَاتِحَةِ إِلَى سُورَةِ النَّاسِ.

Artinya:

“Kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi-Nya, Muhammad saw. yang lafazh-lafazhnya mengandung mukjizat, membacanya mempunyai nilai ibadah, yang diturunkan secara mutawatir, dan yang ditulis pada mushaf, mulai dari surat al-Fatihah sampai akhir surat an-Nas.”⁷⁸

Islam adalah agama yang membawa misi umatnya menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran. al-Qur'an merupakan landasan paling dasar yang dijadikan acuan dasar hukum tentang Pendidikan Agama Islam. Firman Allah tentang Pendidikan Agama Islam dalam QS al-'Alaq/96: 1-5.

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ [١] خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ [٢] اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ [٣]
الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ [٤] عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ [٥]

Terjemahnya:

1. Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang menciptakan, 2. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. 3. Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Maha Pemurah, 4. Yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam, 5. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.⁷⁹

⁷⁷Rosihan Anwar, *Ulum Al-Qur'an* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), h. 33.

⁷⁸Rosihan Anwar, *Ulum Al-Qur'an*, h. 34.

⁷⁹Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: CV Toha Putra, 2002), h.

Dari ayat-ayat tersebut di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa hendaknya manusia meyakini akan adanya Tuhan pencipta manusia (dari segumpal darah), selanjutnya untuk memperkokoh keyakinan dan memeliharanya agar tidak luntur, hendaklah melaksanakan pendidikan dan pengajaran.

2) as- Sunnah

Sunnah menurut ulama hadis, yaitu setiap sesuatu yang bersumber dari Rasulullah saw., baik berupa perkataan, ketetapan, sifat kemakhlukan, akhlak atau perjalanan hidupnya, baik hal tersebut terjadi ketika beliau belum menjadi rasul seperti bersemedi di Gua Hira atau sesudah menjadi Rasul.⁸⁰

Muhammad saw. diutus ke bumi ini, salah satu tugas utamanya adalah untuk memperbaiki moral atau akhlak manusia, sebagaimana sabdanya:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ
(رواه البيهقي)

Artinya:

Abu Hurairah r.a. meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda: Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak.⁸¹

Manusia yang berkhlahk mulia harus menjadi sasaran proses pendidikan Islam karena itulah misi utama Rasulullah saw. berkenaan dengan akhlak. Makna yang terpenting di balik hadis ini adalah memformulasikan sistem, metode, atau cara yang

⁸⁰Mardani, *Hadis Ahkam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 2.

⁸¹Abu Bakar Ahmad Ibn al-Husayn Ibn 'Ali al-Bayhaqi, Sunan al-Bayhaqi, dalam *al-Maktabah al-Syâmilah*. Juz 2, h. 472.

harus ditempuh oleh para penanggung jawab pendidikan dalam meneruskan misi risalah, yaitu menyempurnakan akhlak menjadi akhlak mulia.

Bila misi utama Rasulullah saw. adalah menyempurnakan kemuliaan akhlak, maka proses pendidikan seyogianya diarahkan menuju terbentuknya pribadi dan umat yang berakhlak mulia. Hal ini sesuai dengan penegasan Allah bahwa Nabi saw. adalah teladan utama bagi umat manusia sebagaimana firman Allah yang terdapat pada QS al-Ahzab /33: 21.

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

Artinya:

Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.⁸²

Untuk mencapai hal itu, akhlak mulia harus ditegaskan dalam formulasi tujuan pendidikan, khususnya dalam Pendidikan Agama Islam.

c. Tujuan Pendidikan Agama Islam

Dalam melaksanakan proses pendidikan, tentunya memiliki arah atau tujuan yang ingin dicapai oleh penyelenggara pendidikan tersebut. Begitu pula dengan Pendidikan Agama Islam.

Ahmad D. Marimba mengemukakan dua macam tujuan pendidikan agama Islam, yaitu tujuan sementara dan tujuan akhir. a) Tujuan sementara, yaitu sasaran sementara yang harus dicapai oleh umat Islam yang melaksanakan pendidikan Islam. Tujuan sementara artinya tercapainya berbagai kemampuan seperti kecakapan jasmaniah, pengetahuan membaca, menulis, dan ilmu-ilmu lainnya. b) Tujuan akhir,

⁸²Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 660.

yaitu terwujudnya kepribadian muslim yang mencakup aspek-aspeknya untuk merealisasikan atau menceminkan ajaran agama Islam.⁸³

Zakiah Darajat membagi tujuan Pendidikan Agama Islam menjadi empat macam, yaitu: 1) tujuan umum, 2) tujuan akhir, 3) tujuan sementara, dan 4) tujuan operasional. Tujuan umum adalah tujuan yang akan dicapai dengan semua kegiatan pendidikan, baik dengan pengajaran atau dengan cara lain. Tujuan akhir adalah tercapainya wujud insan kamil, yaitu orang yang telah mencapai ketakwaan dan menghadap Allah dalam ketakwaannya. Tujuan sementara, adalah tujuan yang akan dicapai setelah anak diberi sejumlah pengalaman tertentu yang direncanakan dalam suatu kurikulum pendidikan formal. Tujuan operasional adalah tujuan praktis yang akan dicapai dengan sejumlah kegiatan pendidikan tertentu.⁸⁴

Dari uraian di atas dapat difahami bahwa Pendidikan Agama Islam mempunyai tujuan yang luas dan dalam. Pendidikan diharapkan mendorong aspek tersebut ke arah keutamaan serta pencapaian kesempurnaan hidup. Tujuan ini merupakan cerminan dan realisasi dari sikap penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah, baik secara perorangan, masyarakat, maupun sebagai umat manusia keseluruhannya. Sebagai hamba Allah yang berserah diri kepada khaliknya, ia adalah hamba-Nya yang beriman dan berilmu pengetahuan.

2. Kurikulum Pendidikan Agama Islam di SD (Diknas)

Struktur kurikulum merupakan pola dan susunan mata pelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Kedalaman muatan kurikulum pada setiap mata pelajaran pada setiap satuan pendidikan dituangkan dalam kompetensi yang harus dikuasai peserta didik sesuai dengan beban belajar

⁸³ Ahmad D. Marimba, *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam*, h. 77.

⁸⁴ Zakiah Darajat, *Ilmu Pendidikan Islam*, h. 75.

yang tercantum dalam struktur kurikulum. Kompetensi yang dimaksud terdiri atas standar kompetensi dan kompetensi dasar yang dikembangkan berdasarkan standar kompetensi lulusan. Muatan lokal dan kegiatan pengembangan diri merupakan bagian integral dari struktur kurikulum pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa kurikulum untuk jenis pendidikan umum, kejuruan, dan khusus pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas:

- a. kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia;
- b. kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian;
- c. kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi;
- d. kelompok mata pelajaran estetika;
- e. kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga dan kesehatan.

Setiap kelompok mata pelajaran tersebut dilaksanakan secara holistik sehingga pembelajaran masing-masing kelompok memengaruhi pemahaman dan penghayatan peserta didik, dan semua kelompok mata pelajaran sama pentingnya dalam menentukan kelulusan.⁸⁵

Cakupan kelompok mata pelajaran tersebut dijabarkan sebagai berikut:

⁸⁵E. Mulyasa, *Implementasi KTSP Kemandirian Guru dan Kepala Sekolah* (Cet. III; Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 22.

Tabel 2.1
Standar Isi Kelompok Mata Pelajaran

No.	Kelompok Mata Pelajaran	Cakupan
1.	Agama dan Akhlak Mulia	Kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Akhlak mulia mencakup etika, budi pekerti, atau moral sebagai perwujudan dari pendidikan agama.
2.	Kewarganegaraan dan Kepribadian	Kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian dimaksudkan untuk peningkatan kesadaran dan wawasan peserta didik akan status, hak, dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta peningkatan kualitas dirinya sebagai manusia. Kesadaran dan wawasan termasuk wawasan kebangsaan, jiwa dan patriotisme bela negara, penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia, kemajemukan bangsa, pelestarian lingkungan hidup, kesetaraan gender, demokrasi, tanggung jawab sosial, ketaatan pada hukum, ketaatan membayar pajak, dan sikap serta perilaku anti korupsi, kolusi, dan nepotisme.

3.	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi pada SD/MI/SDLB dimaksudkan untuk mengenal, menyikapi, dan mengapresiasi ilmu pengetahuan dan teknologi, serta menanamkan kebiasaan berpikir dan berperilaku ilmiah yang kritis, kreatif dan mandiri.
4.	Estetika	Kelompok mata pelajaran estetika dimaksudkan untuk meningkatkan sensitivitas, kemampuan mengekspresikan dan kemampuan mengapresiasi keindahan dan harmoni. Kemampuan mengapresiasi dan mengekspresikan keindahan serta harmoni mencakup apresiasi dan ekspresi, baik dalam kehidupan individual sehingga mampu menikmati dan mensyukuri hidup, maupun dalam kehidupan kemasyarakatan sehingga mampu menciptakan kebersamaan yang harmonis.
5.	Jasmani, Olahraga dan Kesehatan	Kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga dan kesehatan pada SD/MI/SDLB dimaksudkan untuk meningkatkan potensi fisik serta menanamkan sportivitas dan kesadaran hidup sehat. Budaya hidup sehat termasuk kesadaran, sikap, dan perilaku hidup sehat yang bersifat individual ataupun yang bersifat kolektif kemasyarakatan seperti keterbebasan dari

		perilaku seksual bebas, kecanduan narkoba, HIV/AIDS, demam berdarah, muntaber, dan penyakit lain yang potensial untuk mewabah.
--	--	--

Sumber: Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi

Kerangka dasar dan struktur kurikulum SD tersebut adalah:

Tabel 2.2
Struktur Kurikulum SD

Komponen	Kelas dan Alokasi Waktu			
	I	II	III	IV, V, VI
A. Mata Pelajaran				
1. Pendidikan Agama				3
2. Pendidikan Kewarganegaraan				2
3. Bahasa Indonesia				5
4. Matematika				5
5. Ilmu Pengetahuan Alam				4
6. Ilmu Pengetahuan Sosial				3
7. Seni Budaya dan Keterampilan				4
8. Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan				4
B. Muatan Lokal				2
C. Pengembangan Diri				2*)
Jumlah	26	27	28	32

Sumber: Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005

Pada tabel di atas, tampak bahwa kurikulum SD memuat 8 mata pelajaran, muatan lokal, dan pengembangan diri. Muatan lokal merupakan kegiatan kurikuler untuk mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas dan potensi daerah, termasuk keunggulan daerah, yang materinya tidak dapat dikelompokkan ke dalam mata pelajaran yang ada. Substansi muatan lokal ditentukan oleh satuan pendidikan.

Pengembangan diri bukan merupakan mata pelajaran yang harus diasuh oleh guru. Pengembangan diri bertujuan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai dengan kebutuhan, bakat, dan minat setiap peserta didik sesuai dengan kondisi sekolah. Kegiatan pengembangan diri difasilitasi dan atau dibimbing oleh konselor, guru, atau tenaga kependidikan yang dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan pengembangan diri dilakukan melalui kegiatan pelayanan konseling yang berkenaan dengan masalah diri pribadi dan kehidupan sosial, belajar, dan pengembangan karir peserta didik. Pembelajaran pada Kelas I s.d. III dilaksanakan melalui pendekatan tematik, sedangkan pada Kelas IV s.d. VI dilaksanakan melalui pendekatan mata pelajaran.

Pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81a Tahun 2013 Tentang Implementasi Kurikulum, Pedoman Penyusunan dan Pengelolaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, dinyatakan bahwa muatan KTSP terdiri atas muatan kurikulum pada tingkat nasional, muatan kurikulum pada tingkat daerah, dan muatan kekhasan satuan pendidikan.

1) Muatan Kurikulum pada Tingkat Nasional

Muatan kurikulum pada tingkat nasional yang dimuat dalam KTSP adalah sebagaimana yang diatur dalam ketentuan:

- (a) untuk SD/MI mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 67 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum SD/MI;
- (b) untuk SMP/MTs mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 68 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum SMP/MTs;

- (c) untuk SMA/MA mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum SMA/MA;
- (d) untuk SMK/MAK mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum SMK/MAK;

2) Muatan Kurikulum pada Tingkat Daerah

Muatan kurikulum pada tingkat daerah yang dimuat dalam KTSP terdiri atas sejumlah bahan kajian dan pelajaran dan/atau mata pelajaran muatan lokal yang ditentukan oleh daerah yang bersangkutan. Penetapan muatan lokal didasarkan pada kebutuhan dan kondisi setiap daerah, baik untuk provinsi maupun kabupaten/kota. Muatan lokal yang berlaku untuk seluruh wilayah provinsi ditetapkan dengan peraturan gubernur. Begitu pula halnya, apabila muatan lokal yang berlaku untuk seluruh wilayah kabupaten/kota ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota.

3) Muatan Kekhasan Satuan Pendidikan

Muatan kekhasan satuan pendidikan berupa bahan kajian dan pelajaran dan/atau mata pelajaran muatan lokal serta program kegiatan yang ditentukan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan dengan mempertimbangkan kebutuhan peserta didik.

Berdasarkan Permendikbud di atas, muatan kurikulum pada tingkat nasional yang dimuat dalam KTSP adalah sebagaimana yang diatur dalam ketentuan point (a) yaitu untuk SD/MI mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 67 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum SD/MI.

Kerangka dasar dan struktur kurikulum tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Struktur Kurikulum SD

Mata Pelajaran		Alokasi Waktu Perminggu					
		I	II	III	IV	V	VI
Kelompok A							
1.	Pendidikan Agama dan Budi Pekerti	4	4	4	4	4	4
2.	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	5	5	6	5	5	5
3.	Bahasa Indonesia	8	9	10	7	7	7
4.	Matematika	5	6	6	6	6	6
5.	Ilmu Pengetahuan Alam	-	-	-	3	3	3
6.	Ilmu Pengetahuan Sosial	-	-	-	3	3	3
Kelompok B							
1.	Seni Budaya dan Prakarya	4	4	4	5	5	5
2.	Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan	4	4	4	4	4	4
Jumlah Alokasi Waktu Perminggu		30	32	34	36	36	36

Sumber: Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 67 Tahun 2013

Keterangan:

- Mata pelajaran Seni Budaya dan Prakarya dapat memuat Bahasa Daerah.
- Selain kegiatan intrakurikuler seperti yang tercantum di dalam struktur kurikulum diatas, terdapat pula kegiatan ekstrakurikuler Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah antara lain Pramuka (Wajib), Usaha Kesehatan Sekolah, dan Palang Merah Remaja.
- Kegiatan ekstrakurikuler seperti Pramuka (terutama), Unit Kesehatan Sekolah, Palang Merah Remaja, dan yang lainnya adalah dalam rangka mendukung pembentukan kompetensi sikap sosial peserta didik, terutamanya adalah sikap peduli. Di samping itu juga dapat dipergunakan sebagai wadah dalam penguatan

pembelajaran berbasis pengamatan maupun dalam usaha memperkuat kompetensi keterampilannya dalam ranah konkrit. Dengan demikian kegiatan ekstrakurikuler ini dapat dirancang sebagai pendukung kegiatan kurikuler.

- d) Mata pelajaran Kelompok A adalah kelompok mata pelajaran yang kontennya dikembangkan oleh pusat. Mata pelajaran Kelompok B yang terdiri atas mata pelajaran Seni Budaya dan Prakarya serta Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan adalah kelompok mata pelajaran yang kontennya dikembangkan oleh pusat dan dilengkapi dengan konten lokal yang dikembangkan oleh pemerintah daerah.

3. Kurikulum Pendidikan Agama Islam di MI (Kemenag)

Struktur Kurikulum Madrasah diatur berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 165 Tahun 2014. Struktur kurikulum tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.4

Struktur Kurikulum MI

Mata Pelajaran			Alokasi Waktu Perminggu					
			I	II	III	IV	V	VI
Kelompok A								
1.	Pendidikan Agama Islam							
	a.	Al-Qur'an Hadis	2	2	2	2	2	2
	b.	Akidah Ahlak	2	2	2	2	2	2
	c.	Fikih	2	2	2	2	2	2
	d.	Sejarah Kebudayaan Islam	-	-	2	2	2	2
2.	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan		5	5	6	5	5	5
3.	Bahasa Indonesia		8	9	10	7	7	7
4.	Bahasa Arab		2	2	2	2	2	2
5.	Matematika		5	6	6	6	6	6

6.	Ilmu Pengetahuan Alam	-	-	-	3	3	3
7.	Ilmu Pengetahuan Sosial	-	-	-	3	3	3
Kelompok B							
1.	Seni Budaya dan Prakarya	4	4	4	5	5	5
2.	Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan	4	4	4	4	4	4
Jumlah Alokasi Waktu Perminggu		34	46	40	43	43	43

Sumber: Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 165 Tahun 2014

Pada tabel di atas, tampak bahwa kurikulum MI memuat 11 mata pelajaran, dan mata pelajaran Seni Budaya dan Prakarya dapat memuat Bahasa Daerah. Bahasa Daerah sebagai muatan lokal dapat diajarkan secara terintegrasi dengan mata pelajaran Seni Budaya dan Prakarya atau diajarkan secara terpisah apabila daerah merasa perlu untuk memisahkannya. Satuan pendidikan dapat menambah jam pelajaran per minggu sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan tersebut.

Struktur kelompok mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dalam kurikulum Madrasah meliputi: 1) Al-Qur'an Hadis, 2) Akidah Akhlak, 3) Fikih, 4) Sejarah Kebudayaan Islam (SKI). Masing-masing mata pelajaran tersebut pada dasarnya saling terkait dan melengkapi.

- a) al-Qur'an-Hadis merupakan sumber utama ajaran Islam, dalam arti keduanya merupakan sumber akidah-akhlak, syari'ah/fikih (ibadah, muamalah), sehingga kajiannya berada di setiap unsur tersebut.
- (b) Akidah merupakan akar atau pokok agama. Syari'ah/fikih (ibadah, muamalah) dan akhlak bertitik tolak dari akidah, yakni sebagai manifestasi dan konsekuensi dari keimanan dan keyakinan hidup. Akhlak merupakan aspek sikap hidup atau kepribadian hidup manusia, yang mengatur hubungan manusia dengan Allah

swt. dan hubungan manusia dengan manusia lainnya. Hal itu menjadi sikap hidup dan kepribadian hidup manusia dalam menjalankan sistem kehidupannya.

- (c) Fikih merupakan sistem atau seperangkat aturan yang mengatur hubungan manusia dengan Allah swt. (*Hablum-Minallah*), sesama manusia (*Hablum-Minan-nas*), dan dengan makhluk lainnya (*Hablum Ma'al-Ghairi*).
- (d) Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) merupakan catatan perkembangan perjalanan hidup manusia muslim dari masa ke masa dalam beribadah, bermuamalah dan berakhlak serta dalam mengembangkan sistem kehidupan atau menyebarkan ajaran Islam yang dilandasi oleh akidah.

4. Kurikulum Pendidikan Agama Islam di SDIT Rabbani

Struktur kurikulum di SDIT Rabbani meliputi substansi pembelajaran yang ditempuh dalam satu jenjang pendidikan selama enam tahun mulai kelas I sampai kelas VI. Struktur kurikulum SDIT Rabbani disusun berdasarkan standar kompetensi lulusan dan kompetensi mata pelajaran dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Kurikulum SDIT Rabbani memuat mata pelajaran umum, muatan lokal dan pengembangan diri.
- b. Pembelajaran pada kelas I-III dilaksanakan melalui pendekatan tematik, sedangkan pada kelas IV-VI dilaksanakan melalui pendekatan mata pelajaran.

Struktur kurikulum di SDIT Rabbani selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.5
Struktur Kurikulum SDIT Rabbani

No.	Komponen	Alokasi Waktu	
		Kelas	
		I-III	IV-VI
A.	Mata Pelajaran		
	1. Pendidikan Agama Islam	3	3
	2. Pendidikan Kewarganegaraan	Tematik	2
	3. Bahasa Indonesia		5
	4. Matematika		5
	5. Ilmu Pengetahuan Alam		4
	6. Ilmu Pengetahuan Sosial		3
	7. Seni Budaya dan Keterampilan		4
	8. PJOK	3	4
B.	Muatan Lokal		
	1. Bahasa Daerah	2	2
	2. Baca Tulis al-Qur'an	2	2
	3. Bahasa Arab	2	2
C.	Pengembangan Diri	2*	2*
	1. Tauhid		
	2. Olahraga		
	3. Fiqih		
	4. Hadis		
	Jumlah	32	36

* Ekuivalen dua jam pelajaran dan dilaksanakan pada sore hari di luar jam belajar efektif.⁸⁶

Pada tabel di atas, tampak bahwa kurikulum SDIT Rabbani memuat delapan mata pelajaran pada kelompok A, pada Kelompok B atau muatan lokal terdapat tiga mata pelajaran, dan pada kelompok C atau pengembangan diri terdapat empat mata pelajaran.

Pada mata pelajaran kelompok A, pada umumnya sama dengan struktur kurikulum SD dan sesuai dengan struktur kurikulum berdasarkan Peraturan

⁸⁶Dokumen I KTSP 2006 dan Kurikulum 2013 SDIT Rabbani Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone, h. 11-13.

Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005. Pada mata pelajaran kelompok B, terdapat tiga mata pelajaran yang salah satunya merupakan mata pelajaran khusus untuk Madrasah Ibtidaiyah (MI) yang tidak terdapat di SD. Pada kelompok C atau pengembangan diri terdapat tiga mata pelajaran yang termasuk dalam kelompok mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di MI yaitu: Tauhid, Fiqih dan Hadis dan terdapat satu mata pelajaran yang termasuk dalam kelompok mata pelajaran A di SD dan mata pelajaran kelompok B di MI yaitu olahraga.

Kegiatan ekstrakurikuler terdiri dari: kewiraan, olahraga, tauhid, fiqih dan hadis. Kegiatan ekstrakurikuler ini sama dengan yang terdapat dalam pengembangan diri. Adapun kegiatan-kegiatan tambahan yang merupakan ciri khas dari SDIT Rabbani antara lain:

Kegiatan pembiasaan:

- a. Pembiasaan rutin: salat berjamaah; pengajian mentari pagi; upacara bendera; dan tadarrus al-Qur'an
- b. Pembiasaan terprogram: pesantren ramadhan dan baca tulis al-Qur'an.

Kegiatan keteladanan:

- a. Pembinaan ketertiban berpakaian seragam anak sekolah (PSAS)
- b. Pembinaan kedisiplinan
- c. Penanaman nilai akhlak Islam
- d. Penanaman budaya minat baca
- e. Penanaman budaya keteladanan
- f. Penanaman budaya bersih diri
- g. Penanaman budaya bersih lingkungan kelas dan sekolah
- h. Penanaman budaya lingkungan hijau⁸⁷

⁸⁷Dokumen I KTSP 2006 dan Kurikulum 2013 SDIT Rabbani Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone, h. 16.

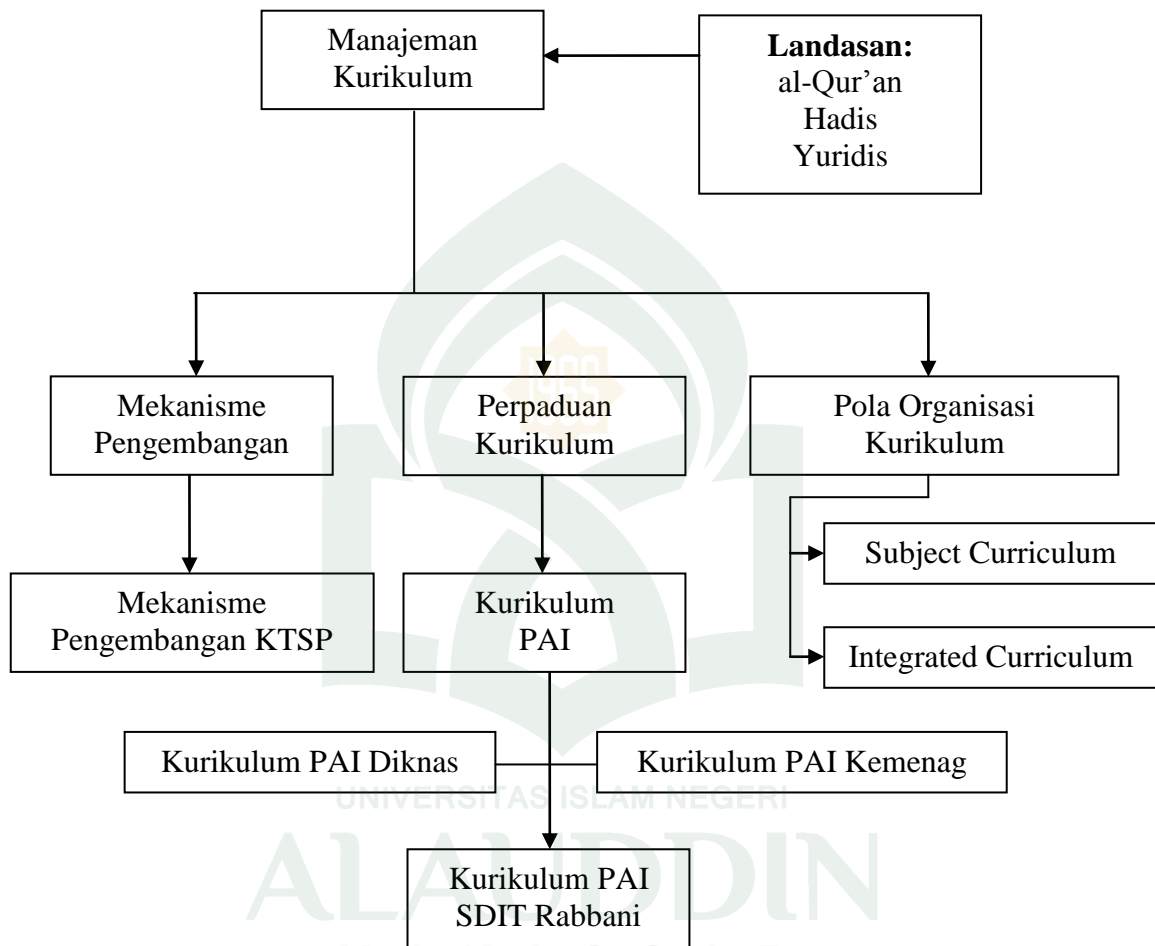
Kegiatan-kegiatan pembiasaan dan keteladanan tersebut merupakan ciri khas dari kurikulum SDIT Rabbani.

F. *Kerangka Konseptual*

Kerangka konseptual yang dimaksud dalam penelitian ini adalah alur pikir yang dijadikan acuan dalam memahami masalah yang diteliti. Penelitian ini berfokus pada proses dan pelaksanaan manajemen kurikulum Pendidikan Agama Islam di SDIT Rabbani Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone. Untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang arah penelitian ini, maka digambarkan dalam bentuk kerangka konseptual sebagai kontrol dalam melakukan penelitian lebih lanjut. Hal ini dapat dilihat pada bagan kerangka konseptual sebagai berikut:



Gambar 2.1
Bagan Kerangka Konseptual



Pada bagan di atas, dapat dilihat bahwa landasan dari proses manajemen kurikulum ada tiga, yaitu al-Qur'an, hadis, dan yuridis. Landasan yang bersumber dari al-Qur'an terdapat pada QS al-'Alaq/96: 1-5, sedangkan landasan yang bersumber dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakar Ahmad Ibn al-Husayn Ibn 'Ali al-Bayhaqiy, dan yang menjadi landasan yuridis adalah undang-undang atau peraturan pemerintah. Undang-undang atau peraturan pemerintah tersebut antara

lain: Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 22 Tahun 2006; No. 23 Tahun 2006; No. 24 Tahun 2006; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 54 Tahun 2013; No. 64 Tahun 2013; No. 67 Tahun 2013; No. 81a Tahun 2013; No. 61 Tahun 2014; No. 20 Tahun 2016; No. 21 Tahun 2016; Keputusan Menteri Agama Nomor: 165 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005; No. 19 Tahun 2005; dan PP No. 13 Tahun 2015.

Masalah yang diteliti dalam proses manajemen kurikulum terbagi menjadi tiga bagian, yaitu: 1) Mekanisme pengembangan kurikulum dalam hal ini adalah Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan; 2) Perpaduan kurikulum, yaitu perpaduan kurikulum Pendidikan Agama Islam yang terdiri dari kurikulum PAI Diknas, kurikulum PAI Kemenag, dan kurikulum PAI institusi; 3) Pola Organisasi Kurikulum yang secara garis besar terbagi menjadi dua, yaitu *subject curriculum* dan *integrated curriculum*.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian dalam tesis ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur statistik atau dengan cara-cara kuantifikasi.¹ Penelitian ini mencari dan menggunakan data-data yang bersifat kualitatif untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.²

Penelitian ini berusaha untuk mendeskripsikan atau menggambarkan data yang diperoleh dari lapangan atau literatur kepustakaan yang berkaitan dengan manajemen kurikulum PAI di SDIT Rabbani. Dengan penelitian ini, diharapkan terdapat data yang berupa kata atau makna untuk menjelaskan keadaan yang sebenarnya secara mendalam apa yang dilakukan oleh SDIT Rabbani Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone dalam melaksanakan manajemen kurikulum Pendidikan Agama Islam.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat di mana penulis melakukan penelitian tesis yakni di SDIT Rabbani Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan.

¹M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), h. 25.

²Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* (Cet. XXXII; Yogyakarta: PT Remaja Rosdakarya, 2014), h. 4.

Penulis memilih SDIT Rabbani sebagai tempat penelitian karena beberapa alasan antara lain: lokasi SDIT Rabbani berdekatan dengan tempat tugas mengajar penulis yang hanya berjarak sekitar 400 meter; SDIT Rabbani merupakan Sekolah Dasar Islam Terpadu pertama di Kabupaten Bone; SDIT Rabbani memiliki beberapa keunikan antara lain, jumlah siswa yang relatif lebih banyak dibanding sekolah dasar negeri yang lokasinya berdekatan dengan SDIT Rabbani dan waktu sekolah yang hanya berlangsung selama lima hari.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan merupakan upaya yang dilakukan untuk mencapai target yang sudah ditentukan dalam tujuan penelitian. Menurut Suharsimi Arikunto walaupun masalah penelitiannya sama, tetapi kadang-kadang peneliti dapat memilih satu di antara dua atau lebih jenis pendekatan yang bisa digunakan dalam memecahkan masalah.³

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan metodologis dan pendekatan keilmuan yang meliputi:

1. Pendekatan Metodologis

Pendekatan yang bersifat metodologis yaitu pendekatan fenomenologis yang mengamati fenomena atau gejala yang tampak dari objek penelitian.

2. Pendekatan Keilmuan

- a. Pendekatan Paedagogis, yaitu pendekatan yang berpandangan bahwa manusia merupakan makhluk Tuhan yang berada dalam pertumbuhan dan perkembangan

³Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Cet. XIV; Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 108.

jasmani dan rohani yang memerlukan bimbingan dan pengarahan melalui proses pendidikan.

- b. Pendekatan Sosiologis, yaitu pendekatan yang berpandangan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang saling berinteraksi satu sama lain untuk mencapai suatu tujuan.
- c. Pendekatan Psikologis, yaitu pendekatan yang digunakan peneliti untuk mendalami berbagai gejala psikologis yang muncul dari pelaku pendidikan mulai dari kepala sekolah, dewan guru, dan seterusnya.

C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Informan

Adapun yang dijadikan sebagai informan atau narasumber adalah Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, Guru mata pelajaran PAI, Guru mata pelajaran Tauhid, Guru mata pelajaran Fiqhi, dan Guru mata pelajaran Hadis. Jumlah informan sebanyak 6 orang.

2. Dokumen

Dokumen-dokumen yang digunakan antara lain dokumen sekolah tentang kurikulum seperti dokumen 1 KTSP SDIT Rabbani, notulen rapat (daftar hadir dan berita acara rapat) yang berkaitan dengan proses manajemen kurikulum dan beberapa undang-undang atau peraturan yang berkaitan dengan masalah penelitian ini. Undang-undang atau peraturan tersebut antara lain: Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 22 Tahun 2006; No. 23 Tahun 2006; No. 24 Tahun 2006; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 54 Tahun 2013; No. 64 Tahun 2013; No. 67 Tahun 2013; No. 81a Tahun 2013; No. 61 Tahun 2014; No. 20 Tahun 2016; No.

21 Tahun 2016; Keputusan Menteri Agama Nomor: 165 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005; No. 19 Tahun 2005; dan PP No. 13 Tahun 2015.

D. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data penelitian, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, interview/wawancara, dan dokumentasi.

1. Metode observasi

Metode observasi (pengamatan) merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku kegiatan, benda-benda, waktu, peristiwa, tujuan dan perasaan.⁴ Metode observasi yang digunakan pada penelitian ini adalah observasi non partisipatif di mana peneliti hanya bertindak sebagai pengamat. Metode observasi ini digunakan untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan proses manajemen kurikulum di SDIT Rabbani Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone. Dalam hal ini proses yang diamati tidak bisa dilakukan secara keseluruhan atau mulai dari awal sampai akhir karena memerlukan waktu yang lama. Proses yang diamati secara langsung hanya pada proses pelaksanaan kurikulum.

2. Metode wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal, semacam percakapan yang bertujuan memperoleh data yang mendalam dari komunikasi tersebut yang dilakukan secara berhadapan.⁵ Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan

⁴M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 165.

⁵S. Nasution, *Metode Research* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h. 113.

jawaban atas pertanyaan itu.⁶ Metode wawancara ini dilakukan terhadap informan penelitian. Wawancara dilakukan untuk menggali data tentang proses manajemen kurikulum Pendidikan Agama Islam di SDIT Rabbani, mekanisme penyusunan dan pengembangan KTSP di SDIT Rabbani, pola organisasi kurikulum dan perpaduan kurikulum Pendidikan Agama Islam yang digunakan atau dilaksanakan di SDIT Rabbani Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone.

3. Metode Dokumentasi

Dalam dokumentasi, yang diteliti adalah dokumen yang dalam konsep umum terbatas hanya pada bahan-bahan tertulis saja dalam berbagai kegiatan.⁷ Metode dokumentasi pada penelitian ini digunakan untuk mendapatkan data profil, sejarah sekolah serta informasi yang berasal dari dokumen yang berkaitan dengan manajemen kurikulum PAI di SDIT Rabbani Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone. Dokumen-dokumen yang diteliti untuk mendapatkan data atau informasi antara lain dokumen yang berkaitan dengan proses manajemen kurikulum (notulen rapat dan sebagainya), dokumen KTSP, serta dokumen atau naskah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kurikulum.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat-alat yang digunakan untuk memperoleh atau mengumpulkan data dalam rangka memecahkan masalah penelitian atau menggapai tujuan penelitian.⁸ Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa:

⁶Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, h. 168.

⁷S. Nasution, *Metode Research*, h. 115.

⁸Muh. Khalifah Mustami, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Yogyakarta: Aynat Publishing, 2015), h. 100.

1. *Cheklis*t dan catatan observasi yang peneliti lakukan saat pengamatan pada kegiatan yang berkaitan dengan manajemen kurikulum di SDIT Rabbani Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone.
2. Pedoman wawancara (*interview*) kepada informan yang terkait untuk mengetahui proses manajemen kurikulum PAI di SDIT Rabbani Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone.
3. Catatan dokumentasi digunakan untuk mencatat dokumen-dokumen tertulis/arsip-arsip yang terkait dengan proses/pelaksanaan manajemen kurikulum PAI di SDIT Rabbani Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Metode atau teknik analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti, serta menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Untuk meningkatkan pemahaman tentang analisis data, perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna. Proses analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan seiring dengan proses pengumpulan data. Dengan demikian pekerjaan mengumpulkan data bagi peneliti ini diikuti dengan menuliskan, mengedit, mengklasifikasi, mereduksi, menyajikan dan menarik kesimpulan atau verifikasi.

Adapun alur analisis data yang ditempuh menggambarkan proses analisis data kualitatif sebagai berikut.

1. Pengumpulan data

Data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dicatat dalam catatan lapangan yang terdiri dari dua bagian yaitu deskriptif dan reflektif. Catatan deskriptif adalah catatan alami, catatan tentang apa yang dilihat, didengar,

disaksikan dan dialami sendiri oleh peneliti tanpa adanya pendapat dan penafsiran dari peneliti terhadap fenomena yang dialami. Catatan reflektif adalah catatan yang berisi kesan, komentar, pendapat, dan tafsiran peneliti tentang temuan yang dijumpai, dan merupakan bahan rencana pengumpulan data untuk tahap berikutnya.

2. Reduksi data

Reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan, perhatian dan penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan lapangan. Reduksi data juga merupakan bagian dari analisa data yang mempertegas, memperpendek, dan memilih data yang dipakai dan membuang yang tidak penting kemudian mengatur data sedemikian rupa sehingga memberikan gambaran tentang hasil pengamatan.

Dalam reduksi data ini, peneliti memilih dan memisahkan mana yang sesuai dengan permasalahan dan mana yang tidak sesuai dengan permasalahan. Data yang tidak sesuai dibuang agar tidak terjadi kerancuan dalam penyajian data.

3. Penyajian data

Penyajian data diartikan sebagai sekumpulan informasi yang tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan melihat suatu penyajian data, pada penelitian akan diketahui apa yang terjadi dan memungkinkan untuk mengerjakan sesuatu pada analisis atau tindakan lain. Kemudian data yang sudah direduksi disajikan dalam bentuk teks naratif, matriks dan gambar. Penyajian data tersebut diupayakan sesistematis mungkin agar mudah dipahami interaksi antar bagian dalam konteks yang utuh dan tidak terlepas satu sama lain. Dengan keterpaduan akan memungkinkan bagi peneliti untuk menarik kesimpulan.

4. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan yaitu dengan cara data yang terkumpul dicari hubungan persamaannya, kemudian disimpulkan. Kesimpulan sementara yang sudah didapat lalu diverifikasi, difokuskan untuk lebih memperoleh kesimpulan yang lebih valid.

G. Pengujian Keabsahan Data

Teknik keabsahan data adalah suatu teknik yang digunakan untuk membuktikan apakah penelitian tersebut benar-benar ilmiah, sekaligus juga untuk meningkatkan derajat kepercayaan data yang diperoleh peneliti. Validitas dalam penelitian kualitatif mengacu pada apakah temuan penelitian secara akurat mencerminkan situasi dan didukung oleh bukti.

Dalam penelitian ini peneliti dalam mencari validitas atau keabsahan data menggunakan teknik triangulasi data. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau perbandingan terhadap data itu.⁹

Teknik triangulasi data dilakukan dengan membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dari data observasi, wawancara maupun dokumentasi. Hal ini dapat dicapai dengan cara: (1) Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara; (2) Membandingkan dengan apa yang dikatakan informan yang satu dengan informan yang lain; (3) Membandingkan keadaan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat orang lain; (4) Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.¹⁰

⁹Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, h. 330.

¹⁰Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, h. 331.

Teknik triangulasi yang dilakukan pada penelitian ini adalah

- 1) Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara;
- 2) Membandingkan hasil wawancara antara informan yang satu dengan informan yang lain; dan
- 3) Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Profil SDIT Rabbani

Sekolah Dasar Islam Terpadu Rabbani dirintis pada awal Tahun 2011. Secara struktural sekolah ini berada di bawah pengawasan dan pembinaan Departemen Pendidikan Nasional serta bernaung di bawah Yayasan Ibnu Qayyim. Yayasan ini dibentuk dan didirikan oleh beberapa orang, diantaranya adalah Dr. Sabruddin sebagai Ketua, Aliyas Hammude, S.Pt. sebagai Sekretaris dan Hamdan, SE., S.Pd. sebagai Bendahara.

Bangunan sekolah pada saat itu masih menumpang pada lokasi sekretariat lembaga muslimah yang menempati bangunan berukuran 3 x 4 m² selama 2 tahun. Pada tahun pelajaran 2012/2013, pengurus yayasan merasakan animo masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di sekolah tersebut sangat tinggi. Ibarat gayung bersambut, pada tahun itu juga, pihak yayasan mendapat amanah baru untuk menggunakan dan menempati sebuah bangunan dengan fasilitas yang cukup memadai untuk melaksanakan proses pembelajaran yang lebih kondusif, sehingga pengurus yayasan mulai tahun itu juga memindahkan peserta didik dan memulai proses pembelajaran di bangunan tersebut.

Bangunan tersebut memiliki fasilitas seperti masjid yang cukup luas sebagai sarana ibadah, kelas yang representatif sebanyak 8 ruangan, WC, kantin, ruang UKS, dan kantor yang digunakan sebagai ruang guru. Sampai sekarang ini, Alhamdulillah, proses perkembangan jumlah peserta didik semakin meningkat dan pihak yayasan

berupaya melakukan pengelolaan secara intensif terhadap lembaga ini demi terwujudnya proses pendidikan yang lebih baik.

Berikuti ini merupakan identitas SDIT Rabbani

1. Nama Sekolah/Madrasah : SDIT Rabbani
2. Nomor Statistik Sekolah : 102190725 005
NPSN : 69788071
3. Alamat Sekolah
 - a. Jalan : Urip Sumoharjo Km. 1
 - b. Kelurahan : Walannae
 - c. Kecamatan : Tanete Riattang
 - d. Kabupaten : Bone
 - e. Kode Pos :
 - f. Telepon : 085242890529/085237119419
 - g. E-mail : sditrabbani@gmail.com
 - h. Website : -
4. Status Sekolah : Swasta
5. Badan Penyelenggara : Yayasan Ibnu Qayyim
6. Akte Notaris : Nomor: C-141.HT.30.01 – Th. 2006
7. No. Akte Pendirian Terakhir : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan No. 395 Tahun 2012
8. Tahun Berdiri Sekolah : 2011
9. Kepala Sekolah yang Pertama : Sudarmi, S.Pd.
10. Kepala Sekolah Sekarang : A. Tajuddin, S.Pd.
11. Keadaan Gedung : Permanen/Darurat
12. Jumlah Guru : 24 Orang (Lk. 4 dan Pr. 20)
13. Jumlah Murid : 317 Orang¹

¹Profil Sekolah Dasar Islam Terpadu Rabbani Watampone, Yayasan Pendidikan Ibnu Qayyim Tahun 2017/2018.

a. Visi, Misi, dan Tujuan Sekolah

1) Visi

Menjadi sekolah Islam unggulan, teladan, cerdas dan berkarakter.

2) Misi

- a) Memiliki dan membentuk pribadi anak yang berakidah sahih, cerdas, kreatif, berkarakter, mandiri, dan berakhlak mulia.
- b) Menetapkan sistem pembelajaran modern yang ditunjang oleh sarana yang memadai.
- c) Melaksanakan pembinaan guru secara berkelanjutan yang mengarah kepada profesionalisme, amanah, dan bertanggungjawab.
- d) Menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif menuju komunitas belajar.
- e) Menggalang peran serta masyarakat dalam pengembangan sekolah.

3) Tujuan

- a) Meningkatkan pengetahuan siswa terhadap pemahaman agama yang benar sesuai dengan manhaj (metode para ulama salaf).
- b) Menciptakan sistem kepemimpinan yang baik.
- c) Meningkatkan profesionalisme, amanah, dan tanggung jawab guru melalui tarbiyah dan pelatihan.
- d) Meningkatkan pembinaan rohani siswa dengan menerapkan konsep *tazkiyatunnufus* (penyucian jiwa).
- e) Menjadikan lingkungan sekolah sebagai sumber belajar.
- f) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengembangan sekolah.²

²Dokumen I KTSP 2006 dan Kurikulum 2013 SDIT Rabbani Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone.

b. Keadaan Peserta Didik

Tabel 4.1

Keadaan Peserta Didik SDIT Rabbani Tahun Pelajaran 2017/2018

No.	Kelas	Tahun Pelajaran 2017/2018			
		L	P	Jumlah	Jumlah Kelas
1	I	32	24	56	2
2	II	32	31	63	2
3	III	28	32	60	2
4	IV	32	30	62	2
5	V	27	20	47	2
6	VI	15	14	29	1
Jumlah		166	151	317	11

Sumber: Buku Profil SDIT Rabbani 2017

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah peserta didik di SDIT Rabbani pada tahun pelajaran 2017-2018 tercatat sebanyak 317 orang. Setiap kelas mulai dari kelas satu sampai kelas lima terbagi ke dalam 2 kelas kecuali kelas enam yang hanya terdiri dari satu kelas. Jadi total kelas di SDIT Rabbani berjumlah 11 kelas. Hal ini menjadi kebanggaan dan tantangan tersendiri bagi pihak SDIT Rabbani karena mendapat kepercayaan yang tinggi dari masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di SDIT Rabbani. Jumlah peserta didik SDIT Rabbani terbilang cukup besar dibanding jumlah peserta didik yang ada di sekolah-sekolah dasar negeri yang ada di sekitar lokasi SDIT Rabbani.

c. Keadaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Di SDIT Rabbani pada Tahun pelajaran 2017/2018 terdapat 21 guru dan 2 orang pegawai. Dari 21 guru tersebut, 10 orang sebagai guru kelas, 4 orang guru mata pelajaran, 5 orang guru pendamping, dan 2 orang guru mulok. Keamanan atau *security* sebanyak 1 orang dan 1 orang bujang sekolah. Oprator sekolah merangkap sebagai guru mata pelajaran PJOK dikarenakan belum adanya tenaga pengajar khusus yang berlatar belakang pendidikan olahraga atau PJOK.

Sedangkan pendidikan guru rata-rata berkualifikasi sarjana (S1) kecuali empat orang yang belum berkualifikasi sarjana (S1) dan empat orang yang kualifikasi sarjana (S1) non kependidikan. Dari segi status, semua pendidik dan tenaga kependidikan di SDIT Rabbani berstatus non PNS.

Untuk lebih jelasnya, penulis sajikan tentang keadaan pendidik dan tenaga kependidikan SDIT Rabbani pada tabel berikut ini.

Tabel 4.2

Keadaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tahun Pelajaran 2017/2018

NO.	NAMA	L/P	JENJANG PENDIDIKAN	JABATAN
1	A. TAJUDDIN, S.Pd.	L	S1	Kepala Sekolah
2	PATMAWATI, S.Pd.	P	S1	Waka Kurikulum/ Guru Kelas
3	A. MATAHARI, S.Pd.	P	S1	Guru Kelas
4	ROSTINA, S.Pd.	P	S1	Waka Akademik/ Guru Kelas
5	ROSDIANA, S.Hi.	P	S1	Guru Mapel
6	A. MARLINI, S.Pd.	P	S1	Guru Pendamping
7	A. ASTRINIKA HAIKAL, S.Sos.	P	S1	Guru Kelas
8	NURMILAYANTI, A.Ma.	P	D2	Guru Mapel
9	ENNI BIBIANA, S.Pd.	P	S1	Guru Kelas
10	NURSIAH, S.Sos.	P	S1	Guru Kelas
11	A. SRI SURYANI, S.Psi.	P	S1	Guru Kelas
12	ANGRIANI. T, S.Pd.	P	S1	Guru Pendamping
13	IKA PURNAMASARI, S.Pd.	P	S1	Guru Pendamping

14	FITRIANI, S.Pd.	P	S1	Guru Kelas
15	HESTI NOVIANTI, S.Pd.	P	S1	Guru Mulok
16	ANDI RISKHA SARTINA, S.Pd.	P	S1	Guru Kelas
17	NURFADILA, S.Pd.	P	S1	Guru Kelas
18	MUSYAHIDAH, S.Pd.I	P	S1	Guru Mapel
19	A. KARYAWATI, S.Pd.	P	S1	Guru Pendamping
20	SITTI KHADIJAH	P	SMA	Guru Pendamping
21	MUHAMMAD TAQIYUDDIN	L	SMA	Guru Mulok
22	RUSTANG	L	SMA	Keamanan
23	HENDRA SAPUTRA	L	SMA	Operator/Guru Mapel
24	NAWIR	L	SMA	Bujang Sekolah

Sumber: SK Kepala SDIT Rabbani tentang Pembagian Tugas Mengajar Tahun Pelajaran 2017/2018

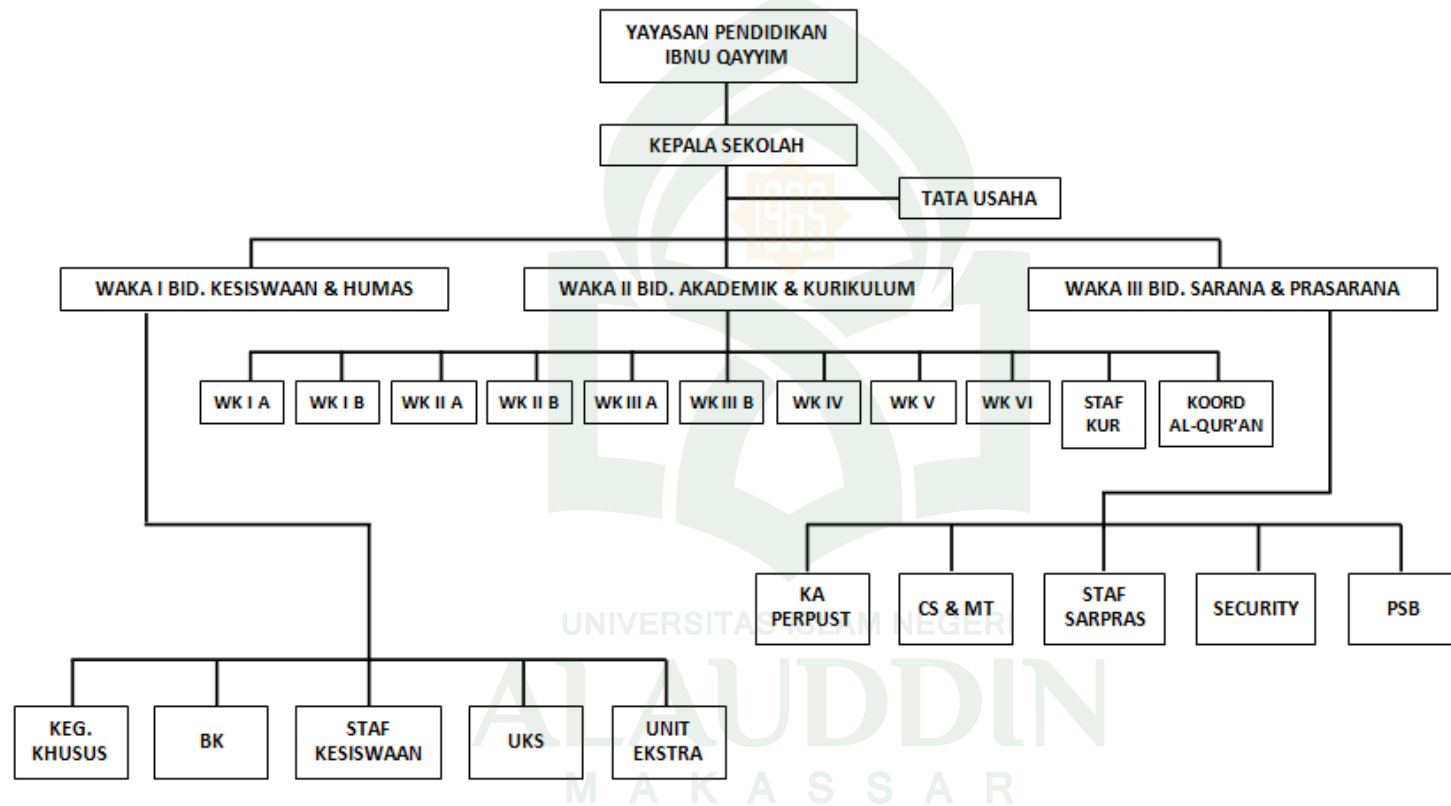
d. Struktur Organisasi

Organisasi yang baik adalah adanya kelompok orang yang melakukan kerjasama dengan teratur dan harmonis untuk mencapai tujuan tertentu. Kerjasama ini terdapat dalam suatu sistem yang telah diatur dan terencana dengan baik dalam suatu bagan atau struktur yang telah ditetapkan dan bekerja sesuai dengan struktur yang ada.

Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal yang di dalamnya terdapat berbagai unsur, dan unsur-unsur tersebut memerlukan suatu tuntunan dan aturan kerjasama yang baik dalam mengkoordinir pelaksanaan tugas demi kelancaran penyelenggaraan program pengajaran di sekolah tersebut.

Adapun struktur organisasi SDIT Rabbani adalah sebagai berikut:

STRUKTUR ORGANISASI SDIT RABBANI



Gambar 4.1. Struktur Organisasi SDIT Rabbani
(Sumber: Buku Profil SDIT Rabbani 2017)

2. Manajemen Kurikulum di SDIT Rabbani

a. Perencanaan Kurikulum

Perencanaan kurikulum yang baik menentukan keberhasilan dalam pencapaian tujuan pendidikan. Perencanaan kurikulum berfungsi sebagai pedoman yang berisi petunjuk tentang jenis dan sumber peserta yang diperlukan, media penyampaian, tindakan yang perlu dilakukan, sumber biaya, tenaga, sarana yang diperlukan, dan evaluasi.

Perencanaan kurikulum di SDIT Rabbani dilakukan setiap satu tahun sebelum tahun ajaran baru dimulai, kepala sekolah dan tim pengembang kurikulum SDIT Rabbani melaksanakan rapat untuk menentukan kegiatan dan pelaksanaannya serta kebutuhan peserta didik agar visi dan misi dan tujuan dari SDIT Rabbani dapat tercapai secara optimal. Hasil dari rapat tersebut secara garis besar adalah kurikulum yang digunakan, agenda kegiatan satu semester atau satu tahun pelajaran, sarana dan prasarana yang perlu disiapkan, evaluasi dan pertanggungjawaban dari masing-masing guru.

Dalam tahap perencanaan, tanggung jawab guru selanjutnya adalah mengembangkan Silabus dan RPP bidang studi sesuai kurikulum yang disepakati, yang nantinya diterapkan pada proses pembelajaran di kelas. Guru PAI dan guru mapel (Tauhid, Fiqhi, dan Hadis) di SDIT Rabbani telah mengembangkan Silabus dan RPP yang sesuai dengan kurikulum yang telah disepakati oleh Tim Pengembang Kurikulum dan diketahui oleh kepala sekolah sebagai manajer sekolah.

Perencanaan kurikulum di SDIT Rabbani juga menggunakan analisis kebutuhan, menentukan desain kurikulum, dan membuat rencana induk (*master plan*) berupa pengembangan, pelaksanaan, dan penilaian.

b. Organisasi Kurikulum

Organisasi kurikulum sangat terkait dengan pengaturan bahan pelajaran yang ada di dalam kurikulum yang telah ditetapkan dalam tahap perencanaan. Pendidikan Agama Islam didasarkan pada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang berasal dari Dinas Pendidikan yang dipadukan dengan kurikulum Yayasan Ibnu Qayyim (Wahdah Islamiyah) dan dimodifikasi sehingga tercapai target pembelajaran yang terkandung dalam KTSP dan target khusus yang diinginkan oleh pihak sekolah dan yayasan. Kurikulum PAI yang digunakan tetap mengacu kepada kurikulum Dinas Pendidikan untuk mengantisipasi keseragaman soal-soal ujian atau ulangan seperti ulangan akhir semester (UAS) dan ulangan akhir sekolah (UAS) yang biasanya dibuat di tingkat kabupaten oleh satu tim.

Kurikulum PAI di SDIT Rabbani terdiri dari beberapa mata pelajaran (Tauhid, Fiqhi, dan Hadis) dan kegiatan ekstrakurikuler yang terdiri dari: Kewiraan, Olahraga, Tauhid, Fiqih dan Hadis. Adapun kegiatan-kegiatan tambahan yang merupakan ciri khas dari SDIT Rabbani antara lain:

Kegiatan pembiasaan:

- 1) Pembiasaan rutin: salat berjamaah; pengajian mentari pagi; upacara bendera; dan tadarrus al-Qur'an
- 2) Pembiasaan terprogram: pesantren ramadhan dan baca tulis al-Qur'an.

Kegiatan keteladanan:

- 1) Pembinaan ketertiban berpakaian seragam anak sekolah (PSAS)
- 2) Pembinaan kedisiplinan
- 3) Penanaman nilai akhlak Islam
- 4) Penanaman budaya minat baca
- 5) Penanaman budaya keteladanan

- 6) Penanaman budaya bersih diri
- 7) Penanaman budaya bersih lingkungan kelas dan sekolah
- 8) Penanaman budaya lingkungan hijau

Pengorganisasian kurikulum di SDIT Rabbani menggunakan beberapa tahap pengembangan antara lain: penentuan struktur dan isi program; pemilihan dan pengorganisasian materi; pengorganisasian kegiatan pembelajaran; pemilihan sumber, alat, dan sarana belajar; serta penentuan cara mengukur hasil belajar atau evaluasi hasil belajar peserta didik.

c. Pelaksanaan Kurikulum

Pelaksanaan kurikulum dibagi menjadi dua tingkatan yaitu pelaksanaan kurikulum tingkat sekolah dan tingkat kelas. Hal tersebut nampak pada hasil wawancara dengan Kepala Sekolah yang menyatakan bahwa Manajemen Kurikulum PAI ditentukan oleh kepala sekolah beserta Tim pengembang kurikulum dalam rapat perencanaan dan pembelajaran di kelas menjadi tanggung jawab guru masing-masing. Dalam tingkat sekolah, yang berperan adalah kepala sekolah, dan pada tingkatan kelas yang berperan adalah guru. Walaupun dibedakan antara tugas kepala sekolah dan tugas guru dalam pelaksanaan kurikulum serta diadakan perbedaan dalam tingkat pelaksanaan administrasi, yaitu tingkat kelas dan tingkat sekolah, namun antara kedua tingkat dalam pelaksanaan administrasi kurikulum tersebut senantiasa bergandengan dan bersama-sama bertanggungjawab melaksanakan proses administrasi kurikulum. Hal tersebut nampak dari hasil wawancara dengan Kepala SDIT Rabbani yang menyatakan bahwa peran kepala sekolah dalam manajemen Kurikulum adalah memimpin rapat dalam menyusun rencana tahunan, melakukan pembinaan kurikulum, *controlling* pelaksanaan berbagai program sekolah dan melakukan bimbingan untuk ustadz dan ustadzah.

1) Pelaksanaan Kurikulum Tingkat Sekolah

Pada tingkat sekolah, kepala sekolah yang bertindak sebagai manajer bertanggung jawab melaksanakan kurikulum di lingkungan sekolah yang dipimpinnya. Kepala sekolah berkewajiban melakukan kegiatan-kegiatan yakni menyusun rencana tahunan, memimpin rapat, membuat statistik dan menyusun laporan serta memonitoring pelaksanaan kurikulum tingkat kelas melalui laporan yang disampaikan oleh guru.

2) Pelaksanaan Kurikulum Tingkat Kelas

SDIT Rabbani menggunakan Kurikulum Pendidikan Agama Islam yang berasal dari Dinas Pendidikan yang dipadukan dengan kurikulum yayasan dan dimodifikasi sehingga tercapai target pembelajaran yang terkandung dalam KTSP dan target khusus yang diinginkan oleh pihak sekolah dan yayasan sebagaimana yang telah disampaikan oleh kepala sekolah dalam wawancaranya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala SDIT Rabbani, dalam pelaksanaannya bahan ajar Pendidikan Agama Islam dari KTSP tetap diajarkan secara utuh seperti di sekolah dasar pada umumnya. Mata pelajaran Tauhid, Fiqhi, dan Hadis diajarkan terpisah untuk lebih mengintensifkan pembelajaran pada mata pelajaran tersebut dengan alasan penambahan muatan/konten pelajaran yang lebih banyak dan beragam contoh-contoh yang dapat diberikan untuk lebih menambah pemahaman peserta didik.³

Berdasarkan wawancara dengan salah satu guru mata pelajaran (Fiqhi), dan analisis dokumen kurikulum (silabus dan RPP), RPP disusun oleh masing-masing guru berdasarkan SK dan KD dari Dinas Pendidikan. Format silabus dan RPP yang digunakan pada intinya sama dengan yang digunakan oleh guru-guru di sekolah umum.⁴ Seperti halnya kegiatan belajar pada umumnya, tahapan pembelajaran Pendidikan Agama Islam di kelas dimulai dengan kegiatan pendahuluan, kegiatan

³A. Tajuddin, Kepala SDIT Rabbani, *Wawancara*, Watampone, 31 Juli 2017.

⁴Musyahidah, Guru Fiqhi SDIT Rabbani, *Wawancara*, Watampone, 4 Agustus 2017.

inti dan kegiatan penutup yang di dalamnya telah mencakup kegiatan eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi.

d. Evaluasi

Evaluasi bertujuan untuk mengumpulkan, menganalisis dan menyajikan data untuk penentuan keputusan mengenai kurikulum apakah akan direvisi atau diganti. Evaluasi kurikulum memegang peranan penting baik dalam penentuan kebijaksanaan pendidikan pada umumnya, maupun pada pengambilan keputusan dalam kurikulum. Hasil-hasil evaluasi kurikulum juga dapat digunakan oleh guru-guru, kepala sekolah dan para pelaksana pendidikan lainnya, dalam memahami dan membantu perkembangan peserta didik, memilih bahan pelajaran, memilih metode dan alat-alat bantu pelajaran, cara penilaian serta fasilitas pendidikan lainnya. Komponen-komponen yang penting untuk dievaluasi antara lain: evaluasi tujuan pendidikan; evaluasi terhadap isi/materi kurikulum; evaluasi terhadap strategi pembelajaran; evaluasi terhadap program penilaian.

Evaluasi tujuan pendidikan, evaluasi terhadap isi/materi kurikulum, dan evaluasi terhadap program penilaian dilakukan pada setiap akhir tahun pelajaran dan sebelum memasuki tahun pelajaran baru. Evaluasi ini dilaksanakan sebelum proses perencanaan kurikulum pada awal tahun pelajaran baru. Sedangkan evaluasi terhadap strategi pembelajaran yang merupakan evaluasi terhadap pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh guru terutama di dalam kelas guna mengetahui apakah strategi pembelajaran yang dilaksanakan dapat berhasil dengan baik dilaksanakan di setiap akhir kegiatan supervisi yang dilaksanakan oleh kepala sekolah.

Kepala sekolah dibantu guru atau pendidik dalam hal ini Tim pengembang kurikulum, melakukan evaluasi dalam pengembangan dan pelaksanaan kurikulum.

Kepala sekolah selain melakukan evaluasi dari pengamatan langsung terhadap pelaksanaan kurikulum, khususnya Pendidikan Agama Islam di lingkungan sekolahnya, kepala sekolah juga melakukan evaluasi melalui hasil observasi dan supervisi pembelajaran di kelas. Hasil dari evaluasi tersebut berguna untuk perbaikan penyusunan dan pengembangan kurikulum pada jenjang berikutnya dan tahun berikutnya.

3. Mekanisme Penyusunan dan Pengembangan KTSP di SDIT Rabbani

Penyusunan KTSP merupakan bagian dari kegiatan perencanaan sekolah/madrasah. Kegiatan ini dapat berbentuk rapat kerja dan/atau lokakarya sekolah/madrasah dan/atau kelompok sekolah/madrasah yang diselenggarakan sebelum tahun pelajaran baru.

Merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014, penyusunan dan pengembangan KTSP secara garis besar meliputi: (1) penyusunan draf berdasarkan analisis konteks; (2) reviu, revisi, dan finalisasi; serta (3) pengesahan oleh pejabat yang berwenang.

Mekanisme tersebut dirinci oleh BAN-SM melalui tujuh kegiatan pokok dalam pengembangan kurikulum KTSP yaitu:

- 1) Melibatkan tim pengembang (guru, kepala sekolah/madrasah, komite sekolah/madrasah), sesuai SK Kepala sekolah/madrasah;
- 2) Dilakukan melalui pertemuan, seperti: workshop, bimbingan teknis, dan lain-lain;
- 3) Kegiatan reviu dan revisi;
- 4) Menghadirkan narasumber (ahli pendidikan, praktisi pendidikan, Dewan Pendidikan, Dinas Pendidikan/Kemenag Kabupaten/Kota, dan Pemda);

- 5) Tahap finalisasi;
- 6) Pemantapan dan penilaian dokumen KTSP oleh Tim Pengembang berdasarkan petunjuk teknis Penyusunan KTSP; serta
- 7) Mendokumentasikan hasil pengembangan kurikulum yang ditandatangani Dinas Pendidikan/Kemenag Kabupaten/Kota.⁵

Berdasarkan hasil observasi yang menggunakan daftar cek (*checklist*) tentang mekanisme penyusunan KTSP, di SDIT Rabbani mekanisme penyusunan KTSP dilakukan melalui 5 kegiatan pokok. Kegiatan-kegiatan pokok yang dilaksanakan yaitu:

- 1) Melibatkan tim pengembang (guru, kepala sekolah/madrasah, komite sekolah/madrasah), sesuai SK Kepala sekolah/madrasah;
- 2) Dilakukan melalui pertemuan, seperti: workshop, bimbingan teknis, dan lain-lain;
- 3) Kegiatan revidi dan revisi;
- 4) Tahap finalisasi;
- 5) Pemantapan dan penilaian dokumen KTSP oleh Tim Pengembang berdasarkan petunjuk teknis Penyusunan KTSP.

Kegiatan pokok yang pertama (melibatkan tim pengembang) dalam kegiatan penyusunan dan pengembangan KTSP, berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala SDIT Rabbani, beliau mengatakan:

Pihak-pihak yang terkait dalam perencanaan dan pengembangan KTSP adalah kepala sekolah, pengawas, utusan komite sekolah, guru/wali kelas dan pihak yang berkompeten lainnya (termasuk ulama).⁶

⁵BAN-SM, *Petunjuk Teknis Pengisian Instrumen Akreditasi SD/MI* (Jakarta: BAN-SM, 2014), h. 2.

⁶A. Tajuddin, Kepala SDIT Rabbani, *Wawancara*, Watampone, 26 Juli 2017.

Dari hasil wawancara tersebut, terlihat bahwa dalam kegiatan penyusunan dan pengembangan KTSP di SDIT Rabbani melibatkan beberapa pihak antara lain: kepala sekolah, pengawas, utusan komite sekolah, guru/wali kelas dan tokoh agama. Sedangkan hasil wawancara dengan Waka Kurikulum SDIT Rabbani, beliau mengatakan bahwa: "Tim pengembang kurikulum SDIT Rabbani adalah kepala sekolah, guru mata pelajaran, komite sekolah, dan penyelenggara lembaga pendidikan".⁷ Dalam dokumen daftar hadir rapat penyusunan dan pengembangan KTSP, pihak yang hadir dalam rapat tersebut yaitu: kepala sekolah, waka kurikulum, waka akademik dan kesiswaan, waka sarana dan prasarana, empat orang guru kelas, dua orang guru mata pelajaran, ketua komite dan anggota komite.

Kegiatan pokok yang kedua (dilakukan melalui pertemuan, seperti: workshop, bimbingan teknis, dan lain-lain). Dalam kegiatan penyusunan dan pengembangan KTSP berdasarkan hasil observasi dan dokumentasi, penyusunan dan pengembangan KTSP dilakukan melalui pertemuan atau rapat yang dibuktikan dengan berita acara rapat dan daftar hadir peserta rapat.

Kegiatan pokok yang ketiga dan keempat (kegiatan reviu dan revisi; serta finalisasi). Pihak SDIT Rabbani melakukan kegiatan reviu serta revisi kurikulum yang telah direncanakan. Kegiatan reviu dan revisi tersebut dibuktikan dengan adanya konsep atau draft kurikulum awal (sebelum direvisi) dan kurikulum yang telah direvisi. Kegiatan finalisasi dibuktikan dengan adanya Dokumen I KTSP yang merupakan hasil dari proses reviu dan revisi draft kurikulum KTSP.

Kegiatan pokok yang kelima (pemantapan dan penilaian dokumen KTSP oleh Tim Pengembang). Kegiatan ini ditandai dengan adanya kegiatan finalisasi yang melahirkan Dokumen I KTSP SDIT Rabbani.

⁷Patmawati, Waka Kurikulum SDIT Rabbani, *Wawancara*, Watampone, 1 Agustus 2017.

Berkaitan dengan pedoman atau dasar dalam penyusunan dan pengembangan kurikulum di SDIT Rabbani berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala SDIT Rabbani, beliau mengatakan:

Pedoman dalam penyusunan dan pengembangan kurikulum KTSP secara umum dan kurikulum PAI secara khusus di SDIT Rabbani adalah pedoman dan acuan umum BSNP dan Peraturan Pemerintah serta Peraturan Menteri. Juga berpedoman pada konsep pengembangan/standar kompetensi Pendidikan Agama Islam dan rumusan pengembangan kurikulum pembelajaran agama Islam di Sekolah Islam Terpadu. Peraturan Pemerintah tentang standar pendidikan nasional, Undang-undang Republik Indonesia tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Menteri tentang Standar Kompetensi Lulusan serta panduan penyusunan kurikulum.⁸

Senada dengan hasil wawancara di atas, Waka Kurikulum SDIT Rabbani mengatakan:

Pedoman penyusunan dan pengembangan kurikulum sesuai standarisasi BNSP, Peraturan Pemerintah, Peraturan menteri dan beberapa aturan pokok pengembangan kurikulum yang terkait dengan pendidikan Islam.⁹

Dari hasil wawancara tersebut bahwa yang dijadikan pedoman adalah Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, serta rumusan pengembangan kurikulum pembelajaran agama Islam di Sekolah Islam Terpadu.

4. Organisasi Kurikulum di SDIT Rabbani

Organisasi kurikulum merupakan pola atau desain bahan kurikulum yang tujuannya untuk mempermudah siswa dalam mempelajari bahan pelajaran serta mempermudah siswa melakukan kegiatan belajar, sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif.

Dalam hal pengorganisasian kurikulum, berdasarkan hasil wawancara dengan kepala SDIT Rabbani, beliau mengatakan:

Bentuk organisasi kurikulum yang kami gunakan adalah kurikulum berdasarkan mata pelajaran (*subject curriculum*) untuk mempermudah siswa

⁸A. Tajuddin, Kepala SDIT Rabbani, *Wawancara*, Watampone, 26 Juli 2017.

⁹Patmawati Waka Kurikulum SDIT Rabbani, *Wawancara*, Watampone, 1 Agustus 2017.

mempelajari bahan pelajaran. Pengetahuan nilai kearifan lokal dan budaya dengan penerapan mulok dan pengembangan karakter, semangat dan iptek dengan bentuk pengembangan diri.¹⁰

Pada dasarnya dalam mata pelajaran PAI sudah ada muatan ketiga mata pelajaran tersebut namun kami masih ingin lebih mengintensifkan pada pembelajaran 3 mata pelajaran tersebut dengan alasan penambahan muatan/konten pelajaran yang lebih banyak dan beragam contoh-contoh, sehingga peserta didik lebih mempunyai waktu dan kesempatan mengambil faedah terhadap 3 mata pelajaran tersebut dalam menanamkan dan menguatkan aspek akidah, ibadah dan muamalah yang merupakan fondasi utama dan pertama dalam bentuk nilai-nilai karakter dan keteladanan, pembentukan kepekaan sosial dan solidaritas yang tinggi, persepsi kemandirian dan tanggung jawab yang pada akhirnya tumbuh sejak dini jiwa-jiwa yang kuat terhadap perubahan dan dinamika zaman dan peradaban.¹¹

Dari hasil wawancara tersebut, terlihat bahwa di SDIT Rabbani menggunakan pola organisasi *subject curriculum (separated subject curriculum)*. Penggunaan *separated subject curriculum* dapat dilihat dari pemisahan mata pelajaran Fiqhi, Tauhid, dan Hadis dari mata pelajaran Pendidikan Agama Islam, di mana ketiga mata pelajaran tersebut dimasukkan ke dalam pengembangan diri.

Dari hasil wawancara di atas, juga dapat dilihat alasan pemisahan mata pelajaran Fiqhi, Tauhid, dan Hadis dari mata pelajaran Pendidikan Agama Islam adalah untuk lebih mengintensifkan pembelajaran pada mata pelajaran tersebut dengan alasan penambahan muatan/konten pelajaran yang lebih banyak dan beragam contoh-contoh yang dapat diberikan untuk lebih menambah pemahaman peserta didik.

¹⁰A. Tajuddin, Kepala SDIT Rabbani, *Wawancara*, Watampone, 31 Juli 2017.

¹¹A. Tajuddin, Kepala SDIT Rabbani, *Wawancara*, Watampone, 31 Juli 2017.

Selain menggunakan *separated subject curriculum*, di SDIT Rabbani juga menggunakan *Integrated curriculum* atau kurikulum terpadu. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara dengan Kepala SDIT Rabbani berikut:

Konsep pengembangan kurikulum terpadu yang digunakan di SDIT Rabbani yaitu pemberdayaan struktur kurikulum yang lebih strategis dan sangat penting dalam pengembangan pendidikan Islam dengan segala komponen penjelasannya, juga didasari proses pembelajaran yang memberikan integrasi muatan materi mata pelajaran umum ke dalam pemberian contoh yang lebih Islami, sehingga diharapkan tumbuh dan berkembang kepribadian yang lahir dari keragaman potensi.¹²

Dari hasil wawancara di atas, dapat dilihat bahwa selain menggunakan pola organisasi kurikulum *separated subject curriculum*, terkadang pula menggunakan pola organisasi *Integrated curriculum* yaitu integrasi muatan materi mata pelajaran umum ke dalam materi mata pelajaran Islam. Pola organisasi kurikulum (*Integrated curriculum*) inilah yang menjadi ciri khas Sekolah Islam Terpadu.

5. Perpaduan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di SDIT Rabbani

Struktur kurikulum merupakan pola dan susunan mata pelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Kedalaman muatan kurikulum pada setiap mata pelajaran pada setiap satuan pendidikan dituangkan dalam kompetensi yang harus dikuasai peserta didik sesuai dengan beban belajar yang tercantum dalam struktur kurikulum.

Struktur kurikulum SDIT Rabbani adalah sebagai berikut:

¹²A. Tajuddin, Kepala SDIT Rabbani, *Wawancara*, Watampone, 26 Juli 2017.

Tabel 4.3
Struktur Kurikulum SDIT Rabbani

No.	Komponen	Alokasi Waktu	
		Kelas	
		I-III	IV-VI
A.	Mata Pelajaran		
	1. Pendidikan Agama Islam	3	3
	2. Pendidikan Kewarganegaraan	Tematik	2
	3. Bahasa Indonesia		5
	4. Matematika		5
	5. Ilmu Pengetahuan Alam		4
	6. Ilmu Pengetahuan Sosial		3
	7. Seni Budaya dan Keterampilan		4
	8. PJOK	3	4
B.	Muatan Lokal		
	1. Bahasa Daerah	2	2
	2. Baca Tulis al-Qur'an	2	2
	3. Bahasa Arab	2	2
C.	Pengembangan Diri	2*	2*
	1. Tauhid		
	2. Olahraga		
	3. Fiqih		
	4. Hadis		
	Jumlah	32	36

Sumber: Buku Dokumen I KTSP 2006 dan Kurikulum 2013 SDIT Rabbani

Pada tabel 4.3, tampak bahwa kurikulum SDIT Rabbani memuat delapan mata pelajaran pada kelompok A, pada Kelompok B atau muatan lokal terdapat tiga mata pelajaran, dan pada kelompok C atau pengembangan diri terdapat empat mata pelajaran.

Pada mata pelajaran kelompok A, pada umumnya sama dengan struktur kurikulum SD dan sesuai dengan struktur kurikulum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005. Pada mata pelajaran kelompok B, terdapat tiga mata pelajaran yang salah satunya merupakan mata pelajaran khusus untuk Madrasah

Ibtidaiyah (MI) yang tidak terdapat di Sekolah Dasar (SD). Pada kelompok C atau pengembangan diri terdapat tiga mata pelajaran yang termasuk dalam kelompok mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di MI yaitu: Tauhid, Fiqih dan Hadis dan terdapat satu mata pelajaran yang termasuk dalam kelompok mata pelajaran A di SD dan mata pelajaran kelompok B di MI yaitu olahraga.

Terkait dengan masalah perpaduan kurikulum pendidikan agama Islam di SDIT Rabbani, hasil wawancara dengan Guru Pendidikan Agama Islam, Tauhid, Fiqhi, dan Hadis SDIT Rabbani sebagai berikut:

Mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SDIT Rabbani secara umum tetap berada pada lingkup/jajaran muatan inti pada pola Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Seluruh SK dan KD yang diajarkan tetap mengacu pada permen tentang Standar Kompetensi Lulusan. Materi pelajaran Pendidikan Agama Islam diajarkan dengan alokasi waktu 3 jam pelajaran.¹³

Mata pelajaran Tauhid masuk pada wilayah muatan pembelajaran pengembangan diri yang alokasi waktunya 2 jam pelajaran setiap pekan yang isi materinya bersumber dari materi-materi inti/pilihan tentang nilai-nilai ketauhidan.¹⁴

Mata pelajaran PAI dipadukan/dintegrasikan sedangkan mata pelajaran Tauhid, Hadis, dan Fiqhi berdiri sendiri. Mata pelajaran Fiqhi penguatannya lebih kepada praktek ibadah.¹⁵

Mata pelajaran hadis disajikan pada posisi muatan pengembangan diri dengan alokasi waktu 2 jam pelajaran dengan tema-tema hadis pilihan dan yang sudah disesuaikan berdasarkan tujuan pemuatan hadis dan tingkat kemampuan daya ingat (hafalan) peserta didik.¹⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan Guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam, Tauhid, Fiqhi, dan Hadis di atas, tampak bahwa mata pelajaran

¹³Rosdiana, Guru PAI SDIT Rabbani, *Wawancara*, Watampone, 2 Agustus 2017.

¹⁴A. Tajuddin, Guru Tauhid SDIT Rabbani, *Wawancara*, Watampone, 3 Agustus 2017.

¹⁵Musyahidah, Guru Fiqhi SDIT Rabbani, *Wawancara*, Watampone, 4 Agustus 2017.

¹⁶Nurmilayanti, Guru Hadis SDIT Rabbani, *Wawancara*, Watampone, 7 Agustus 2017.

Tauhid, Fiqhi, dan Hadis termasuk ke dalam lingkup atau komponen mata pelajaran Pendidikan Agama Islam, akan tetapi ketiga mata pelajaran tersebut (Tauhid, Fiqhi, dan Hadis) dimasukkan ke dalam pengembangan diri.

B. *Pembahasan Penelitian*

Setelah mencermati keseluruhan data, maka akan dilakukan pembahasan pada sub bab ini. Pada bagian ini, dilakukan interpretasi terhadap hasil penelitian berdasarkan pendekatan sebagaimana yang telah disampaikan pada metode penelitian.

Pembahasan hasil penelitian ini dapat dirumuskan dalam tiga hal pokok, yaitu mekanisme pengembangan kurikulum KTSP di SDIT Rabbani, pola organisasi kurikulum yang digunakan di SDIT Rabbani, perpaduan kurikulum pendidikan agama Islam di SDIT Rabbani.

1. Mekanisme Penyusunan dan Pengembangan KTSP di SDIT Rabbani

Berdasarkan data hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, diperoleh sebuah kesimpulan bahwa dalam kegiatan penyusunan dan pengembangan KTSP di SDIT Rabbani dilakukan melalui lima kegiatan pokok dalam mekanisme penyusunan dan pengembangan KTSP. Kegiatan-kegiatan tersebut yaitu: 1) Melibatkan tim pengembang (guru, kepala sekolah/madrasah, komite sekolah/madrasah), sesuai SK Kepala sekolah/madrasah; 2) Dilakukan melalui pertemuan, seperti: workshop, bimbingan teknis, dan lain-lain; 3) Kegiatan revidi dan revisi; 4) Tahap finalisasi; 5) Pemantapan dan penilaian dokumen KTSP oleh Tim Pengembang berdasarkan petunjuk teknis Penyusunan KTSP. Ada dua kegiatan pokok yang tidak dilaksanakan yaitu: 1) Menghadirkan narasumber (ahli pendidikan, praktisi pendidikan, Dewan

Pendidikan, Dinas Pendidikan/Kemenag Kabupaten/Kota, dan Pemda); dan
2) Mendokumentasikan hasil pengembangan kurikulum yang ditandatangani Dinas Pendidikan/Kemenag Kabupaten/Kota.

Berdasarkan dokumen (daftar hadir) rapat kerja penyusunan dan pengembangan kurikulum yang diperoleh, pihak SDIT Rabbani tidak menghadirkan atau melibatkan tokoh pendidikan dan nara sumber dalam kegiatan penyusunan dan pengembangan kurikulum. Berdasarkan juknis akreditasi BAN-SM, selain pihak-pihak yang disebutkan di atas, sebaiknya dalam merencanakan dan mengembangkan kurikulum, juga melibatkan tokoh pendidikan dan nara sumber. Tujuan dari pelibatan tokoh pendidikan dan nara sumber dalam kegiatan penyusunan dan pengembangan kurikulum di sekolah tentunya akan sangat berpengaruh terhadap hasil dari penyusunan dan pengembangan kurikulum.

Dokumen KTSP yang telah dibuat oleh pihak SDIT Rabbani telah didokumentasikan, namun belum ditandatangani oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bone. Hal ini disebabkan kurangnya koordinasi dari pihak sekolah dan Dinas Pendidikan. Dalam hal penandatanganan dokumen KTSP, sebaiknya pihak Dinas Pendidikan melakukan pemeriksaan yang baik terhadap dokumen tersebut sebelum dilakukan penandatanganan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala SDIT Rabbani, beliau mengatakan bahwa: “terkadang ada sekolah yang hanya *mengcopy paste* dokumen kurikulum sekolah lain”¹⁷. Hal ini untuk menghindari terjadinya kesalahan atau kekeliruan dalam dokumen tersebut.

Mengenai pedoman atau dasar dalam penyusunan dan pengembangan kurikulum di SDIT Rabbani Sebaiknya disebutkan dengan lebih rinci Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri yang dijadikan pedoman atau dasar

¹⁷A. Tajuddin, Kepala SDIT Rabbani, *Wawancara*, Watampone, 25 Agustus 2017.

dalam penyusunan dan pengembangan kurikulum. Hal ini dikarenakan Undang-undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Menteri seringkali mengalami perubahan dan untuk menghindari kesalahan penafsiran tentang Undang-undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Menteri yang dimaksud. Sebagai contoh, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah, kemudian diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016.

2. Organisasi Kurikulum di SDIT Rabbani

Integrated kurikulum merupakan ciri khas Sekolah Islam Terpadu seperti pengertian umum yang dikemukakan oleh Jaringan Sekolah Islam Terpadu (JSIT) Indonesia:

SIT adalah Sekolah Islam yang diselenggarakan dengan memadukan secara Integratif nilai dan ajaran Islam dalam bangunan kurikulum dengan pendekatan pembelajaran yang efektif dan pelibatan yang optimal dan koperatif antara guru dan orangtua, serta masyarakat untuk membina karakter dan kompetensi peserta didik.¹⁸

Lebih lanjut, pihak JSIT mengatakan bahwa dalam aplikasinya, Sekolah Islam Terpadu diartikan sebagai sekolah yang menerapkan pendekatan penyelenggaraan dengan memadukan pendidikan umum dan pendidikan agama menjadi suatu jalinan kurikulum. Sekolah Islam Terpadu juga menekankan keterpaduan dalam metode pembelajaran sehingga dapat mengoptimalkan ranah kognitif, afektif dan konatif atau Psikomotorik. Sekolah Islam Terpadu juga memadukan pendidikan aqliyah, ruhiyah dan jasadiyah. Dalam penyelenggaraannya

¹⁸Jaringan Sekolah Islam Terpadu (JSIT) Indonesia, Online <https://jsit-indonesia.com/sample-page/pengertian-sekolah-islam-terpadu/> (Diakses tanggal 7 Agustus 2017).

memadukan keterlibatan dan partisipasi aktif lingkungan belajar yaitu sekolah, rumah dan masyarakat.¹⁹

Dari pengertian dan penjelasan JSIT tentang Sekolah Islam Terpadu yang dikemukakan di atas, ada empat konsep keterpaduan yaitu: 1) keterpaduan pendidikan umum dan pendidikan agama; 2) keterpaduan dalam metode pembelajaran; 3) keterpaduan pendidikan *aqliyah*, *ruhiyah*, dan *jasadiyah*; 4) memadukan keterlibatan dan partisipasi aktif lingkungan belajar yaitu: sekolah, rumah dan masyarakat.

Berdasarkan Konsep di atas, keterpaduan bukan berarti harus memisahkan beberapa mata pelajaran seperti mata pelajaran Pendidikan Agama Islam ke dalam beberapa mata pelajaran seperti Tauhid, Hadis, dan Fiqhi. Apabila mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dibagi ke dalam beberapa mata pelajaran, berarti pola kurikulum yang digunakan adalah *separated subject curriculum*.

Konsep keterpaduan yang dimaksud dalam hal ini dapat kita lihat pada beberapa contoh struktur kurikulum yang digunakan SDIT atau SIT pada umumnya. Pada struktur kurikulum yang umumnya digunakan di SDIT tetap mengajarkan mata pelajaran tersebut dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Apabila pihak sekolah melakukan pemisahan mata pelajaran tersebut, berarti pola kurikulum ini lebih mirip dengan pola kurikulum yang digunakan di Madrasah Ibtidaiyah (MI) yang memisahkan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam menjadi beberapa mata pelajaran, yaitu: al-Qur'an Hadis, Akidah Akhlak, Fiqih, dan Sejarah Kebudayaan Islam, padahal penekanan dan ciri khas dari Sekolah Islam Terpadu adalah konsep keterpaduan secara integratif.

¹⁹Jaringan Sekolah Islam Terpadu (JSIT) Indonesia, Online <http://jsit-indonesia.com/sample-page/makna-terpadu-pada-sit/> (Diakses tanggal 7 Agustus 2017).

3. Perpaduan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di SDIT Rabbani

Berdasarkan Struktur kurikulum SDIT Rabbani dapat dilihat bahwa perpaduan kurikulum Pendidikan Agama Islam di SDIT Rabbani dengan memadukan kurikulum Diknas, kurikulum Kemenag dan kurikulum institusi/yayasan. Penggunaan kurikulum Diknas dapat dilihat dari tetap diajarkannya mata pelajaran Pendidikan Agama Islam sebagai mata pelajaran inti. Penggunaan kurikulum Kemenag dapat dilihat dari pemisahan kelompok mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (Tauhid, Fiqhi, dan Hadis). Penggunaan kurikulum institusi/yayasan yang menjadi ciri khas SDIT Rabbani dapat dilihat dari kegiatan-kegiatan pembiasaan dan keteladanan.

Merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dikatakan bahwa pengembangan diri bukan merupakan mata pelajaran yang harus diasuh oleh guru. Pengembangan diri bertujuan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai dengan kebutuhan, bakat, dan minat setiap peserta didik sesuai dengan kondisi sekolah. Kegiatan pengembangan diri difasilitasi dan atau dibimbing oleh konselor, guru, atau tenaga kependidikan yang dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan pengembangan diri dilakukan melalui kegiatan pelayanan konseling yang berkenaan dengan masalah diri pribadi dan kehidupan sosial, belajar, dan pengembangan karir peserta didik.

Selanjutnya pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81a Tahun 2013 Tentang Implementasi Kurikulum, pengembangan diri merupakan kegiatan yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk

mengembangkan dan mengekspresikan diri melalui berbagai kegiatan ekstrakurikuler.

Berdasarkan peraturan tersebut di atas, maka pada kegiatan pengembangan diri tidak memuat mata pelajaran akan tetapi berupa kegiatan ekstrakurikuler dan kegiatan pelayanan konseling bagi peserta didik. Sejalan dengan hal tersebut, sekolah-sekolah Islam Terpadu pada umumnya juga tidak memasukkan mata pelajaran tersebut pada kelompok pengembangan diri.

Berkaitan dengan pembahasan sebelumnya tentang pola organisasi kurikulum di atas, sebaiknya mata pelajaran-mata pelajaran yang terdapat dalam kelompok pengembangan diri tetap berada dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam agar konsep keterpaduan secara integratif tetap terlaksana dan menjadi ciri khas dari Sekolah Islam Terpadu. Untuk mengintensifkan mata pelajaran tersebut, bisa ditempuh dengan cara penambahan jumlah jam pelajaran Pendidikan Agama Islam agar tujuan khusus dari mata pelajaran tersebut tetap tercapai tanpa pemisahan-pemisahan mata pelajaran.

BAB V

PENUTUP

A. *Kesimpulan*

Dari hasil penelitian tentang manajemen kurikulum Pendidikan Agama Islam di SDIT Rabbani dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam melaksanakan pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, mekanisme penyusunan dan pengembangan KTSP di SDIT Rabbani belum melalui tujuh kegiatan pokok dalam pengembangan kurikulum seperti yang terdapat dalam juknis BAN-SM. Mekanisme penyusunan dan pengembangan KTSP di SDIT Rabbani belum melibatkan narasumber dan tokoh pendidikan di luar institusi atau yayasan, dan dokumentasi hasil pengembangan kurikulum belum ditandatangani Dinas Pendidikan/Kemenag Kabupaten/Kota.
2. Jenis kurikulum atau organisasi kurikulum yang digunakan di SDIT Rabbani adalah *integrated kurikulum* yaitu integrasi materi mata pelajaran umum ke dalam materi pelajaran Pendidikan Agama Islam. Untuk mata pelajaran Pendidikan Agama Islam, pola organisasi kurikulum yang digunakan adalah *subject curriculum (separated subject curriculum)*. Hal ini dapat dilihat dari pemisahan mata pelajaran Fiqhi, Tauhid, dan Hadis dari mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan ketiga mata pelajaran tersebut dimasukkan ke dalam pengembangan diri.
3. Kurikulum Pendidikan Agama Islam yang digunakan di SDIT Rabbani adalah perpaduan kurikulum Diknas, kurikulum Kemenag dan kurikulum institusi atau yayasan. Penggunaan kurikulum Diknas dapat dilihat dari tetap diajarkannya mata pelajaran Pendidikan Agama Islam sebagai mata pelajaran inti dan mata pelajaran tersendiri. Penggunaan kurikulum

Kemenag dapat dilihat dari pemisahan kelompok mata pelajaran Pendidikan Agama Islam menjadi mata pelajaran Tauhid, Fiqhi, dan Hadis. Penggunaan kurikulum yayasan yang menjadi ciri khas SDIT Rabbani dapat dilihat dari kegiatan-kegiatan pembiasaan dan keteladanan.

B. *Implikasi Penelitian*

1. Bagi kepala sekolah, hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu informasi dan referensi tentang pelunya meninjau kembali penyusunan dan pengembangan kurikulum KTSP pada umumnya dan kurikulum Pendidikan Agama Islam pada khususnya. Hal ini menjadi penting agar kurikulum yang dihasilkan tetap sesuai dengan Peraturan Pemerintah dan Sekolah Islam Terpadu pada umumnya, meskipun ada penambahan-penambahan kurikulum yang dianggap perlu dari pihak institusi untuk mencapai tujuan kurikulum dan tujuan pendidikan yang dilaksanakan.
2. Bagi pendidik hendaknya selalu berupaya untuk meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan pengembangan dan pelaksanaan kurikulum di tingkat kelas.
3. Bagi pihak yayasan perlu meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak luar yang terkait (Dinas Pendidikan dan Kemenag) dalam merencanakan/ mengembangkan kurikulum dan melaksanakan monitoring pelaksanaan kurikulum dengan pihak sekolah untuk meningkatkan mutu sekolah.
4. Bagi peneliti lain, kiranya penelitian ini dapat dijadikan referensi tambahan dan ditindaklanjuti dengan model yang lebih luas, di mana dapat digunakan objek penelitian yang lebih banyak serta menggunakan parameter atau indikator-indikator yang lebih banyak agar dapat mengembangkan hasil penelitian yang serupa.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Daud. *Pendidikan Agama Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Anwar, Rosihan. *Ulum Al-Qur'an*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.
- Arif, Saiful Nur dan Iskandar Zulkarnain. "Dasar-dasar Manajemen dalam Teknologi Informasi", *Jurnal Saintikom* 5, no. 2 (2008): h. 236.
- Arifin, Mochamad. "Manajemen Pembelajaran Pendidikan Agama Islam." *Tesis*, Salatiga: PPS STAIN Salatiga, 2014.
- Arifin, Zainal. *Konsep dan Model Pengembangan Kurikulum*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014.
- Arikunto, Suharsimi. *Manajemen Pendidikan*. Yogyakarta: Aditya Media, 2008.
- , *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Cet. XIV; Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Azisah, Siti. *Guru dan Pengembangan Kurikulum Berkarakter, Implementasi pada Tingkat Satuan Pendidikan*. Makassar: Alauddin University Press, 2014.
- BAN-SM, *Petunjuk Teknis Pengisian Instrumen Akreditasi SD/MI*. Jakarta: BAN-SM, 2014.
- BSNP, *Panduan Penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah*. Jakarta: BSNP, 2006.
- al-Bukhari, Muhammad bin Isma'il, dalam *Ensiklopedi Hadist - Kitab 9 Imam*. Lidwa Pusaka.
- Darajat, Zakiah. *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Darmi. "Aliran-Aliran yang Mempengaruhi Kurikulum Pendidikan", *At-Ta'dib, Jurnal Ilmiah Prodi Pendidikan Agama Islam* 5, no.1 (2013): h. 2.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Semarang: CV Toha Putra, 2002.
- Departemen Agama RI. *Pedoman Manajemen Berbasis Madrasah*. Jakarta: Direktorat Jenderal Kelembagaan Pendidikan Islam, 2005.

- Departemen Pendidikan Nasional. *Standar Kompetensi Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam SMP & MTs*. Jakarta: Pusat Kurikulum, Balitbang Depdiknas, 2003.
- Fakhrurrazi. "Keterampilan-Keterampilan Guru dalam Mengajar", *At-Ta'dib, Jurnal Ilmiah Prodi Pendidikan Agama Islam* 5, no.1 (2013): h. 88.
- Fatah, Nanang. *Landasan Manajemen Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003.
- Ghony, M. Djunaidi dan Fauzan Almanshur. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014.
- Hamalik, Oemar. *Kurikulum dan Pembelajaran*. Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- . *Manajemen Pengembangan Kurikulum*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006.
- Harahap, Sofyan Syafri. *Akuntansi Pengawasan dan Manajemen dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti, 1992.
- Hasbullah. *Kapita Selekta Pendidikan Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.
- Jaringan Sekolah Islam Terpadu (JSIT) Indonesia, Online <https://jsit-indonesia.com/sample-page/pengertian-sekolah-islam-terpadu/> (Diakses tanggal 7 Agustus 2017).
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Versi Online, Online <http://kbbi.web.id/manajemen> (Diakses tanggal 13 April 2017).
- Khoirudin, M. Arif "Manajemen Kurikulum dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan", *Jurnal Manajemen Kurikulum* 24, no. 1 (2013): h. 63.
- Kisbiyanto, "Manajemen Kurikulum Manajemen Kurikulum Bidang Teaching and Learning", *Jurnal ThufuLA* 3, no. 1 (2015): h. 109.
- Kristiawan, Muhammad, dkk., *Manajemen Pendidikan*. Yogyakarta: Deepublish, 2017.
- Kurniawan, Deni. *Model dan Organisasi Kurikulum*. t.p, t.th.
- Lubis, Amri Yusuf. "Pelaksanaan Manajemen Kurikulum Pada SMA Negeri 1 Buengcala Kabupaten Aceh Besar", *Jurnal Administrasi Pendidikan Pascasarjana Universitas Syiah Kuala* 3 (2015): h. 15.

Mahmud, Amir. "Dinamika Pengembangan kurikulum Pendidikan di Pesantren Rifaiyah (1974-2014)". *Tesis*, Yogyakarta: PPS UIN Sunan Kalijaga, 2014.

Mardani. *Hadis Ahkam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 2

Marimba, Ahmad D. *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam*. Bandung: al-Ma'arif, 1989.

Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah*.

-----, *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 23 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah*.

-----, *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 24 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah*.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2013 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah*.

-----, *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah*.

-----, *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2013 Tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah*.

-----, *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81a Tahun 2013 Tentang Implementasi Kurikulum*.

-----, *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*.

-----, *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah*.

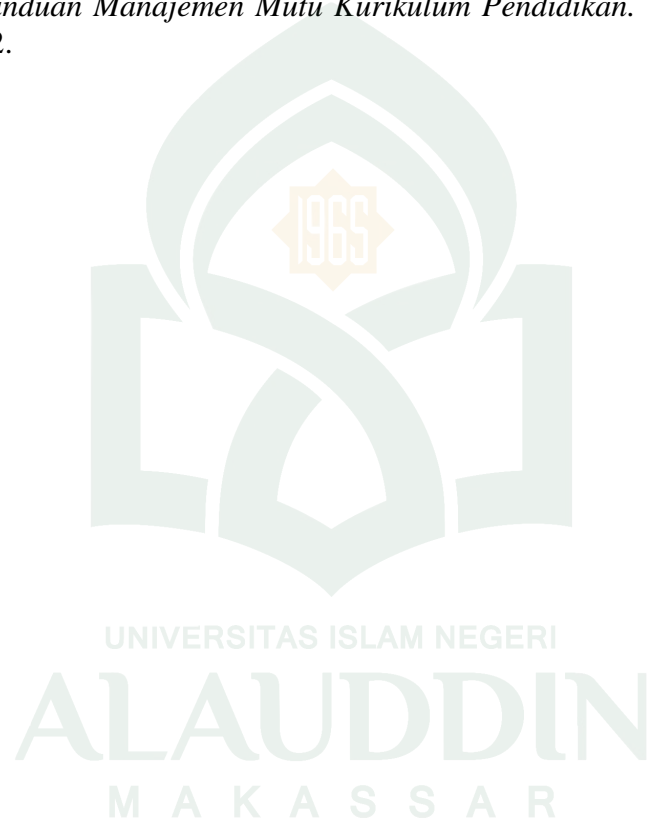
-----, *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah*.

Menteri Agama Republik Indonesia. *Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 165 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam*.

- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Cet. XXXII; Yogyakarta: PT Remaja Rosda Karya, 2014.
- Muhaimin. *Paradigma Pendidikan Islam*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2001.
- . *Wacana Pengembangan Pendidikan Islam*. Cet. II; Surabaya: Pustaka Pelajar, 2004.
- . *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam*. Bandung: PT RajaGrafindo Persada, 2007.
- Mulyasa, E. *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Sebuah Panduan Praktis*. Cet. IV; Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007.
- . *Implementasi KTSP Kemandirian Guru dan Kepala Sekolah*. Cet. III; Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Mustami, Muh. Khalifah. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Yogyakarta: Aynat Publishing, 2015.
- Musyaddad, Kholid. "Mengelola Kurikulum", *Jurnal Al-Ulum* 3 (2014): h. 6-7.
- Nasution, S. *Metode Research*. Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Nurdin, Syafruddin dan Basyiruddin Usman. *Guru Profesional dan Implementasi Kurikulum*. Jakarta: Ciputat Press, 2002.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*.
- . *Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan*.
- . *Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan*.
- . *Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan*.
- Purwanto, M. Ngalm. *Administrasi Pendidikan*. Jakarta: Mutiara, 1984.
- Raharjo, Rahmat. *Inovasi Kurikulum Pendidikan Agama Islam*. Yogyakarta: Magnum Pustaka, 2010.

- Rasidi. "Manajemen Kurikulum di MTsN Model Sumber Bungur Pamekasan (Telaah Komparatif antara Kurikulum Program Regular dan Akselerasi)." *Tesis*, Surabaya: PPS IAIN Sunan Ampel, 2013.
- Rusman. *Manajemen Pendidikan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- . *Manajemen Kurikulum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- Samsudi. "Model Pengembangan dan Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) Berbasis Dukungan *Stakeholders* pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah", *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran* 19, no. 1 (2012): h. 53.
- Sanjaya. *Kurikulum dan Pembelajaran: Teori & Praktek KTSP*. Jakarta: Kencana, 2009.
- SDIT Rabbani. *Dokumen I KTSP 2006 dan Kurikulum 2013 SDIT Rabbani Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone*. 2014.
- Septiani dan Wiyono. "Manajemen Kegiatan Ekstrakurikuler dalam Meningkatkan Kualitas Sekolah", *Jurnal Manajemen Pendidikan* 23, no. 5 (2012): h.425.
- Siagian, Sondang P. *Filsafat Administrasi*. Jakarta: Gunung Agung, 1984.
- Suhardan, Dadang dkk., *Manajemen Pendidikan*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. *Pengembangan Kurikulum, Teori dan Praktek*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010.
- Sulaiman, "Pola Modern Organisasi Pengembangan Kurikulum", *Jurnal Ilmiah Didaktika* XIV, no. 1 (2013): h. 70.
- Suranto, Muh. "Manajemen Kurikulum Pendidikan Agama Islam di SD Muhammadiyah Program Khusus Bayat Klaten" *Tesis*, Surakarta: PPS IAIN Surakarta, 2016.
- Suryosubroto. *Proses Belajar Mengajar di Sekolah*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Susilo, Joko. *KTSP; Manajemen Pelaksanaan dan Kesiapan sekolah Menyongsongnya*. Bandung: Pustaka Pelajar, 2006.
- Suyatno. *Sekolah Dasar Islam Terpadu Dalam Konsepsi Kelas Menengah Muslim Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Ahmad Dahlan, 2015.
- Tafsir, Ahmad. *Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Islam*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000.

- Uce, Loeziana. "Model Pengorganisasi Kurikulum Pendidikan di Indonesia", *Islamic Studies Journal* 2, no. 1 (2014): h. 126.
- Veithzal Rivai, Sylviana Murni. *Education Management: Analisis Teori dan Praktik*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Widyowati, Lilies. "Pengembangan Kurikulum Terpadu Sistem Full Day School Studi Multi Kasus di SD Muhammadiyah 1 Alternatif Kota Magelang" *Tesis*, Salatiga: PPS STAIN Salatiga, 2014.
- Yamin, Moh. *Panduan Manajemen Mutu Kurikulum Pendidikan*. Yogyakarta: Diva Press, 2012.



The logo of Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar is a light green watermark in the background. It features a stylized mosque dome with a central yellow star containing the year '1965'. Below the dome is an open book. The word 'LAMPIRAN' is centered over the logo in a bold, black, serif font.

LAMPIRAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

LAMPIRAN 1

DESAIN PENELITIAN

Data yang dikumpulkan	Sumber data	Teknik Pengumpulan data	Instrumen Pengumpulan data
Gambaran umum SDIT Rabbani	<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen-dokumen Profil sekolah (sejarah berdirinya, visi, misi, tujuan sekolah, struktur organisasi, keadaan pendidik dan tenaga kependidikan, keadaan peserta didik. - Foto sekolah 	<ul style="list-style-type: none"> - Wawancara dengan Kepala sekolah - Dokumentasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Peneliti - Pedoman wawancara tentang gambaran umum SDIT Rabbani
Konsep dan mekanisme pengembangan kurikulum KTSP	<ul style="list-style-type: none"> - Kata-kata atau tindakan - Dokumen-dokumen sekolah 	<ul style="list-style-type: none"> - Wawancara dengan Kepala Sekolah dan Waka Kurikulum - Dokumentasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Peneliti - Pedoman wawancara - Daftar chek (<i>checklist</i>)
Pola Organisasi kurikulum KTSP	<ul style="list-style-type: none"> - Kata-kata atau tindakan - Dokumen-dokumen sekolah 	<ul style="list-style-type: none"> - Wawancara dengan Kepala Sekolah - Dokumentasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Peneliti - Pedoman wawancara
Perpaduan kurikulum PAI di SDIT Rabbani	<ul style="list-style-type: none"> - Kata-kata atau tindakan - Dokumen-dokumen sekolah 	<ul style="list-style-type: none"> - Wawancara dengan Kepala Sekolah dan guru - Dokumentasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Peneliti - Pedoman wawancara

LAMPIRAN 2

PANDUAN WAWANCARA

No.	Subjek	Topik	Panduan Wawancara
1.	Kepala sekolah	<ul style="list-style-type: none"> - Gambaran Umum - Konsep dan mekanisme pengembangan kurikulum - Organisasi kurikulum - Perpaduan kurikulum PAI 	Gambaran umum sekolah, mekanisme pengembangan KTSP, Bentuk Organisasi kurikulum yang digunakan, Perpaduan kurikulum PAI di SDIT Rabbani.
2.	Waka Kurikulum	<ul style="list-style-type: none"> - Konsep dan mekanisme pengembangan kurikulum 	Mekanisme pengembangan KTSP
	Guru mata pelajaran PAI, Tauhid, Fiqhi, dan Hadis	<ul style="list-style-type: none"> - Perpaduan kurikulum PAI 	<ul style="list-style-type: none"> - Perpaduan kurikulum PAI di SDIT Rabbani.

LAMPIRAN 3

PANDUAN DOKUMENTASI

No.	Fokus	Dokumen yang Dikumpulkan
1.	Gambaran Umum Sekolah	Profil sekolah
2.	Mekanisme pengembangan kurikulum	Berita acara dan daftar hadir rapat
3.	Organisasi kurikulum	Dokumen 1 KTSP
4.	Perpaduan kurikulum PAI	Dokumen 1 KTSP

LAMPIRAN 4

PANDUAN OBSERVASI

No.	Fokus	Instrument
1.	Gambaran Umum Sekolah	Keadaan sekolah
2.	Mekanisme pengembangan kurikulum	Daftar chek (<i>checklist</i>)
3.	Perencanaan dan pengembangan kurikulum	Daftar chek (<i>checklist</i>) standar isi
4.	Pelaksanaan kurikulum	Daftar chek (<i>checklist</i>) standar proses

LAMPIRAN 5

CATATAN WAWANCARA

Hari, tanggal : Rabu, 26 Juli 2017
Tempat : Ruang Kepala Sekolah
Pukul : 08.30 - selesai
Narasumber : Bapak A. Tajuddin, S.Pd (Kepala Sekolah)
Jenis Data : Gambaran umum SDIT Rabbani

Peneliti : Bagaimana gambaran umum sekolah tentang letak, sejarah berdiri, pendiri yayasan, visi, misi, tujuan, struktur organisasi, pembagian guru, keadaan jumlah guru, karyawan, dan siswa, serta sarana prasarana dalam menunjang pembelajaran?

Narasumber : Secara umum letak geografis SDIT Rabbani menunjukkan posisi yang strategis. Terletak di arah utara kota Watampone dan termasuk daerah pengembangan bisnis, pendidikan dan perumahan di sekitar sekolah sudah ada pesantren dan sekolah tinggi. Sejarah berdirinya diawali dengan pendirian yayasan Ibnu Qayyim dari beberapa orang pendiri awal yang pada dasarnya bertekad untuk membangun sebuah institusi pendidikan yang mengembangkan kurikulum yang islami. Pendiri yayasan pada awal terbentuknya adalah Ahmad Dhahir Hamdan dan Dr. Sabruddin.

Struktur organisasi di SDIT Rabbani adalah Kepala Sekolah, waka akademik dan kurikulum, waka sarana dan prasarana, bagian humas, staf administrasi dan kurikulum, wali kelas, staf perpustakaan, staf bendahara, keamanan, petugas kebersihan, dan operator. Jumlah guru dan staf 26 orang dengan perincian tugas yaitu, wali kelas, guru mata pelajaran, guru mulok dan guru pendamping. Karyawan terdiri dari petugas keamanan, petugas kebersihan, staf administrasi, staf perpustakaan dan petugas catering. Siswa SDIT Rabbani kurang lebih 200 orang dengan jumlah kelas 11 rombel. Sarana prasarana terdiri dari Mushallah/mesjid, ruang kelas, kantor, mini library, UKS, mini lab. dan pembelajaran memakai kelas gazebo, lapangan bulutangkis dan WC.

CATATAN WAWANCARA

Hari, tanggal : Rabu, 26 Juli 2017
Tempat : Ruang Kepala Sekolah
Pukul : 08.30 - selesai
Narasumber : Bapak A. Tajuddin, S.Pd (Kepala Sekolah)
Jenis Data : Konsep dan mekanisme pengembangan kurikulum KTSP di SDIT Rabbani

Peneliti : Bagaimana mekanisme pengembangan KTSP di SDIT Rabbani?
Narasumber : Mekanisme operasional pengembangan kurikulum dalam konteks desentralisasi pendidikan dan pengembangan berdasarkan prinsip pemberdayaan kearifan lokal. Beberapa prinsip dasar pengembangan KTSP yang dipadukan dengan kurikulum keagamaan sebagai *starting point* area pengembangan potensi kurikulum yang dilaksanakan.

Peneliti : Apa yang menjadi pedoman dalam penyusunan dan pengembangan kurikulum KTSP secara umum dan kurikulum PAI secara khusus di SDIT Rabbani?

Narasumber : Pedoman dalam penyusunan dan pengembangan kurikulum KTSP secara umum dan kurikulum PAI secara khusus di SDIT Rabbani adalah pedoman dan acuan umum BSNP dan Peraturan Pemerintah serta Peraturan Menteri. Juga berpedoman pada konsep pengembangan/standar kompetensi Pendidikan Agama Islam dan rumusan pengembangan kurikulum pembelajaran agama Islam di Sekolah Islam Terpadu. Peraturan Pemerintah tentang standar pendidikan nasional, Undang-undang Republik Indonesia tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Menteri tentang Standar Kompetensi Lulusan serta panduan penyusunan kurikulum.

Peneliti : Siapa saja pihak yang terkait dalam perumusan/perencanaan dan pengembangan KTSP di SDIT Rabbani?

Narasumber : Pihak-pihak yang terkait dalam perencanaan dan pengembangan KTSP adalah kepala sekolah, pengawas, utusan komite sekolah, guru/wali kelas dan pihak yang berkompeten lainnya (termasuk ulama).

Peneliti : Bagaimana bentuk supervisi kurikulum KTSP di SDIT Rabbani?

Narasumber : Supervisi kurikulum KTSP di SDIT Rabbani lebih ditekankan pada model pembimbingan secara intensif kepada guru-guru

dalam meningkatkan kapasitas profesionalnya terkait beberapa hal, yaitu: kemampuan menerapkan konsep kurikulum dalam proses pembelajaran, memilih dan menggunakan materi dengan pola penggunaan media, kemampuan pelayanan terhadap pendidik terkait pola tingkah laku, menerapkan pelaksanaan ekstrakurikuler, dan pemecahan masalah-masalah khusus.

- Peneliti : Bagaimana bentuk evaluasi kurikulum KTSP yang dilaksanakan di SDIT Rabbani?
- Narasumber : Bentuk evaluasi kurikulum KTSP tetap mengacu pada standar penilaian/evaluasi yang mengarah pada peninjauan ulang terhadap dimensi kurikulum (rencana, kegiatan dan hasil) penyempurnaan terhadap komponen-komponen kurikulum (mencakup tujuan, isi, proses, metode, media, dan sumber lingkungan serta program pengendalian tahap-tahap pengembangan kurikulum yang mencakup tahapan perencanaan (silabus dan RPP).
- Peneliti : Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kurikulum KTSP?
- Narasumber : Bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kurikulum KTSP tetap mengacu pada penuntasan komponen pendidikan berdasar Permendiknas 2006 tentang standar isi (nomor 22 tahun 2006) dan tentang standar kompetensi lulusan (nomor 23 tahun 2006) yang dipadukan atau diintegrasikan ke dalam pendidikan karakter.
- Peneliti : Bagaimana konsep pengembangan kurikulum terpadu yang digunakan di SDIT Rabbani?
- Narasumber : Konsep pengembangan kurikulum terpadu yang digunakan di SDIT Rabbani yaitu pemberdayaan struktur kurikulum yang lebih strategis dan sangat penting dalam pengembangan pendidikan Islam dengan segala komponen penjelasannya, juga didasari proses pembelajaran yang memberikan integrasi muatan materi mapel umum ke dalam pemberian contoh yang lebih Islami, sehingga diharapkan tumbuh dan berkembang kepribadian yang lahir dari keragaman potensi.

CATATAN WAWANCARA

Hari, tanggal : Kamis, 27 Juli 2017
Tempat : Ruang Kepala Sekolah
Pukul : 08.30 - selesai
Narasumber : Bapak A. Tajuddin, S.Pd (Kepala Sekolah)
Jenis Data : Organisasi kurikulum KTSP di SDIT Rabbani

Peneliti : Bagaimana bentuk organisasi kurikulum yang digunakan di SDIT Rabbani?

Narasumber : Bentuk organisasi kurikulum yang kami gunakan adalah kurikulum berdasarkan mata pelajaran (*subject curriculum*) untuk mempermudah siswa mempelajari bahan pelajaran. Pengetahuan nilai kearifan lokal dan budaya dengan penerapan muak dan pengembangan karakter, semangat dan iptek dengan bentuk pengembangan diri.

Peneliti : Apa yang menjadi alasan mendasar sehingga pihak sekolah menggunakan bentuk organisasi kurikulum tersebut?

Narasumber : Alasan kami menggunakan bentuk organisasi kurikulum *subject curriculum* karena bentuk organisasi kurikulum tersebut memiliki karakteristik sederhana dalam implementasinya di lapangan, sehingga mendukung terlaksananya proses pembelajaran yang kreatif dan dinamis, mempermudah dalam membuat struktur pendidik dan bahan ajar, mempermudah dalam pencapaian tujuan jangka pendek.

Peneliti : Apa saja kegiatan ekstrakurikuler di SDIT Rabbani?

Narasumber : Kegiatan ekstrakurikuler yang dikembangkan adalah program tahfiz dan tahsinul qira'ah, pildacil, dan beberapa kegiatan olahraga.

CATATAN WAWANCARA

Hari, tanggal : Senin, 31 Juli 2017
Tempat : Ruang Kepala Sekolah
Pukul : 08.30 - selesai
Narasumber : Bapak A. Tajuddin, S.Pd (Kepala Sekolah)
Jenis Data : Perpaduan kurikulum PAI di SDIT Rabbani

Peneliti : Bagaimana komposisi perpaduan kurikulum pendidikan agama Islam yang digunakan di SDIT Rabbani?

Narasumber : komposisi perpaduan kurikulum pendidikan agama Islam yang digunakan di SDIT Rabbani sangat integral. PAI secara struktural diajarkan sesuai yang diprogramkan pada muatan inti mata pelajaran sebanyak 4 JP. Pada struktur mulok, BTA dan bahasa arab diajarkan masing-masing 2 JP, sedangkan mata pelajaran fiqhi, tauhid, dan hadis diintensifkan pada struktur pengembangan diri.

Peneliti : Mengapa pelajaran Tauhid, Fiqhi dan Hadis tidak dimasukkan ke dalam mata pelajaran PAI?

Narasumber : kami memilih fiqhi, tauhid, dan hadis diintegrasikan secara intensif pada struktur pengembangan diri karena kami melihat pada 3 mata pelajaran ini inti dan ruh dari nilai-nilai pendidikan Islam yang mendukung sepenuhnya pengembangan iptek, pengembangan karakter, dan kemandirian serta pembentukan nilai-nilai keteladanan.

Peneliti : Apa yang menjadi dasar dalam pengelompokan mata pelajaran tersebut (PAI, Tauhid, Fiqhi dan Hadis)?

Narasumber : Pada dasarnya dalam mata pelajaran PAI sudah ada muatan ketiga mata pelajaran tersebut namun kami masih ingin lebih mengintensifkan pada pembelajaran 3 mata pelajaran tersebut dengan alasan penambahan muatan/konten pelajaran yang lebih banyak dan beragam contoh-contoh, sehingga peserta didik lebih mempunyai waktu dan kesempatan mengambil faedah terhadap 3 mata pelajaran tersebut dalam menanamkan dan menguatkan aspek akidah, ibadah dan muamalah yang merupakan fondasi utama dan pertama dalam bentuk nilai-nilai karakter dan keteladanan, pembentukan kepekaan sosial dan solidaritas yang tinggi, persepsi kemandirian dan tanggung jawab yang pada akhirnya tumbuh sejak dini jiwa-jawa yang kuat terhadap perubahan dan dinamika zaman dan peradaban.

CATATAN WAWANCARA

Hari, tanggal : Selasa, 1 Agustus 2017
Tempat : Ruang Guru
Pukul : 09.15 - selesai
Narasumber : Patmawati, S.Pd. (Waka kurikulum)
Jenis Data : Konsep dan mekanisme pengembangan kurikulum KTSP di SDIT Rabbani

Peneliti : Apa yang menjadi pedoman dalam penyusunan dan pengembangan kurikulum KTSP secara umum dan kurikulum PAI secara khusus di SDIT Rabbani?

Narasumber : Pedoman penyusunan dan pengembangan kurikulum sesuai standarisasi BNSP, Peraturan Pemerintah, Peraturan menteri dan beberapa aturan pokok pengembangan kurikulum yang terkait dengan pendidikan Islam.

Peneliti : Apakah SDIT Rabbani memiliki tim pengembang kurikulum sekolah?

Narasumber : Pada dasarnya SDIT Rabbani memiliki tim pengembang kurikulum.

Peneliti : Siapa saja yang termasuk tim pengembang kurikulum sekolah?

Narasumber : Tim pengembang kurikulum SDIT Rabbani adalah Kepala Sekolah, guru mata pelajaran, komite sekolah, dan penyelenggara lembaga pendidikan.

Peneliti : Bagaimana bentuk pengembangan kurikulum di SDIT Rabbani?

Narasumber : Bentuk pengembangan KTSP tetap mengacu pada sentralisasi potensi, kebutuhan dan kepentingan siswa, respon terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan relevan dengan kebutuhan hidup.

Peneliti : Siapa saja pihak yang terkait dalam perumusan/perencanaan dan pengembangan KTSP di SDIT Rabbani?

Narasumber : Stakeholder/pemangku kebijakan pendidikan seperti Kepala sekolah, guru mata pelajaran, guru mulok, lembaga penyelenggara pendidikan/yayasan dan pihak komite sekolah.

CATATAN WAWANCARA

Hari, tanggal : Rabu, 2 Agustus 2017
Tempat : Ruang Kelas
Pukul : 09.15 - selesai
Narasumber : Rosdiana, S.Hi. (Guru Mapel PAI)
Jenis Data : Perpaduan kurikulum PAI di SDIT Rabbani

Peneliti : Bagaimana komposisi perpaduan kurikulum pendidikan agama Islam yang digunakan di SDIT Rabbani?

Narasumber : Mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SDIT Rabbani secara umum tetap berada pada lingkup/jajaran muatan inti pada pola Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Seluruh SK dan KD yang diajarkan tetap mengacu pada permen tentang Standar Kompetensi Lulusan. Materi pelajaran Pendidikan Agama Islam diajarkan dengan alokasi waktu 3 jam pelajaran.

Peneliti : Dalam tahap pelaksanaan kurikulum di kelas, bagaimana proses penyusunan rencana dan program pembelajaran (silabus, dan rencana pelaksanaan pembelajaran)?

Narasumber : Pelaksanaan proses pembelajaran tetap mengacu pada silabus yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan dan beberapa langkah-langkah strategis. Pembuatan RPP juga berdasar pada pedoman atau petunjuk teknis yang telah ditetapkan dengan berbagai tahapan dan penjelasan secara detail, sehingga memudahkan arah pengorganisasian proses kegiatan pembelajaran yang lebih baik.

ALA UDDIN
M A K A S S A R

CATATAN WAWANCARA

Hari, tanggal : Kamis, 3 Agustus 2017
Tempat : Ruang Kelas
Pukul : 09.15 - selesai
Narasumber : A. Tajuddin, S.Pd. (Guru Mapel Tauhid)
Jenis Data : Perpaduan kurikulum PAI di SDIT Rabbani

Peneliti : Bagaimana komposisi perpaduan kurikulum pendidikan agama Islam yang digunakan di SDIT Rabbani?
Narasumber : Mata pelajaran Tauhid masuk pada wilayah muatan pembelajaran pengembangan diri yang alokasi waktunya 2 jam pelajaran setiap pekan yang isi materinya bersumber dari materi-materi inti/pilihan tentang nilai-nilai ketauhidan.
Peneliti : Dalam tahap pelaksanaan kurikulum di kelas, bagaimana proses penyusunan rencana dan program pembelajaran (silabus, dan rencana pelaksanaan pembelajaran)?
Narasumber : Penyusunan rencana dan program pembelajaran di kelas tetap mengacu pada pedoman pembuatan RPP, mekanisme petunjuk teknis pembuatan RPP tetap dilaksanakan seperti memetakan standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator-indikator ketuntasan, tujuan pembelajaran, proses dan langkah-langkah pembelajaran, metode pembelajaran, sarana dan sumber pembelajaran, serta mekanisme penilaian.

CATATAN WAWANCARA

Hari, tanggal : Jumat, 4 Agustus 2017
Tempat : Ruang Kelas
Pukul : 09.15 - selesai
Narasumber : Musyahidah, S.Pd.I (Guru Mapel Fiqhi)
Jenis Data : Perpaduan kurikulum PAI di SDIT Rabbani

Peneliti : Bagaimana komposisi perpaduan kurikulum pendidikan agama Islam yang digunakan di SDIT Rabbani?
Narasumber : Sekarang mata pelajaran PAI dipadukan/dintegrasikan sedangkan mata pelajaran Tauhid, Hadis, dan Fiqhi berdiri sendiri. Mata pelajaran Fiqhi penguatannya lebih kepada praktek ibadah.
Peneliti : Dalam tahap pelaksanaan kurikulum di kelas, bagaimana proses penyusunan rencana dan program pembelajaran (silabus, dan rencana pelaksanaan pembelajaran)?
Narasumber : RPP disusun oleh guru yang bersangkutan berdasarkan SK dan KD dari Dinas Pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Silabus yang digunakan sesuai dengan yang berlaku di SDIT Rabbani.

CATATAN WAWANCARA

Hari, tanggal : Senin, 7 Agustus 2017
Tempat : Ruang Kelas
Pukul : 09.15 - selesai
Narasumber : Nurmilayanti, A.Ma. (Guru Mapel Hadis)
Jenis Data : Perpaduan kurikulum PAI di SDIT Rabbani

Peneliti : Bagaimana komposisi perpaduan kurikulum pendidikan agama Islam yang digunakan di SDIT Rabbani?
Narasumber : Mata pelajaran hadis disajikan pada posisi muatan pengembangan diri dengan alokasi waktu 2 jam pelajaran dengan tema-tema hadis pilihan dan yang sudah disesuaikan berdasarkan tujuan pemuatan hadis dan tingkat kemampuan daya ingat (hafalan) peserta didik.
Peneliti : Dalam tahap pelaksanaan kurikulum di kelas, bagaimana proses penyusunan rencana dan program pembelajaran (silabus, dan rencana pelaksanaan pembelajaran)?
Narasumber : Proses penyusunan rencana dan program pembelajaran hadis mengacu pada pedoman umum pembuatan RPP namun pada kenyataan yang terjadi di kelas lebih mengarah pada penekanan aplikasi hafalan dan penguatan nilai-nilai karakter yang termuat dalam muatan pelajaran hadis tersebut.

LAMPIRAN 6

OBSERVASI

Hari, tanggal : Kamis, 27 Juli 2017
Tempat : Ruang Kepala Sekolah
Pukul : 11.00 - selesai
Jenis Data : Penyusunan dan pengembangan KTSP
Instrumen : Daftar check (*checklist*)

Sekolah/Madrasah melaksanakan pengembangan kurikulum melalui mekanisme penyusunan KTSP.	
<input type="checkbox"/> A.	Mekanisme pengembangan kurikulum dilakukan melalui 7 kegiatan pokok
<input type="checkbox"/> B.	Mekanisme pengembangan kurikulum dilakukan melalui 5-6 (enam) kegiatan pokok
<input type="checkbox"/> C.	Mekanisme pengembangan kurikulum dilakukan melalui 3-4 kegiatan pokok
<input type="checkbox"/> D.	Mekanisme pengembangan kurikulum dilakukan melalui 1-2 kegiatan pokok
<input type="checkbox"/> E.	Tidak mengembangkan kurikulum

OBSERVASI

Hari, tanggal : Kamis, 27 Juli 2017
 Tempat : Ruang Kepala Sekolah
 Pukul : 11.00 - selesai
 Jenis Data : Penyusunan dan pengembangan KTSP
 Instrumen : Daftar check (*checklist*)

Kegiatan dalam mekanisme pengembangan KTSP

Kegiatan pokok dalam mekanisme pengembangan KTSP	Ya	Tidak
1. Melibatkan tim pengembang	√	
2. dilakukan melalui pertemuan, seperti: workshop, bimbingan teknis, dan lain-lain	√	
3. Kegiatan revidi dan revisi	√	
4. Menghadirkan narasumber		√
5. Tahap finalisasi	√	
6. Pemantapan dan penilaian dokumen KTSP oleh Tim Pengembang	√	
7. Mendokumentasikan hasil pengembangan kurikulum yang ditandatangani Dinas Pendidikan		√

Tim Pengembang Kuriulum

Tim Pengembang Kuriulum	Ada	Tidak
1. Kepala sekolah	√	
2. Guru	√	
3. Komite sekolah/penyelenggara lembaga pendidikan	√	
4. Tokoh pendidikan setempat		√

OBSERVASI

Hari, tanggal : Kamis, 3 Agustus 2017
 Tempat : Ruang Kepala Sekolah
 Pukul : 08.00 - selesai
 Jenis Data : Manajemen kurikulum
 Instrumen : Daftar check (*checklist*)

Tahap Kegiatan	Ya	Tidak	Ket.
Perencanaan			
1. Analisis kebutuhan	√		
2. Merumuskan dan menjawab pertanyaan filosofis		√	
3. Menentukan desain kurikulum	√		
4. Membuat rencana induk (<i>master plan</i>) berupa pengembangan, pelaksanaan, dan penilaian	√		
Pengorganisasian			
1. Perumusan rasional atau dasar pemikiran		√	
2. Perumusan visi, misi, dan tujuan	√		
3. Penentuan struktur dan isi program	√		
4. Pemilihan dan pengorganisasian materi	√		
5. Pengorganisasian kegiatan pembelajaran	√		
6. Pemilihan sumber, alat, dan sarana belajar	√		
7. Penentuan cara mengukur hasil belajar	√		
Pelaksanaan			
1. Penyusunan rencana dan program pembelajaran (silabus, dan RPP)	√		
2. Penjabaran materi (kedalaman dan keluasan)	√		
3. Penentuan strategi dan metode pembelajaran	√		
4. Penyediaan sumber, alat, dan sarana pembelajaran	√		
5. Penentuan cara dan alat penilaian proses dan hasil belajar	√		
6. <i>Setting</i> lingkungan pembelajaran	√		
Evaluasi atau Penilaian			
1. Evaluasi tujuan pendidikan	√		
2. Evaluasi isi/materi kurikulum	√		
3. Evaluasi strategi pembelajaran	√		
4. Evaluasi program penilaian	√		

LAMPIRAN 7

DOKUMENTASI

Hari, Tanggal : Senin, 7 Agustus 2017
Jenis Data : Berita Acara dan Daftar Hadir Rapat Kerja Penyusunan dan Pengembangan KTSP

**YAYASAN PENDIDIKAN IBNU QAYYIM BONE
SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU RABBANI
JL. URIP SUMOHARJO KM. 1 WATAMPONE**

BERITA ACARA

**Penyusunan dan Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan pelajaran (KTSP)
Tahun Pelajaran 2017/2018**

Pada hari ini, Senin tanggal 11 bulan Juli tahun Dua Ribu tujuh Belas. Telah diselenggarakan rapat kerja Penyusunan dan Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pelajaran (KTSP) dari pukul 08.00 sampai dengan pukul 14.00 WITA.

Pada Sekolah : SD IT Rabbani
Alamat Sekolah : Jl. Urip Sumoharjo Km. 1 Watampone
Jumlah Peserta : 12 orang

Kegiatan Rapat kerja tersebut, dilaksanakan dalam rangka pemenuhan prasyarat administratif pengelolaan lembaga pendidikan dan kegiatan proses belajar mengajar. Selama pelaksanaan kegiatan rapat kerja berjalan dengan baik tertib dan lancar.

Sekretaris



Patmawati, S.Pd
Jabatan : Waka Kurikulum

Ketua


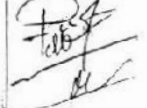
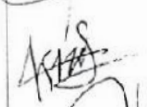



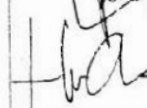

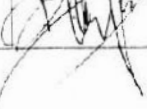





A. Tajuddin, S.Pd
Jabatan : Kepala Sekolah

YAYASAN PENDIDIKAN IBNU QAYYIM BONE
SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU RABBANI
JL. URIP SUMOHARJO KM. 1 WATAMPONE

DAFTAR HADIR

Tim Penyusunan dan Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)
 Tahun Pelajaran 2017/2018
 Hari/Tanggal : Senin, 11-07-2017

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	A. Tajuddin, S.Pd	Kepala Sekolah	
2.	Patmawati, S.Pd	Waka Kurikulum	
3.	Rostina, S.Pd	Waka Akademik & Kesiswaan	
4.	Nursia, S.Sos	Waka Sarana & Prasarana	
5.	A. Astrinika Khaikal, S.Sos	Guru Kelas	
6.	Anna Bibiana, S.Pd	Guru Kelas	
7.	A. Matahari, S.Pd	Guru Kelas	
8.	A. Marlina, S.Pd	Guru Kelas	
9.	Rosdiana, S.Hi	Guru Mapel	
10.	Hendra Saputra	Guru Mapel	
11.	Burhanuddin, SE	Ketua Komite	
12.	Didin Syafrudin	Anggota Komite	

DOKUMENTASI

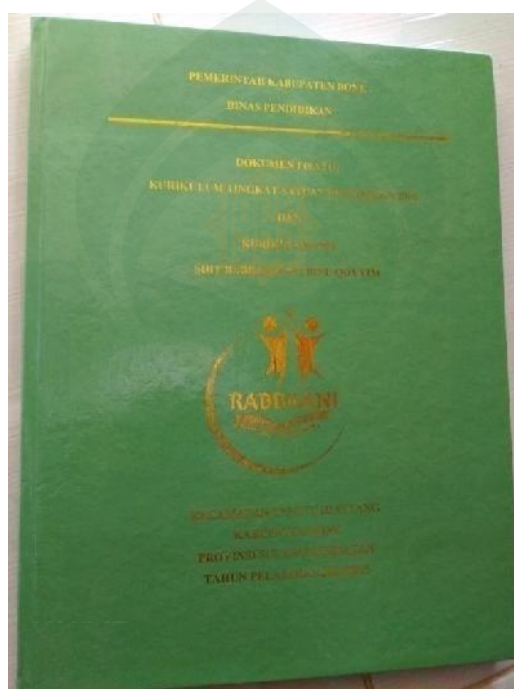
Hari, Tanggal : Senin, 7 Agustus 2017
Jenis Data : Profil SDIT Rabbani

PROFIL SDIT RABBANI

1. Nama Sekolah/Madrasah : SDIT Rabbani
2. Nomor Statistik Sekolah : 102190725 005
NPSN : 69788071
3. Alamat Sekolah
 - a. Jalan : Urip Sumoharjo Km. 1
 - b. Kelurahan : Walannae
 - c. Kecamatan : Tanete Riattang
 - d. Kabupaten : Bone
 - e. Kode Pos : -
 - f. Telepon : 085242890529/085237119419
 - g. E-mail : sditrabbani@gmail.com
 - h. Website : -
4. Status Sekolah : Swasta
5. Badan Penyelenggara : Yayasan Ibnu Qayyim
6. Akte Notaris : Nomor: C-141.HT.30.01 – Th. 2006
7. No. Akte Pendirian Terakhir : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan No. 395 Tahun 2012
8. Tahun Berdiri Sekolah : 2011
9. Kepala Sekolah yang Pertama : Sudarmi, S.Pd.
10. Kepala Sekolah Sekarang : A. Tajuddin, S.Pd.
11. Keadaan Gedung : Permanen/Darurat
12. Jumlah Guru : 24 Orang (Lk. 4 dan Pr. 20)
13. Jumlah Murid
 - Kelas I Pa : 32 Orang
 - Kelas I Pi : 24 Orang
 - Kelas II Pa : 32 Orang
 - Kelas II Pi : 31 Orang
 - Kelas III Pa : 28 Orang
 - Kelas III Pi : 32 Orang
 - Kelas IV Pa : 32 Orang
 - Kelas IV Pi : 30 Orang
 - Kelas V Pa : 27 Orang
 - Kelas V Pi : 20 Orang
 - Kelas IV : 29 Orang

DOKUMENTASI

Hari, Tanggal : Senin, 7 Agustus 2017
Jenis Data : Dokumen 1 KTSP



ALAUDDIN
MAKASSAR

DOKUMENTASI

Hari, Tanggal : Senin, 4 September 2017
 Jenis Data : Contoh Silabus dan RPP

SILABUS

Mata Pelajaran : Fiqh
 Kelas/Semester : IV/Ganjil
 Tahun Pelajaran : 2017/2018

Standar Kompetensi	Kompetensi Dasar	Materi Pokok	Indikator	Kegiatan Pembelajaran	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber / Alat Belajar
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Memahami cara berwudhu ketika memakai sepatu, syarat mengusap sepatu, kaos kaki dan hikmah yang terkandung di dalamnya	1.1 Menjelaskan cara berwudhu dalam keadaan memakai sepatu	Berwudhu dengan memakai sepatu	<ul style="list-style-type: none"> - Menyebutkan tata cara berwudhu dengan memakai sepatu - Menyebutkan dalil berwudhu dengan memakai sepatu 	<ul style="list-style-type: none"> - Membaca buku Paket tentang berwudhu dengan memakai sepatu - Membaca dalil-dalil tentang berwudhu dengan memakai sepatu - Menjelaskan tata cara berwudhu dengan memakai sepatu 	<ul style="list-style-type: none"> - Tes lisan - Proses - Tes tugas individu 		<ul style="list-style-type: none"> - B. Paket Fiqh - Alat penga Fiqh
	1.2 Menyebutkan syarat-syarat mengusap sepatu	Berwudhu dengan memakai sepatu	<ul style="list-style-type: none"> - Menyebutkan syarat-syarat mengusap sepatu - Menghapal syarat-syarat mengusap sepatu - Menyebutkan dalil syarat-syarat 	<ul style="list-style-type: none"> - Membaca dalil-dalil tentang syarat-syarat mengusap sepatu - Secara perorangan membuat mind mapping tentang syarat mengusap sepatu - Menuliskan dan membuat kesimpulan tentang syarat-syarat 	<ul style="list-style-type: none"> - Tes lisan - Performance - Demonstrasi 		<ul style="list-style-type: none"> - Buku paket Fiqh - Buku penunjang - Media - paket lainnya

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
(RPP)

Satuan Pendidikan : SDIT Rabbani
Kelas/Semester : IV / 1
Mata Pelajaran : FIQIH
Alokasi Waktu : 2 x 35 menit
Waktu Pelaksanaan : 3 Agustus 2017

Bismillaahi rohmani rohiim...

I. Standar Kompetensi

Memahami cara berwudhu ketika memakai sepatu, syarat mengdung diusap sepatu, kaos kaki dan hikmah yang terkandung di dalamnya

II. Kompetensi Dasar

1.1. Menjelaskan cara berwudhu dalam keadaan memakai sepatu

II. Indikator Pencapaian Kompetensi

1.1.1 Menyebutkan tata cara berwudhu dengan memakai sepatu

2.1.2 Menjelaskan dan memaparkan beberapa dalil tentang berwudhu memakai sepatu.

IV. Tujuan Pembelajaran

1. Melalui informasi singkat, diskusi dan penugasan, In syaa Allah siswa dapat menyebutkan tata cara berwudhu dengan memakai sepatu
2. Melalui informasi singkat, diskusi dan penampilan media gambar, In syaa Allah siswa dapat menjelaskan dn memakai sepatualil-dalil tentang berwudhu dengan memakai sepatu

V. Materi

Berwudhu dengan memakai sepatu

VI. Metode dan media pembelajaran

1. Model Pembelajaran : CTL
2. Metode Pembelajaran : Ceramah, Tanya jawab, Diskusi, Pemberian tugas

VII. Kegiatan Pembelajaran

Tema operasional :

a. Kegiatan Pendahuluan (15 Menit)

- ✦ Guru mengucapkan salam, dan memeriksa kehadiran siswa sebelum memulai pelajaran
- ✦ Menyampaikan Tujuan Pembelajaran dan Kompetensi yang akan dicapai setelah pembelajaran selesai
- ✦ Mengadakan Apersepsi untuk membangkitkan semangat belajar dengan cara
"Melakukan tanya jawab untuk mengaitkan materi pelajaran yang telah disampaikan dengan materi yang akan diajarkan, kemudian memperlihatkan gambar tata cara wudhu memakai sepatu melalui media pembelajaran"

b. Kegiatan Inti (80 Menit)

- ✦ Siswa membaca surah Al maidah ayat 5-6
- ✦ Siswa menyimak penjelasan guru bahwa ada berbagai cara dan tuntunan rasulullah dalam berwudhu
- ✦ Siswa secara aktif mengamati gambar tahapan tata cara berwudhu dengan memakai sepatu melalui media pembelajaran.
- ✦ Siswa dibagi kelompok menjadi 5 kelompok diskusi, dengan anggota masing - masing kelompok 5 orang
- ✦ Siswa mendapatkan Lembar Kerja yang harus diisi kepada masing - masing kelompok
- ✦ Siswa mendiskusikan dan mengisi Lembar Kerja yang telah diberikan, yang berisi tentang tata cara berwudhu dengan memakai sepatu
- ✦ Memberi kesempatan siswa dalam kegiatan diskusi untuk bertanya, berpikir, menganalisis, dan menyimpulkan permasalahan
- ✦ Setelah selesai membahas Lembar Kerja peserta didik, guru mempersilahkan siswa membuat laporan hasil diskusi yang dilakukan secara tertulis dari masing - masing kelompok kemudian dikumpulkan.
- ✦ Guru memfasilitasi peserta didik untuk mendemonstrasikan tata cara berwudhu dengan memakai sepatu dengan baik.
- ✦ Peserta didik membahas hasil praktek dan mendiskusikan dengan masing - masing kelompok

b. Kegiatan Penutup (10 Menit)

- ✦ Guru mengulang kembali kegiatan yang telah dilakukan, memberi kesempatan dan membuat rangkuman
- ✦ Guru melakukan evaluasi terhdap pembelajaran yang dilakukan
- ✦ Merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk remidi, program pengayaa bagi peserta didik yang masih mengalami hambatan dalam pembelajaran
- ✦ Guru meberikan taujihat dan semangat dan tidak melupakan adab kepada guru

1. Teknik Penilaian : Tes
2. Bentuk Instrumen : Skoring
3. Instrumen Penilaian : (Terlampir)

IX. Media, Alat dan Sumber Belajar

1. Media : Gambar
2. Alat : NB
3. Sumber Belajar: Al Quran, Buku paket Fiqih penerbit Al- Sofwa

Demikianlah Rencana Pelaksanaan Pembelajaran telah disusun dengan niat karena Allah, semoga melalui ini Allah mengijabah harapan kami untuk menghasilkan generasi Rabbani. Aamiin.

Watampone, 3 Agustus 2017

Kepala Sekolah SDIT Rabbani

Guru Mapel Fiqih

(A.Tajuddin, S.Pd)
NIK 19771021005

(A.Tajuddin,S.Pd)
NIK 19771021005

LAMPIRAN 8

FOTO



SDIT Rabbani



Wawancara dengan Kepala SDIT Rabbani



Wawancara dengan Guru SDIT Rabbani

FOTO



Kegiatan Pembelajaran



Kegiatan Olahraga



Kegiatan saat jam istirahat

IZIN PENELITIAN

Nomor: 070/12.783/VII/IP/DPMPSTP/2017

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Teknologi;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;

Dengan ini memberikan Izin Penelitian Kepada :

N a m a : **MUSAWWIR**

NIP/Nim/Nomor Pokok : 80300215028

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Alamat : Jl. Besse Kajuara Kel. Jeppee Kec. Tanete Riattang Barat

Pekerjaan : Mahasiswa PPs UIN Alauddin Makassar

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka Penulisan Tesis dengan Judul :

**" MANAJEMEN KURIKULUM PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SDIT RABBANI
KECAMATAN TANETE RIATTANG KABUPATEN BONE"**

Lamanya Penelitian : 25 Juli 2017 s/d 25 Agustus 2017

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian kiranya melapor pada Kepala SDIT Rabbani Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone
2. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
3. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar Foto Copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone.
5. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Demikian Izin Penelitian ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Watampone, 25 Juli 2017

KEPALA,



Drs. MUHAMMAD AKBAR, MM

Pangkat / Pembina Utama Muda

Nip : 19660717 198603 1 009

Tembusan Kepada Yth.:

1. Bupati Bone di Watampone
2. Ketua DPRD Kab. Bone di Watampone
3. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kab. Bone di Watampone
4. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Bone di Watampone
5. Kepala SDIT Rabbani Kec. Tanete Riattang Kab. Bone di Tanete Riattang
6. Arsip.



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 10750/S.01P/P2T/07/2017
Lampiran :
Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth.
Bupati Bone

di-
Tempat

Berdasarkan surat Direktur PPs UIN Alauddin Makassar Nomor : Un.06/PPs/TL.00.9/1085/2017 tanggal 19 Juli 2017 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : **MUSAWWIR**
Nomor Pokok : 80300215028
Program Studi : Manajemen Pendidikan Islam
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)
Alamat : Jl. Muh. Yasin Limpo No. 36 Samata, Sungguminasa-Gowa

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

" MANAJEMEN KURIKULUM PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SDIT RABBANI KECAMATAN TANETE RIATTANG KABUPATEN BONE "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **24 Juli s/d 14 Agustus 2017**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada tanggal : 20 Juli 2017

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu



A. M. YAMIN, SE., MS.

Pangkat : Pembina Utama Madya
Nip : 19610513 199002 1 002

Tembusan Yth
1. Direktur PPs UIN Alauddin Makassar di Makassar;
2. Peringgal.





YAYASAN IBNU QAYYIM KABUPATEN BONE
SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU RABBAANI
JL. URIP SUMAHARJO KM 1. WATAMPONE



SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : A. TAJUDDIN, S.Pd
NIK : 19771021005
Jabatan : Kepala SDIT Rabbani Kecamatan Tanete Riattang
Alamat : Jl. Gunung Kinibalu

Menerangkan bahwa :

Nama : Musawwir
NIM : 80300215028
Universitas : UIN Alauddin Makassar (Program Pascasarjana)
Alamat : Jl. Besse Kajuara Watampone

Memberikan persetujuan untuk melaksanakan penelitian dalam rangka penyusunan tesis dengan judul " Manajemen Kurikulum Pendidikan Agama Islam di SDIT Rabbani Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone ".

Demikian persetujuan ini kami berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Watampone, 24 Juli 2017

Kepala SDIT Rabbani



(A. TAJUDDIN, S.Pd)

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

No. K.078/SDIT-YIG/X/1438

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : A. TAJUDDIN, S.Pd.
NIK : 19771021005
Jabatan : Kepala SDIT Rabbani Kecamatan Tanete Riattang
Alamat : Jl. G. Kinibalu Watampone

Menerangkan bahwa:

Nama : MUSAWWIR
NIM : 80300215028
Pekerjaan : Mahasiswa S2 UIN Alauddin Makassar
Alamat : Jl. Besse Kajuara Watampone

Telah melakukan penelitian dalam rangka penyusunan Tesis dengan judul "**Manajemen Kurikulum Pendidikan Agama Islam di SDIT Rabbani Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone**".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Watampone, 24 Agustus 2017

Kepala SDIT Rabbani



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : PATMAWATI, S.Pd.
NIK : 19800818006
Jabatan : Waka Kurikulum
Alamat : Wactuo

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan:

Nama : MUSAWWIR
NIM : 80300215028
Pekerjaan : Mahasiswa S2 UIN Alauddin Makassar
Alamat : Jl. Besse Kajuara Watampone

Dalam rangka pengumpulan data untuk penelitian Tesis dengan judul **“Manajemen Kurikulum Pendidikan Agama Islam di SDIT Rabbani Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone”**.

Demikian keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Watampone, 1 Agustus 2017

Waka Kurikulum
SDIT Rabbani



PATMAWATI, S.Pd.

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : A. TAJUDDIN, S.Pd.
NIK : 19771021005
Jabatan : Kepala SDIT Rabbani Kecamatan Tanete Riattang
Alamat : Jl. G. Kinibalu Watampone

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan:

Nama : MUSAWWIR
NIM : 80300215028
Pekerjaan : Mahasiswa S2 UIN Alauddin Makassar
Alamat : Jl. Besse Kajuara Watampone

Dalam rangka pengumpulan data untuk penyusunan Tesis dengan judul "**Manajemen Kurikulum Pendidikan Agama Islam di SDIT Rabbani Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone**".

Demikian keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Watampone, 1 Agustus 2017

Kepala SDIT Rabbani



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : A. TAJUDDIN, S.Pd.
NIK : 19771021005
Jabatan : Guru Mata pelajaran Tauhid
Alamat : Jl. G. Kimibalu Watampone

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan:

Nama : MUSAWWIR
NIM : 80300215028
Pekerjaan : Mahasiswa S2 UIN Alauddin Makassar
Alamat : Jl. Besse Kajuara Watampone

Dalam rangka pengumpulan data untuk penyusunan Tesis dengan judul "**Manajemen Kurikulum Pendidikan Agama Islam di SDIT Rabbani Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone**".

Demikian keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Watampone, 1 Agustus 2017

Guru Mata pelajaran Tauhid
SDIT Rabbani


A. TAJUDDIN, S.Pd.

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ROSDIANA, S.Hi.
NIK : 19760416013
Jabatan : Guru Mata pelajaran PAI
Alamat : BTN Alam Indah

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan:

Nama : MUSAWWIR
NIM : 80300215028
Pekerjaan : Mahasiswa S2 UIN Alauddin Makassar
Alamat : Jl. Besse Kajuara Watampone

Dalam rangka pengumpulan data untuk penyusunan Tesis dengan judul **"Manajemen Kurikulum Pendidikan Agama Islam di SDIT Rabbani Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone"**.

Demikian keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Watampone, 2 Agustus 2017

Guru Mata pelajaran PAI
SDIT Rabbani


ROSDIANA, S.Hi.

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NURMILAYANTI, A.Md.
NIK : 19811024018
Jabatan : Guru Mata pelajaran Hadis
Alamat : Jl. A. Pangerang Pt. Rani

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan:

Nama : MUSAWWIR
NIM : 80300215028
Pekerjaan : Mahasiswa S2 UIN Alauddin Makassar
Alamat : Jl. Besse Kajuara Watampone

Dalam rangka pengumpulan data untuk penyusunan Tesis dengan judul "**Manajemen Kurikulum Pendidikan Agama Islam di SDIT Rabbani Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone**".

Demikian keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Watampone, 7 Agustus 2017

Guru Mata pelajaran Fiqhi
SDIT Rabbani


NURMILAYANTI, A.Md.

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUSYAHIDAH, S.Pd.I
NIK : -
Jabatan : Guru Mata pelajaran Fiqhi
Alamat : Pallette

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan:

Nama : MUSAWWIR
NIM : 80300215028
Pekerjaan : Mahasiswa S2 UIN Alauddin Makassar
Alamat : Jl. Besse Kajuara Watampone

Dalam rangka pengumpulan data untuk penelitian Tesis dengan judul
**“Manajemen Kurikulum Pendidikan Agama Islam di SDIT Rabbani
Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone”.**

Demikian keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Watampone, 4 Agustus 2017

Guru Mata pelajaran Fiqhi
SDIT Rabbani



MUSYAHIDAH, S.Pd.I

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

1. Nama : Musawwir
2. Tempat, Tanggal Lahir : Macege, 14 September 1983
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Agama : Islam
5. No. Hp : 0852 5552 0646
6. Status : Menikah
7. E-mail : musawwirmusa@gmail.com
8. Alamat : Jl. Besse Kajuara No. 9 Watampone

B. Riwayat Pendidikan

1. SD Inpres 12/79 Macege Tahun 1989-1995
2. MTs Pesantren Ummushabri Kendari Tahun 1995-1998
3. MAN 1 Kendari Tahun 1998-2001
4. STAIN Watampone Tahun 2001-2006

C. Riwayat Pekerjaan

1. Guru Pendidikan Agama Islam pada SDN 170 Rumpia Kec. Majauleng Kab. Wajo Tahun 2010-2013.
2. Guru Pendidikan Agama Islam pada SDN 8 Watampone Kec. Tanete Riattang Kab. Bone Tahun 2013-Sekarang